



*Enam Tahun Setelah Tsunami:
Dari Pemulihan Menuju
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*



Kantor MDF Jakarta

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I/Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (+6221) 5229-3000
Faks: (+6221) 5229-3111
www.multidonorfund.org

Dicetak 2010

Publikasi ini diproduksi oleh Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias.

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini disusun oleh Sekretariat Multi Donor Fund dengan kontribusi dari Badan Mitra (UNDP, WFP, ILO dan Bank Dunia) serta tim proyek.

Sekretariat Multi Donor Fund dipimpin oleh Manajer MDF Shamima Khan, dengan anggota tim: Sarosh Khan, Safriza Sofyan, Anita Kendrick, Akil Abduljalil, Harry Masyrafah, Lina Lo, Puni Ayu Indrayanto, Shaun Parker, dan Geumala Yatim.

Tim ini didukung oleh Rachmawati Swandari, Inge Susilo, Friesca Erwan dan Olga Lambey.

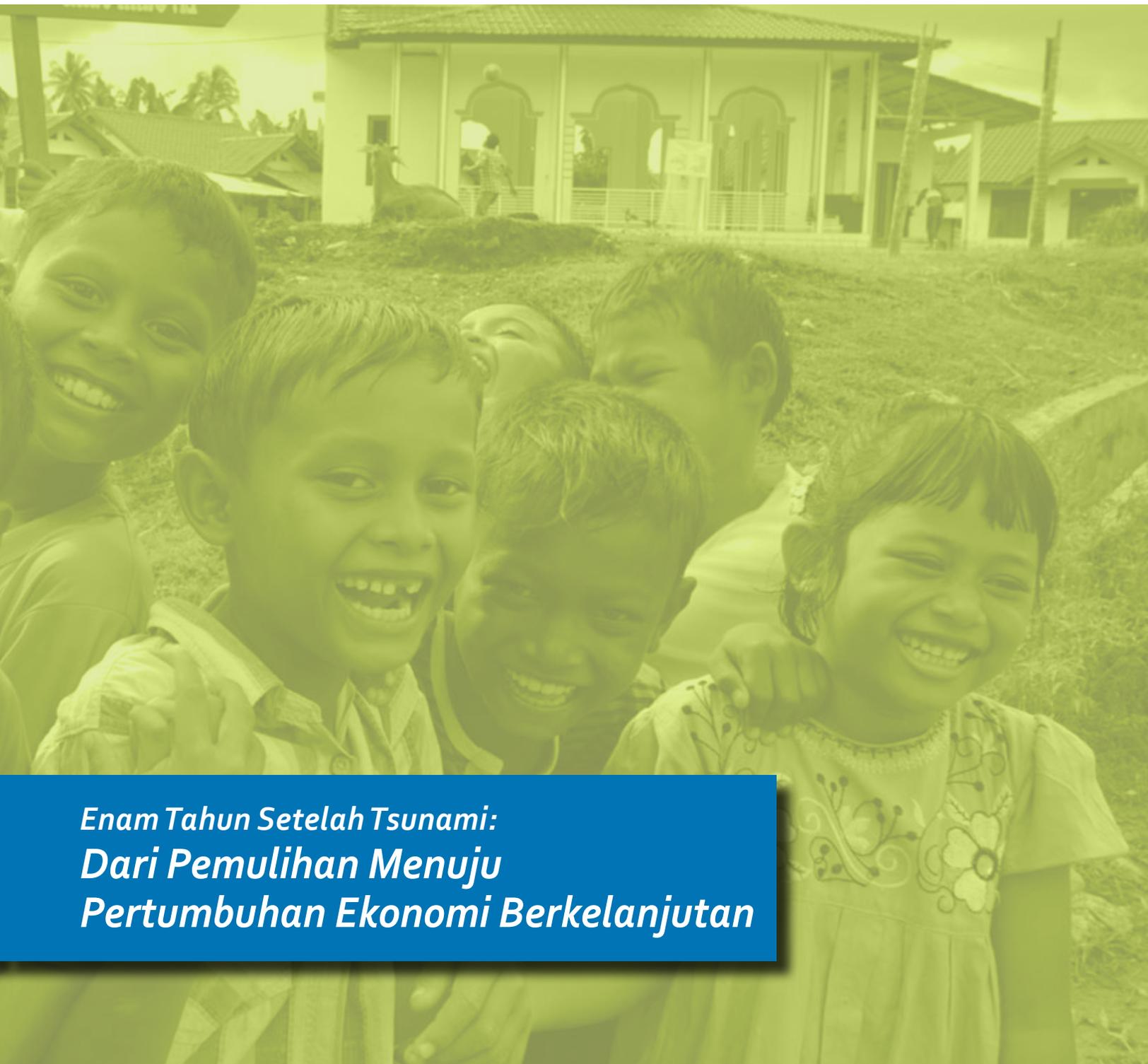
Dukungan editorial: T. Sima Gunawan (bahasa Indonesia)

Percetakan: PT. Lumbung Kencana Makmur

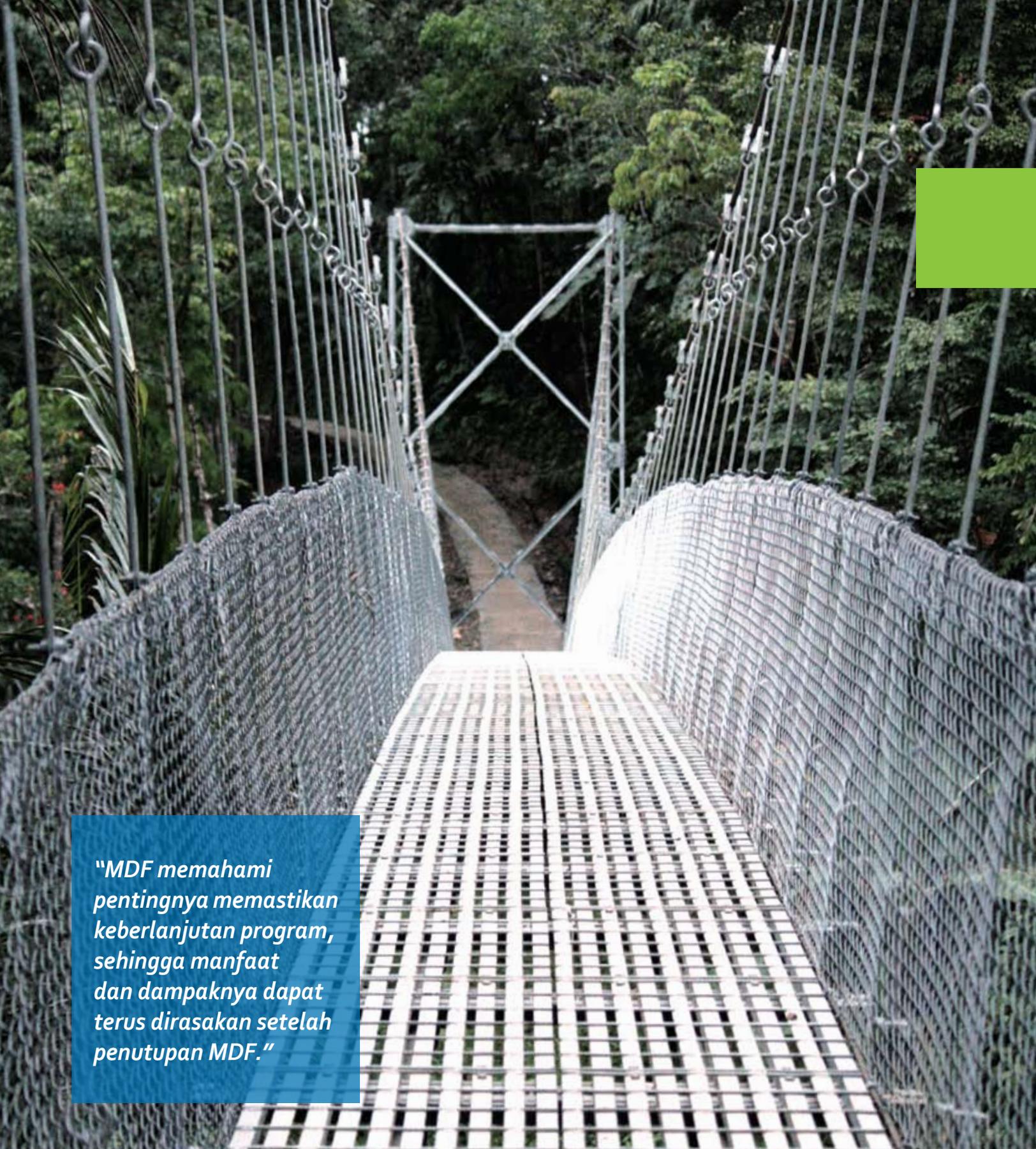


Anak-anak berpose di depan lingkungan baru mereka yang dibangun dengan dukungan proyek Rekompak MDF di Tubuk Lancang, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh (pada kedua halaman ini/sampul).

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF



*Enam Tahun Setelah Tsunami:
Dari Pemulihan Menuju
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*



"MDF memahami pentingnya memastikan keberlanjutan program, sehingga manfaat dan dampaknya dapat terus dirasakan setelah penutupan MDF."

Jembatan gantung Gido dan jalan beton yang menghubungkannya mengurangi waktu tempuh perjalanan dan memudahkan masyarakat yang tinggal di tiga desa terpencil di Nias untuk mencapai pasar dan sekolah serta meningkatkan akses mereka terhadap fasilitas layanan masyarakat lainnya.

Foto: Shaun Parker/Sekretariat MDF

Sambutan Ketua Bersama MDF

Enam tahun telah berlalu sejak bencana tsunami dan gempa bumi menghancurkan kehidupan masyarakat di Aceh dan Nias tahun 2004 dan 2005. Bekas kehancuran kini nyaris tak terlihat, ekonomi daerah mulai berkembang dan kehidupan masyarakat dibangun kembali dengan lebih baik. Pekerjaan besar Pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena bencana telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai upaya berbagai pemangku kepentingan yang sukses dalam pemulihan pascabencana.

Multi Donor Fund (MDF) untuk Aceh dan Nias dibentuk untuk mendukung usaha pemerintah dalam memimpin upaya ini. Setelah penutupan BRR April 2009, Bappenas mengambil alih peran koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias, dan berperan sebagai salah satu Ketua Bersama MDF. Komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh dan Sumatera Utara memungkinkan MDF untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi agenda pemerintah untuk 'membangun kembali dengan lebih baik'.

Pemerintah Aceh bahkan bertekad untuk memenuhi kebutuhan yang tersisa dalam sektor infrastruktur, mata pencaharian dan perumahan sesuai dengan Rencana Aksi 2010–2012 serta memastikan pengoperasian dan dan pemeliharaan investasi yang dibangun MDF.

MDF menggunakan pendekatan bertahap untuk rekonstruksi, diawali dengan pemenuhan kebutuhan mendesak untuk pemulihan masyarakat, diikuti dengan pembangunan infrastruktur besar, pelestarian lingkungan, dan pembangunan kapasitas, serta pemulihan mata pencaharian.

Hari ini, dengan gembira kami sampaikan bahwa program tersebut telah mencapai hasil yang luar biasa. Proyek-proyek MDF berjalan sesuai dengan rencana dalam memenuhi target sebelum penutupannya di bulan Juni 2012. Pendekatan perumahan berbasis masyarakat yang digunakan MDF bahkan menjadi model rekonstruksi pascabencana. Investasi infrastruktur telah membangkitkan kembali kegiatan ekonomi dan meningkatkan akses bagi masyarakat luas. Investasi dalam pengelolaan limbah dan lingkungan membantu mengurangi dampak negatif rekonstruksi. Saat ini kami bekerja untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesinambungan pembangunan di Aceh dan Nias.

Dengan demikian MDF akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek hingga akhir mandat. Pemahaman pelajaran yang diperoleh dan penyebaran praktik terbaik juga akan menjadi bagian penting dari kegiatan MDF di tahun-tahun.



Armida S. Alisjahbana

Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional



Irwandi Yusuf

Gubernur Aceh



Stefan Koeberle

Kepala Perwakilan
Bank Dunia



Julian Wilson

Kepala Delegasi
Uni Eropa



"MDF telah berkinerja dengan baik dan sebagian besar proyek yang berstatus aktif hampir selesai."

Tiga generasi dari keluarga Wulandari hidup berdampingan di rumah baru mereka yang dibangun melalui proyek Rekompak. Wulandari, 55, kehilangan suami dan salah satu dari tiga anak perempuannya saat tsunami terjadi pada tahun 2004. Wulandari dan anaknya telah membangun kembali kehidupan mereka di rumah baru yang dibangun oleh MDF di Ulee Lheue di Kota Banda Aceh, salah satu wilayah yang paling parah terkena gelombang tsunami.

Foto: Abbie Traylor-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Sambutan Ketua Bersama MDF | v |
| Ringkasan Eksekutif | 1 |
| Kemajuan dan Kinerja Portofolio | 1 |
| Operasi dan Komunikasi MDF | 2 |
| Keuangan | 2 |
| Prospek | 3 |
| Bab 1: Operasi dan Komunikasi MDF | 5 |
| Operasi MDF | 5 |
| Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Melalui Komunikasi | 7 |
| <i>Kisah MDF 1 Menyeberangi Jembatan Gido</i> | 10 |
| Bab 2: Kemajuan dan Kinerja Portofolio | 13 |
| Ikhtisar Portofolio MDF | 13 |
| Pemulihan Masyarakat | 14 |
| Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Besar dan Transportasi | 16 |
| Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas | 19 |
| Peningkatan Proses Pemulihan..... | 22 |
| Melestarikan Lingkungan | 24 |
| Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian | 26 |
| Tantangan | 28 |
| <i>Kisah MDF 2 Jalan Akses Baru Banda Aceh: Katalis untuk Pertumbuhan</i> | 30 |
| Bab 3: Keuangan MDF | 33 |
| Komitmen | 33 |
| Dana Tunai yang Tersedia | 33 |
| Alokasi dan Komitmen Pendanaan | 33 |
| Pencairan Dana | 34 |
| Prospek | 35 |
| <i>Kisah MDF 3 Aceh dan Nias yang Bersih dan Hijau</i> | 36 |
| Bab 4: Menatap ke Depan | 39 |
| <i>Kisah MDF 4 Mendukung Pemulihan Pascabencana Melalui Organisasi Berbasis Masyarakat di Nias</i> | 42 |
| Lampiran Portofolio Proyek | 45 |
| Daftar Akronim dan Singkatan | 69 |
| Peta Aceh dan Nias | 70 |



**"Melalui 23 proyeknya,
MDF memberikan
hasil yang berkualitas
tinggi."**

SDLP menyediakan pelatihan bagi staf utama dari 18 pelabuhan di Aceh dan Nias untuk memastikan kelanjutan operasi yang efektif dari investasi infrastruktur yang dibangun oleh MDF. Sekitar 80 persen dari semua staf pelabuhan di Aceh dan Nias dilatih melalui 138 kursus pelatihan yang telah diselenggarakan. Bahan-bahan kursus ini kemudian diserahkan ke Universitas Syiah Kuala untuk dimasukkan ke dalam program gelar pascasarjana mereka.

Foto: Koleksi SDLP

Ringkasan Eksekutif

Setelah terjadi gempa bumi dan tsunami yang dahsyat pada bulan Desember 2004 dan Maret 2005, Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias (MDF) mendukung Pemerintah Indonesia dalam rekonstruksi Aceh dan Nias. Melalui pengumpulan kontribusi senilai AS\$678 juta dari 15 donor (sekitar 10 persen dari keseluruhan dana rekonstruksi), MDF bertekad untuk memberikan kontribusi secara efisien dan efektif guna tercapainya rekonstruksi Aceh dan Nias yang "lebih baik". Hal ini dicapai dengan mengisi kesenjangan dalam rekonstruksi yang disesuaikan dengan prioritas pemerintah dan dalam menghimpun para pemain kunci dari berbagai tingkat pemerintah, donor, masyarakat sipil dan warga. MDF juga telah banyak memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi donor, dan telah berhasil menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalin dialog yang berkaitan dengan kebijakan. Kajian Paruh Waktu (MTR) MDF menyimpulkan bahwa pendekatan dan arahan MDF secara keseluruhan telah sesuai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. MDF juga dinilai berkinerja baik.

Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias terus berlanjut melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memainkan peran utama dalam MDF dan bertanggung jawab atas keseluruhan upaya koordinasi rekonstruksi dan rehabilitasi. Pemerintah provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga memainkan peran yang semakin penting dalam rekonstruksi dan pelaksanaan Rencana Aksi untuk Kelanjutan Rekonstruksi 2010-12 (Rencana Aksi 2010-2012) bersama dengan pemerintah pusat. MDF

dalam hal ini memberikan dukungan langsung bagi pemerintah pusat maupun provinsi dalam memainkan peran koordinasi dan pelaksanaan tersebut.

Kemajuan dan Kinerja Portofolio

Melalui 23 proyeknya, MDF memberikan hasil yang berkualitas tinggi. Sebagian besar proyek yang berada di bawah portfolionya telah selesai atau hampir selesai dikerjakan: delapan proyek telah selesai, 12 proyek telah memasuki tahap pelaksanaan penuh dan tiga proyek berada dalam tahap awal pelaksanaan. Ribuan proyek infrastruktur besar dan kecil telah selesai dan mulai memberikan kontribusi terhadap revitalisasi ekonomi daerah. Rumah dan sekolah telah ditempati dan digunakan, organisasi masyarakat semakin aktif dan saling berhubungan, lembaga daerah menjadi lebih kuat dan lebih tangguh, serta pemerintah daerah lebih siap dalam mengelola upaya rekonstruksi yang masih berlangsung dan pembangunan di masa mendatang. Dukungan terhadap kelestarian lingkungan telah membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari rekonstruksi pada sumber daya alam Aceh yang berharga. Masyarakat dan individu, terutama perempuan, lebih diberdayakan untuk berperan dalam perencanaan untuk pengembangan masa depan dalam masyarakat mereka. Peluang mata pencaharian bagi masyarakat telah ditingkatkan melalui kegiatan proyek dan kegiatan pembangunan ekonomi dengan target yang lebih khusus baru saja berjalan.

Hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan sosial juga telah dimasukkan ke seluruh aspek di dalam program MDF. Aspek kesetaraan dan inklusifitas gender telah tertanam kuat dalam setiap proyek MDF untuk memastikan bahwa perempuan dan kelompok marginal lainnya berperan dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. MDF juga telah menggunakan

pendekatan yang peka terhadap konflik dengan memperhitungkan ruang lingkup operasi MDF yang unik di Aceh, dengan mandat yang memungkinkan—proyek untuk beroperasi di lokasi pascabencana dan pascakonflik.

Proyek-proyek MDF mengatasi berbagai tantangan pelaksanaan fisik dan tantangan lainnya. Di Nias, faktor-faktor seperti keterpencilan lokasi proyek, jaringan transportasi yang buruk, musim hujan yang panjang, kurangnya akses untuk memperoleh bahan berkualitas, serta kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan staf lapangan yang berkualitas dapat membuat proyek tertunda. Semua proyek MDF menghadapi sejumlah tantangan baru dalam transisi proses dan tanggung jawab kepada pemerintah, terutama proses anggaran pemerintah reguler dalam hal pencairan dana. Hal ini ditambah dengan ketatnya jadwal penyelesaian pelaksanaan serangkaian proyek terakhir. Semua pemangku kepentingan telah menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama guna mendukung kelancaran pelaksanaan proyek. Dengan komitmen ini, MDF berada pada posisi yang tepat untuk terus bekerja dengan baik sampai penutupan semua proyek pada bulan Juni 2012.

Operasi dan Komunikasi MDF

Kualitas dan pelaksanaan proyek dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa portofolio MDF tepat dan memberikan hasil berstandar tinggi. Sekretariat MDF menyampaikan laporan kepada Komite Pengarah mengenai kemajuan dan tantangan portofolio. Saat ini Sekretariat MDF bersama dengan proyek sedang membahas strategi penutupan dan menyelesaikan pengaturan pemantauan dan evaluasi (M&E). Hal ini dilakukan untuk memastikan agar dampak MDF dalam rekonstruksi Aceh dan Nias dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan dan khalayak yang lebih luas dan mereka juga dapat meresapi pelajaran penting yang diperoleh dari berbagai kegiatan MDF. Lokakarya mengenai pembelajaran yang diperoleh

diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan penutupan beberapa proyek MDF. Transparansi dan akuntabilitas dalam portofolio MDF diperkuat melalui mekanisme penanganan keluhan yang telah ditetapkan dan dipantau secara teratur.

Proyek terus didukung dan disosialisasikan melalui kegiatan penjangkauan MDF. Kegiatan ini termasuk membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas mengenai kegiatan MDF dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik bagi MDF. Upaya penjangkauan MDF melibatkan pemangku kepentingan di berbagai tingkat dalam diskusi mengenai kebijakan, pendekatan dan hasil strategis serta tentang kegiatan proyek, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Keuangan

MDF telah mengalokasikan dan memberikan komitmen sebesar AS\$646 juta bagi 23 proyek sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Sekitar



P2DTK mendukung rehabilitasi sekolah serta memberikan pelatihan pengelolaan berbasis sekolah termasuk dukungan bagi sekolah dasar negeri di Bando Baru, Kabupaten Aceh Utara, seperti tampak pada gambar.

Foto: Akil Abduljalil/Sekretariat MDF

sepertiga portofolio MDF dialokasikan untuk bidang infrastruktur, sepertiga untuk proyek pemulihan masyarakat dan sisanya untuk keempat bidang lainnya, yaitu pembangunan ekonomi dan mata pencaharian, pelestarian lingkungan, pembangunan kapasitas dan tata kelola, serta peningkatan proses pemulihan. Sekitar 77 persen dari dana yang dialokasikan dan dijanjikan untuk proyek telah dicairkan (AS\$500 juta), dan proyek telah menghabiskan AS\$436 juta atau 87 persen dari dana yang disalurkan.

MDF memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan proyek melalui kementerian, lembaga dan mitra pembangunan lainnya. Sekitar 73 persen dana MDF telah disalurkan ke proyek-proyek melalui anggaran nasional pemerintah, 23 persen melalui kemitraan dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Program Pembangunan PBB - UNDP, Program Pangan Dunia - WFP dan Organisasi Buruh Internasional - ILO), dan 4 persen sisanya disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah juga memimpin pengangkatan Badan Mitra dan Badan Pelaksana bagi proyek-proyek yang didanai MDF, dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan kompetensi inti dari lembaga-lembaga tersebut.

Prospek

MDF tetap berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap rekonstruksi sampai dengan akhir mandatnya. Kesenambungan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari seluruh mitra dan pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek yang tersisa hingga penutupan MDF. Proyek MDF yang masih ada difokuskan pada pembentukan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan masa depan yang aman dan stabil di Aceh. Proyek menerapkan strategi penutupan, yang mendukung pengalihan aset rekonstruksi kepada lembaga daerah yang berwenang, serta memberikan arahan bagi operasi dan pemeliharaan yang tepat. Kedua proyek pembangunan ekonomi, proyek-proyek terakhir infrastruktur, serta

kegiatan pembangunan kapasitas dan penguatan kelembagaan yang terus berlanjut, berfokus pada usaha untuk memastikan bahwa dampak rekonstruksi masih akan tetap dirasakan oleh masyarakat Aceh dan Nias lama setelah penutupan MDF.

Saat ini dana MDF telah sepenuhnya dialokasikan untuk proyek yang disetujui.¹ Diperkirakan akan terdapat sisa dana dari masing-masing proyek yang telah dan akan ditutup. Dana ini kemudian akan dialokasikan kembali ke proyek yang masih berjalan atau kegiatan lain sejauh dimungkinkan dalam sisa jangka waktu yang terbatas. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan penggunaan sisa dana untuk memperkuat kapasitas lembaga daerah dan rekonstruksi infrastruktur daerah dalam kerangka kerja proyek yang ada.

MDF akan menilai hasil dan dampak dari usaha yang telah dilakukan dengan berfokus pada pembelajaran yang diperoleh. Bencana alam nasional dan global yang baru-baru ini terjadi telah kembali menimbulkan minat atas keberhasilan model dan pendekatan yang dirintis oleh MDF. MDF memperkuat program dan kegiatan di semua tingkat pemerintahan melalui peningkatan kapasitas untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan serta meningkatkan upaya tanggap bencana. Secara nasional dan global, MDF memberikan kontribusi atas terbentuknya program tanggap bencana yang baru. Dengan memanfaatkan pengalamannya dengan MDF, Pemerintah Indonesia bahkan telah membentuk Fasilitas Multidonor untuk Pemulihan pascabencana (IMDFF-DR). MDF akan terus berupaya menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat dalam menghadapi situasi yang rawan serta usaha pemulihan dan rekonstruksi dalam kondisi pascabencana di masa depan di seluruh dunia.

¹ Dengan memperhitungkan berkurangnya kontribusi yang sebelumnya dijanjikan donor seperti yang dijelaskan dalam Bab 3: Keuangan.



"Pemantauan proyek dan umpan balik merupakan hal penting untuk memastikan kualitas portofolio MDF."

Proyek IRFF membiayai serangkaian pekerjaan rekonstruksi infrastruktur yang meliputi sistem pasokan air bersih di Desa Pria Laut, Sabang, Aceh.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

Bab 1: Operasi dan Komunikasi MDF

Multi Donor Fund (MDF) tetap berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan usaha rekonstruksi Aceh dan Nias. MDF yang didirikan pada bulan April 2005 telah menghimpun AS\$678 juta dalam bentuk kontribusi dari 15 donor untuk mendukung pelaksanaan usaha rehabilitasi rekonstruksi pemerintah setelah terjadinya gempa bumi dan tsunami bulan Desember 2004 serta gempa bumi bulan Maret 2005. Kelima belas donor tersebut adalah: Uni Eropa, Belanda, Inggris, Bank Dunia, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Kanada, Bank Pembangunan Asia, Amerika Serikat, Belgia, Finlandia, Selandia Baru dan Irlandia.

MDF diatur oleh Komite Pengarah yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, donor, wali amanat dan masyarakat sipil. Atas permintaan pemerintah, Bank Dunia ditunjuk sebagai Wali Amanat MDF. Pemangku kepentingan utama lain, seperti Koordinator PBB



CBLR3 dan RACBP menggunakan pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk memanfaatkan tenaga kerja setempat dan menggunakan teknologi konstruksi jalan dan metode kerja yang tepat untuk menyelesaikan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Foto: Shaun Parker/Sekretariat MDF

dan perwakilan masyarakat LSM internasional, berpartisipasi dalam Komite Pengarah sebagai wakil mitra pembangunan dan untuk mendukung koordinasi di lapangan. Komite Pengarah dipimpin bersama oleh Pemerintah Indonesia (Bappenas), Pemerintah Aceh, Uni Eropa sebagai donor terbesar dan Bank Dunia sebagai Wali Amanat.

Operasi MDF

Bappenas memimpin koordinasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi setelah mandat BRR berakhir. Pengaturan transisi sementara yang dibentuk setelah penutupan BRR telah berakhir. MDF saat ini sepenuhnya berfungsi berdasarkan proses dan lembaga reguler Pemerintah Indonesia, serta berkoordinasi erat dengan Pemerintah provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Badan-badan koordinasi rekonstruksi interim yang dibentuk di tingkat pemerintah provinsi untuk mendukung proses transisi dari BRR ke pemerintah reguler telah ditutup. Pada saat ini, MDF berkomitmen penuh untuk mendanai proyek yang disetujui. Setiap sisa dana yang belum digunakan dari proyek yang sedang berlangsung dapat dialokasikan ke proyek-proyek lain yang ada jika disetujui oleh Bappenas, yang berperan sebagai koordinator, dan bekerja sama dengan Pemerintah provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

MDF bekerja dengan baik dan sebagian besar proyek aktif dalam portofolio hampir selesai. Proyek yang memasuki tahap akhir kini berfokus pada pengembangan strategi penutupan untuk mendorong kesinambungan. Gelombang terakhir proyek baru dan proyek yang ada, yang telah mendapatkan alokasi dana tambahan difokuskan pada pembangunan kapasitas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pada

September 2010, MDF melakukan tinjauan atas seluruh proyek yang didanainya. Presentasi dilakukan oleh para Badan Mitra, yaitu UNDP, ILO, WFP dan Bank Dunia di hadapan Komite Pengarah. Komite Pengarah menyatakan kepuasannya atas kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek serta pengelolaan keuangan MDF yang dilakukan oleh Wali Amanat.

MDF terus bekerja sama dengan Bappenas dan pemerintah kedua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara untuk mencapai hasil proyek yang berkualitas tinggi melalui pendekatan bertahap dan seperti yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia. Bappenas, melalui konsultasi erat dengan pemerintah kedua provinsi, telah mengembangkan Rencana Aksi untuk Kelanjutan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias 2010-2012. Rencana Aksi mengidentifikasi kesenjangan dalam upaya rekonstruksi, dengan rencana pelaksanaan yang berakhir Desember 2012. Sesuai dengan prioritas pemerintah, tujuan MDF secara keseluruhan adalah memberikan kontribusi yang efisien dan efektif terhadap rekonstruksi Aceh dan Nias yang "lebih baik" dengan mengisi kesenjangan yang diidentifikasi dalam dokumen strategi pemerintah. Proyek-proyek ini tidak hanya merekonstruksi perumahan dan infrastruktur serta merehabilitasi ekonomi sesuai dengan dokumen strategi ini, namun juga mengatasi keprihatinan sosial seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan mata pencaharian, dan peningkatan kesetaraan gender.

MDF terus menindaklanjuti rekomendasi dari Kajian Tengah Waktu (MTR) dalam konteks prioritas Pemerintah Indonesia, serta dalam lingkup dan jadwal MDF. Proses Kajian Tengah Waktu yang komprehensif atas MDF telah diselesaikan pada bulan November 2009. Temuan ini menegaskan bahwa portofolio MDF berkinerja baik, dan arahnya secara keseluruhan sesuai dan relevan. Hasil MTR dipresentasikan di hadapan Komite Pengarah pada tanggal 16 November 2009. Berdasarkan rekomendasi MTR, Komite Pengarah

pada bulan Maret 2010 memutuskan bahwa, karena singkatnya waktu pelaksanaan yang tersisa sebelum tanggal penutupan MDF, dana yang tersisa akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang ada sesuai dengan prioritas pemerintah.

MDF telah sepenuhnya mengalokasikan dana yang tersedia untuk proyek yang disetujui. Pada pertemuan Ketua Bersama Komite Pengarah MDF yang diselenggarakan Maret 2010, perwakilan ketua bersama, termasuk Pemerintah Provinsi Aceh, mendukung dua kebutuhan prioritas utama yang dipaparkan oleh Bappenas sebagai investasi infrastruktur dan lanjutan koordinasi rekonstruksi. Komite Pengarah kemudian mendukung pendanaan



"Dimensi gender tertanam kuat dalam proyek-proyek MDF untuk memastikan bahwa perempuan memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan masyarakat."

Seorang anggota kelompok produsen di Desa Lam Cot, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, membuat makanan tradisional kue karah. Dia dan anggota lain dalam kelompoknya mampu memulihkan kegiatan mata pencaharian mereka melalui bantuan pinjaman mikro dari PPK.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

tambahan untuk Bantuan Teknis bagi Proyek BRR dan Bappenas yang dilaksanakan oleh UNDP, dan pembiayaan tambahan bagi proyek IRFF untuk membangun jalan sepanjang pantai barat Aceh.

Keputusan utama terkait dengan kemungkinan penggunaan sisa dana dari proyek yang ditutup dicapai selama periode pelaporan ini. Dengan komitmen penuh atas semua dana yang tersisa, Komite Pengarah pada bulan September 2010 menanggapi kebutuhan pemerintah yang masih ada dengan menyetujui bahwa sedapat mungkin dana yang tersisa akan diprioritaskan untuk pembangunan kapasitas lembaga daerah dan rekonstruksi infrastruktur daerah. Hal ini akan didanai melalui proyek yang berjalan.

Pemantauan proyek dan umpan balik merupakan hal yang penting untuk memastikan kualitas portofolio MDF. Kegiatan pengawasan rutin dilakukan oleh Badan Mitra untuk memantau kemajuan dan kualitas proyek. Kegiatan tersebut sering dihadiri oleh Sekretariat MDF dan donor. Konsultasi dilakukan dengan tim proyek dan Badan Mitra untuk membahas strategi penutupan dan pengaturan penutupan M&E untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan merasakan dampak MDF dalam rekonstruksi Aceh dan Nias serta meresapi pelajaran penting yang diperoleh, untuk digunakan dalam program pemulihan pascabencana di masa mendatang. Umpan balik yang diterima melalui berbagai mekanisme penanganan keluhan terus dipantau dan tindak lanjut diambil sesuai kebutuhan.

MDF akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mendukung agenda rekonstruksi daerah yang terkena dampak hingga akhir mandat MDF. Komunitas donor MDF terus menunjukkan minat yang besar terhadap operasi MDF. Melalui perwakilan tingkat Komite Pengarah dan Tim Peninjau Teknis, para donor terus terlibat erat dalam pemantauan kemajuan dan hasil MDF. Mereka juga



Sebuah gedung sekolah dasar di Nias yang dibangun oleh MDF melalui proyek PNPM R2PN. Sampai saat ini proyek tersebut telah menyelesaikan pembangunan 32 sekolah dan 4.300 rumah di Nias.

Foto: Anita Kendrick/Sekretariat MDF

terus terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi pendanaan dan isu-isu strategis lainnya. Seluruh proyek MDF akan ditutup pada bulan Juni 2012, sedangkan program MDF akan berakhir pada bulan Desember 2012.

Meningkatkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Melalui Komunikasi

MDF memainkan peran koordinasi yang penting dalam menyatukan pemain kunci dari berbagai tingkat pemerintah, donor dan masyarakat sipil. Kemitraan yang dibangun di antara para pemangku kepentingan memungkinkan MDF untuk secara efektif menanggapi kebutuhan pemulihan Aceh dan Nias. Selama masa pelaporan keterlibatan pemangku kepentingan MDF ini sebagian besar dimaksudkan untuk membahas kemajuan proyek dan keberlanjutan investasi MDF. Pada pertemuan Komite Pengarah terakhir, disepakati bahwa pendokumentasian pembelajaran yang

diperoleh dan penyebaran praktik terbaik kepada pemangku kepentingan utama akan menjadi bagian dari kegiatan MDF sebelum penutupannya. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak penuh program didokumentasikan dengan baik dan disebarluaskan untuk upaya pemulihan pascabencana di masa mendatang di Indonesia dan di seluruh dunia. MDF menyediakan forum unik untuk berdiskusi tentang kebijakan dan strategi rekonstruksi Aceh dan Nias bersama berbagai pemangku kepentingan.

Berbagai kegiatan penjangkauan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proyek dan meningkatkan kesadaran akan program MDF. Kegiatan ini bervariasi mulai dari pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan LSM, penyebaran informasi melalui publikasi dan materi komunikasi lainnya, serta penyelenggaraan lokakarya atau acara publik lainnya yang sering membangkitkan minat media. Usaha penjangkauan ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan kemajuan, tetapi juga dalam menanggapi dan menanggulangi berbagai isu terkait proyek. Selama periode pelaporan ini, MDF dan proyek-proyeknya telah melakukan lebih dari 250 kegiatan penjangkauan.

Lokakarya mengenai pembelajaran yang diperoleh diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan penutupan beberapa proyek MDF tahun lalu. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), misalnya, mengadakan beberapa kegiatan sehubungan dengan penutupannya pada bulan April 2010. Hal ini mencakup lokakarya satu hari mengenai pembelajaran yang diperoleh selama proyek ini berlangsung, tur media ke lokasi proyek serta upacara penutupan dan serah terima resmi. Lokakarya mengenai pembelajaran yang diperoleh mencakup partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan pelajaran berharga yang didapat serta pengalaman dari pelaksanaan

pendekatan perumahan inovatif berbasis masyarakat. Lokakarya ini menyimpulkan bahwa pendekatan rekonstruksi perumahan berbasis masyarakat melalui sistem pemerintah tetapi dilaksanakan oleh masyarakat, bisa menjadi strategi yang efektif untuk rekonstruksi perumahan pascabencana. Lebih dari 100 peserta menghadiri lokakarya Rekompak, termasuk pemerintah daerah dan pusat (Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB², dan Bappenas), perwakilan donor, LSM setempat, dan wadah pemikir/akademisi setempat. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) serta proyek Dukungan untuk Memperkuat Peran dan Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) juga mengadakan lokakarya penutupan selama tahun 2010 yang mencakup pelajaran yang diperoleh. Program Pengangkutan Laut dan Logistik (SDLP) menyelenggarakan lokakarya mengenai pelajaran yang diperoleh pada bulan November 2010. Banyak lokakarya dan acara penutupan seperti ini direncanakan bersamaan dengan penyelesaian kegiatan proyek.

MDF dan proyek-proyeknya juga memanfaatkan saluran media formal untuk menjangkau pemirsa yang lebih luas dan meningkatkan profil publik. Selain menyelenggarakan kegiatan yang menarik perhatian media, MDF juga secara proaktif terlibat dengan media setempat untuk menyebarluaskan informasi dan mengatasi berbagai masalah yang muncul dari waktu ke waktu dalam ranah publik. Saluran media yang sering digunakan adalah radio dan koran daerah, dengan menggunakan acara perbincangan interaktif dan penempatan artikel. Dalam rangka mendorong liputan positif dari media daerah dan nasional, MDF juga mengadakan acara khusus media seperti kunjungan jurnalis ke lokasi dan pertemuan media. Selama periode pelaporan, MDF dan proyek-proyeknya telah melakukan lebih dari 15 acara perbincangan radio dan menghasilkan lebih dari 50 liputan media yang positif.

2 BNPB: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MDF mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan programnya. Semua proyek yang didanai oleh MDF wajib menetapkan mekanisme penanganan keluhan yang dapat digunakan pemangku kepentingan, terutama penerima manfaat, untuk menyampaikan umpan balik, pertanyaan dan keluhan mengenai sasaran dan pelaksanaan proyek. Mekanisme ini terus dipantau. Hampir semua keluhan dan pertanyaan yang diterima ditangani oleh proyek masing-masing melalui verifikasi langsung dengan masyarakat dan pelapor yang terlibat.

Bencana alam nasional dan global yang baru-baru ini terjadi telah mendorong munculnya kembali minat terhadap MDF. Sebagaimana salah satu Multi Donor Trust Fund yang oleh banyak pihak dianggap paling berhasil dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di dunia, MDF telah menjadi sumber informasi yang berharga

bagi pihak yang melaksanakan program rekonstruksi dan pemulihan pascabencana dalam kondisi lain. Banyak organisasi, termasuk badan pembangunan dan universitas terkemuka, pemerintah negara yang terkena dampak bencana, dan media mencari tahu tentang pembelajaran yang diperoleh dan praktik terbaik dari Sekretariat MDF, Bank Dunia sebagai Wali Amanat, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, serta tim proyek individual. Permintaan seperti ini datang dari berbagai sumber seperti Radio BBC, *The Washington Post*, Pemerintah Haiti, serta berbagai unit dan program di Bank Dunia, misalnya Multi Donor Trust Fund di Pakistan. Oleh karena itu, pembelajaran dari MDF telah memberikan kontribusi terhadap upaya tanggap bencana di dunia maupun untuk situasi rawan lainnya.



"MDF akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah hingga akhir mandatnya."

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kiri) secara resmi menyerahkan laporan akhir Rekompak kepada salah satu dari 14 bupati dan walikota pada upacara penutupan proyek di bulan Mei 2010. Tampak dalam gambar mantan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg (tengah).

Foto: M. Nasir/Sekretariat MDF

Kisah MDF 1

Menyeberangi Jembatan Gido

Menyediakan akses yang aman bagi masyarakat sepanjang tahun

Di Pulau Nias hujan turun rata-rata 268 hari setahun. Hujan deras dan banjir bandang merupakan hal biasa. Jembatan dan alat penyeberangan air lainnya di pulau tersebut sebagian besar terbuat dari bahan alami yang mudah rusak dan rentan hanyut oleh arus bergejolak. Ketika jembatan rusak, tak jarang masyarakat terisolasi untuk sementara waktu atau harus mencari rute alternatif yang sering kali lebih mahal dan memakan waktu lama untuk mencapai jalan akses utama.

Desa Loloana'a, yang terletak di Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, meliputi area seluas 562 hektar di daerah berbukit, dengan 96 rumah tangga dan penduduk berjumlah 521 orang. Budi daya karet merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Gido. Untuk menambah penghasilan mereka, kebanyakan warga juga memproduksi kakao, pisang dan pinang.

Getah karet yang diproduksi di Loloana'a dijual setiap hari Jumat di "pekan" atau pasar mingguan Desa Hiliweto. Getah karet juga biasa dijual ke pengumpul di Desa Lahemo. Akses menuju desa-desa tetangga dan "pekan" sebelumnya adalah melewati jalan tanah dan menyeberangi sungai yang tidak dapat dilalui selama musim hujan. Sejak dibangunnya dua buah infrastruktur penting dengan dukungan Multi Donor Fund untuk Aceh dan Nias - jembatan gantung dan jalan beton terkait - akses menuju pasar, sekolah, dan jasa lainnya telah banyak meningkatkan kualitas hidup penduduk Gido Loloana'a.

Jalur yang terbuat dari beton dibangun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), sedangkan jembatan dibangun melalui proyek Pembangunan Kapasitas untuk Jalan Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal (CBLR3), yang dilaksanakan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang bermitra dengan Program Pembangunan PBB (UNDP). Sinergi kedua proyek MDF ini melipatgandakan manfaat dari masing-masing proyek bagi masyarakat sekitarnya.

Jembatan Gido selesai dibangun pada bulan September 2010 oleh kelompok kerja masyarakat dan kontraktor dengan masukan teknis dari ILO. Konstruksi dimulai tahun 2008. Walter Illi, Pimpinan Tim ILO untuk Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) yang sebelumnya mengerjakan proyek CBLR3, telah bekerja di Nias sejak tahun 2005. Dalam komentarnya mengenai kedua proyek yang dilaksanakan oleh ILO itu, ia berkata, "Masyarakat membutuhkan infrastruktur transportasi yang tahan lama. Penyedia infrastruktur transportasi setempat membutuhkan jasa konsultasi



Beberapa siswa pulang dari sekolah menggunakan jembatan gantung Gido yang dibangun oleh RACBP yang dilaksanakan ILO di Nias. Sebelumnya, selama musim hujan, anak-anak tidak aman untuk menyeberangi sungai. Sekarang, dengan adanya jembatan ini maka anak-anak dari tiga desa yang terisolasi dapat pergi ke sekolah sepanjang tahun.

Foto: Akil Abduljalil/Sekretariat MDF

teknis dalam memilih teknologi yang tepat untuk kondisi Nias. Kami mencoba menjawab kedua tantangan ini dengan mengidentifikasi medan yang sama di mana keahlian khusus diuji dan terbukti sukses.”

Pembangunan jembatan gantung bukanlah konsep baru di Indonesia, termasuk Nias, dan metode konstruksi ini telah digunakan selama berabad-abad. Sebagian besar desain tradisional ini mengandalkan penggunaan kayu berkualitas tinggi. Sedangkan saat ini kayu jati telah menjadi komoditas langka dan demi pelestarian lingkungan, seharusnya tidak lagi digunakan, bahkan untuk daerah yang masih memilikinya.

“Tak peduli hujan atau panas, sekarang saya dapat menyeberangi Sungai Gido! Sekarang anak-anak saya dapat pergi ke sekolah, saya dapat membawa hasil panen saya ke pasar dengan lebih cepat. Pedagang dan pekerja kemanusiaan pun dapat mengunjungi kami secara rutin di desa.”

Sementara itu tidak cukup banyak penelitian mengenai bahan dan metode konstruksi alternatif. Apalagi mengenai standar desain konstruksi yang memperhitungkan bahan pengganti yang digunakan. Akibatnya, banyak jembatan di Nias yang saat ini dianggap tidak aman. Selain itu, berlanjutnya deforestasi mengakibatkan puncak banjir yang lebih tinggi di banyak sungai. Karena tidak ada solusi yang layak untuk mengatasi tantangan ini, tim proyek ILO meminta bantuan dari Helvetas Nepal, sebuah LSM internasional yang telah berhasil membangun jembatan gantung di beberapa negara selama lebih dari 50 tahun.

Jembatan Gido adalah prototipe dari 1.100 meter jembatan yang akan direhabilitasi dan dibangun melalui program Nias-RACBP hingga 2012. Tim ILO akan bekerja sama dengan insinyur dari Nepal untuk membuat desain teknis standar dan spesifikasi yang dapat dengan mudah diadaptasi dan direplikasi dengan kondisi Nias. Melalui pembangunan kapasitas yang diberikan ILO dan teknisi Nepal dari Helvetas, pemerintah daerah dan penyedia infrastruktur akan dapat mengamati dan mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun jembatan dan penyeberangan yang efektif dan tahan lama.

Jalan beton yang dibangun melalui KRRP memberikan akses langsung ke jembatan Gido untuk menuju Desa Akhelawe, Hilitalua, dan Sihare’o Sogaeadu. Terentang lebih dari satu kilometer, jalur jembatan selebar 1,5 meter ini menyediakan akses aman sepanjang tahun bagi pejalan kaki dan sepeda motor ke sekolah, pasar dan jaringan transportasi lain. Warga Lahemo dan Lewa-Lewa juga mendapatkan manfaat dari jalur baru ini karena mereka kini dapat menuju ke kebun karet dengan mudah. Penyelesaian jalur tersebut, yang dibangun dengan biaya Rp 289 juta (AS\$32,000),³ memakan waktu sekitar setahun. Infrastruktur tambahan yang dibangun di bawah proyek ini mencakup dua gorong-gorong dan tembok penahan sepanjang 26 meter. Proyek ini mempekerjakan 56 pekerja (enam di antaranya adalah perempuan), dan selesai 28 Oktober 2010.

Oleh karena warga dapat menyeberangi sungai dan membawa produk mereka ke pasar sepanjang tahun, prospek ekonomi penduduk desa di seberang jembatan Gido mengalami peningkatan, dan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka yang sekarang dapat pergi ke sekolah secara rutin sepanjang tahun. Ibu Refensi Suriana Ndraha, penerima manfaat dan penduduk Desa Loloana’a mengungkapkan:

“Tak peduli hujan atau panas, sekarang saya dapat menyeberangi Sungai Gido! Sekarang anak-anak saya dapat pergi ke sekolah, saya dapat membawa hasil panen saya ke pasar dengan lebih cepat. Pedagang dan pekerja kemanusiaan pun dapat mengunjungi kami secara rutin di desa.”

3 Nilai tukar per tanggal 30 September 2010 adalah AS\$1 = Rp 9.015.



"Hasil yang signifikan telah dicapai dengan mapannya portofolio MDF."

MDF membantu memulihkan jaringan transportasi penting sepanjang Aceh dan Nias melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan nasional, provinsi dan kabupaten. Jalan ini bukan hanya memulihkan jalur yang hancur dilanda bencana tapi juga membantu meletakkan landasan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masa depan.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

Bab 2: Kemajuan dan Kinerja Portofolio

Prestasi luar biasa telah diraih dalam pemulihan dan rekonstruksi di Aceh dan Nias selama enam tahun sejak terjadinya bencana alam yang dahsyat pada Desember 2004 dan Maret 2005. Multi Donor Fund memberikan kontribusi sekitar 10 persen dari keseluruhan dana rekonstruksi, dan telah berhasil menanggapi prioritas dan kebutuhan yang diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara efektif. MDF juga memberikan kontribusi positif untuk menyelaraskan usaha-usaha donor serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekonstruksi.

Rekonstruksi melalui MDF akan terus berlangsung hingga Desember 2012. Bappenas telah mengembangkan Rencana Aksi untuk Kelanjutan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias 2010-2012 yang mengidentifikasi kesenjangan dan menentukan prioritas kebutuhan untuk Aceh dan Nias. Jangka waktu dalam Rencana Aksi ini bertepatan dengan tahun-tahun yang tersisa dari mandat MDF untuk memberikan kontribusi bagi pemulihan Aceh dan Nias sampai dengan Desember 2012. Pembangunan ekonomi merupakan prioritas karena pemerintah menganggap pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi sebagai hal penting untuk mempertahankan hasil dari rekonstruksi dan perdamaian di Aceh.

Ikhtisar Portofolio MDF

Portofolio MDF terdiri dari 23 proyek yang terbagi atas enam bidang hasil. Dana MDF dialokasikan untuk proyek dalam bidang pemulihan masyarakat,

rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur besar dan transportasi, penguatan tata kelola, pelestarian lingkungan, peningkatan proses pemulihan secara keseluruhan, serta pembangunan ekonomi dan mata pencaharian.

Berdasarkan petunjuk Komite Pengarah, MDF menerapkan strategi bertahap dalam mendukung rekonstruksi. Tahap pertama memenuhi kebutuhan mendesak atas pemulihan masyarakat dan rehabilitasi jaringan transportasi. Hal ini diikuti dengan fokus pada infrastruktur besar, pengurangan dampak rekonstruksi terhadap lingkungan, dan pembangunan kapasitas. Tahap terakhir berfokus pada pembangunan ekonomi dan kelanjutan penguatan kapasitas setempat. Serangkaian proyek terakhir ini meliputi Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF), Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) dan Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP).

MDF kini telah mengalokasikan seluruh sumber daya keuangannya. Proyek baru terakhir dalam portofolio MDF, LEDP Nias, disahkan oleh Komite Pengarah pada bulan Mei 2010. Pembiayaan tambahan juga didukung untuk tiga proyek lainnya sepanjang tahun lalu—Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF), RACBP Nias (untuk memperluas cakupan kecamatan tambahan), dan bantuan teknis bagi BRR dan Bappenas untuk meningkatkan koordinasi Rencana Aksi 2010-2012 sampai akhir mandat MDF.

Portofolio MDF berkinerja baik dan proyek berjalan sesuai rencana untuk memenuhi target pada saat penutupan. Portofolio gelombang pertama dan kedua saat ini telah memasuki tahap akhir atau bahkan telah ditutup. Sebanyak delapan proyek telah ditutup, 12 proyek telah memasuki tahap pelaksanaan penuh dan tiga proyek berada dalam tahap awal pelaksanaan. Beberapa proyek memperpanjang

tanggal penutupannya dalam rangka memenuhi tujuan mereka. Seluruh proyek ini akan ditutup pada tanggal 30 Juni 2012, sedangkan penutupan program secara keseluruhan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2012.

Hasil signifikan dicapai bersamaan dengan jatuh temponya portofolio. MDF menyediakan forum untuk melakukan dialog mengenai kebijakan rekonstruksi Aceh dan menghimpun banyak pemangku kepentingan. Pendekatan perumahan berbasis masyarakat adalah model rekonstruksi pascabencana, dan investasi infrastruktur telah merevitalisasi kegiatan ekonomi dan akses di seluruh Aceh dan Nias. Bidang lingkungan memberikan hasil positif, dan potensi dampak negatif yang besar pada lingkungan dari proses rekonstruksi telah berhasil dihindari. Selain itu, MDF memberikan kontribusi pada penguatan lembaga daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pemulihan Masyarakat

Kelompok pertama proyek yang disahkan oleh MDF adalah untuk mendukung pemulihan masyarakat melalui mekanisme yang telah ada dan pendekatan proyek pembangunan berbasis masyarakat (CDD). Dengan memanfaatkan program dan pendekatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), kelompok yang terdiri dari lima proyek ini meningkatkan program yang ada di Aceh dan Nias (PPK dan P2KP), atau mengadaptasi model CDD untuk memenuhi kebutuhan rekonstruksi khusus, seperti perumahan (Rekompak dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias - PNPM R2PN) atau sertifikasi tanah (Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh - RALAS).

Proyek Pemulihan Masyarakat MDF telah mencapai hasil yang mengesankan dalam membangun kembali rumah dan infrastruktur di tingkat masyarakat. Proyek-proyek ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terkena dampak dapat berada di depan dalam pengambilan keputusan untuk proses pemulihan mereka sendiri bahkan dalam keadaan paling berat sekalipun. Target perumahan telah tercapai di Aceh pada tahun 2010 dan hampir tercapai di Nias. Lebih dari 15.000 rumah telah direkonstruksi atau direhabilitasi di Aceh dengan tingkat hunian sebesar 97%, sedangkan 4.500 rumah lainnya telah selesai dibangun atau dalam proses pembangunan di Nias.

Proyek PPK, P2KP, Rekompak dan PNPM R2PN juga telah memberikan hasil yang mengesankan dalam rekonstruksi infrastruktur masyarakat. Proyek-proyek ini telah membantu masyarakat dalam membangun 2.623 kilometer jalan desa, 7,51 kilometer jembatan, dan 1.549 kilometer saluran irigasi dan drainase. Selain itu, 483 sekolah dan 395 kantor pemerintah daerah



Masyarakat melaksanakan sendiri rekonstruksi perumahannya melalui program Rekompak di desa-desa di seluruh Aceh. Foto ini menunjukkan perumahan yang dibangun di Desa Lambung, Banda Aceh.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

atau balai desa/kota telah dibangun atau direhabilitasi. Peningkatan air bersih dan sanitasi mencakup hampir 6.000 sumur atau sumber air bersih lain serta 1.195 unit sanitasi. Tingkat kepuasan penerima manfaat atas proyek-proyek tersebut umumnya tinggi, yang menunjukkan pentingnya kepemilikan dan pemberdayaan bagi pemulihan masyarakat.

RALAS telah memberi kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi melalui pembagian lebih dari 220.000 sertifikat tanah. Dari jumlah tersebut, 63.000 diterbitkan atas nama perempuan atau sebagai sertifikat bersama. Meskipun sejumlah masalah pengelolaan dan pelaksanaan menghambat pencapaian target RALAS sepenuhnya, proyek ini tetap memberikan kontribusi untuk pemulihan hak atas tanah dan pembangunan kembali sistem administrasi tanah di Aceh. Pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam adjudikasi berbasis masyarakat diberikan kepada lebih dari 700 staf pemerintah dan akan terus memiliki dampak dalam hal penyampaian layanan sertifikasi tanah pemerintah. Mungkin hal yang paling penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat serta pemahaman tentang prosedur kepemilikan tanah dan hak kepemilikan perempuan yang akan berdampak pada layanan ini di masa depan, serta permintaan penyampaian layanan tersebut secara transparan.

Proyek pemulihan masyarakat MDF juga terus memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat di Aceh dan Nias. Proses dalam masyarakat telah terbentuk, dan tingkat partisipasi yang tinggi, termasuk besarnya partisipasi perempuan, telah menimbulkan rasa kepemilikan yang kuat atas infrastruktur yang dibangun dan memberikan harapan atas peran anggota masyarakat yang lebih besar dalam perencanaan pembangunan. Hasil yang dimulai pada tingkat masyarakat di seluruh Aceh dan Nias melalui proyek-proyek ini kemungkinan akan berlanjut bersamaan dengan penggabungan proyek PPK dan P2KP dukungan

MDF di bawah program PNPM pemerintah⁴. Selain itu, di Aceh PNPM dilengkapi dengan program BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong) tingkat provinsi. Program-program ini akan melanjutkan perencanaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur PPK dan P2KP di semua gampong atau desa di Aceh. Proyek-proyek PPK dan PNPM R2PN di Nias juga akan digabung dengan program nasional PNPM Pedesaan.

Dimensi gender tertanam kuat dalam proyek pemulihan masyarakat MDF. Setiap proyek memasukkan pemberdayaan perempuan ke dalam desain proyek untuk memastikan bahwa perempuan berperan dalam proses pengambilan keputusan masyarakat. Proyek-proyek ini memelopori peningkatan usaha pemberdayaan perempuan bukan hanya sekadar meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan perencanaan masyarakat tetapi juga menemukan cara untuk memastikan agar suara mereka didengar. P2KP mengembangkan komponen untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan menyisihkan dana khusus untuk kegiatan mereka. PPK maupun P2KP juga mendukung pemberdayaan perempuan melalui penyediaan kesempatan pembiayaan mikro bagi perempuan. RALAS juga turut memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran perempuan mengenai hak atas tanah dan mendukung sertifikasi tanah bersama. Hampir 30 persen sertifikat tanah yang dikeluarkan dalam proyek ini adalah sertifikat bersama atau atas nama perempuan. Pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman ini dimasukkan ke program PNPM yang sedang berlangsung di Aceh dan Nias dan seluruh Indonesia.

Keberhasilan proyek pemulihan masyarakat MDF menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat bisa sukses dalam situasi pascabencana

4 PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

dan pembelajaran ini telah digunakan dalam konteks pascabencana lainnya. Proyek perumahan Aceh (Rekompak) telah menjadi model bagi program rekonstruksi perumahan Pemerintah Indonesia di Jawa setelah terjadinya gempa bumi tahun 2006. Lebih dari 200.000 rumah dibangun dengan menggunakan pendekatan ini. Model ini telah disesuaikan lebih lanjut di Sumatera Barat setelah terjadinya gempa bumi 2009. Pemerintah pusat menggunakan pendekatan berbasis masyarakat sebagai bagian dari strategi keseluruhan untuk rekonstruksi perumahan pascabencana. Selain itu, delegasi dari Haiti baru-baru ini mengunjungi Aceh dan Jawa untuk mempelajari proyek-proyek rekonstruksi pascabencana CDD, dan mendapatkan pelajaran yang mengesankan untuk replikasi. PPK maupun Rekompak melakukan lokakarya pada penutupan proyek untuk membahas pembelajaran yang diperoleh, baik untuk kegiatan masa depan di Aceh dan bagian lain di Indonesia maupun skenario pascabencana lain di seluruh dunia.

Kegiatan MDF di daerah pemulihan masyarakat hampir berakhir. Tiga proyek telah menyelesaikan tujuannya dalam mendukung pemulihan masyarakat dan telah ditutup tahun lalu (PPK, P2KP, Rekompak). Proyek sertifikasi tanah (RALAS) ditutup pada bulan Juni 2009, setelah memperkuat kapasitas kelembagaan mengenai adjudikasi tanah. Pelaksanaan proyek perumahan Nias, PNPM R2PN, terus berlangsung dan kegiatan itu akan selesai pada bulan Juni 2011.

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Infrastruktur Besar dan Transportasi

Bersama dengan Pemerintah Indonesia, MDF merupakan penyumbang utama bagi rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur besar di Aceh dan Nias. Sesuai dengan prioritas Rencana Aksi 2010-2012 Pemerintah

Indonesia dan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (untuk Nias), MDF memberikan investasi yang besar dalam rekonstruksi infrastruktur dan rehabilitasi di Aceh dan Nias. Sekitar 35 persen dana MDF telah dialokasikan untuk sektor ini. Selain itu, banyak kontribusi lainnya yang juga telah diberikan untuk infrastruktur di tingkat masyarakat melalui program pemulihan masyarakat MDF.

MDF menggunakan pendekatan multiaspek untuk pemulihan infrastruktur dan transportasi setelah tsunami. Dukungan awal untuk rekonstruksi mencakup dukungan logistik untuk pengangkutan bahan rekonstruksi ke daerah yang terkena dampak. SDLP memberikan layanan pengiriman dari tahun 2005 sampai 2007. Hal ini dilakukan agar lembaga rekonstruksi dapat mengirimkan muatan penting, seperti bahan dan alat-alat konstruksi, untuk kemajuan pemulihan dan rekonstruksi di pantai barat Aceh dan tempat pendaratan terpencil di Nias dan Simeulue. Setelah tahap pemulihan awal, dana MDF dialokasikan ke berbagai proyek untuk rekonstruksi infrastruktur besar, termasuk pelabuhan, jalan nasional, provinsi dan kabupaten, sistem pasokan dan pengolahan air, sistem drainase, tempat pembuangan akhir saniter serta infrastruktur pada tingkat masyarakat. Pembangunan kapasitas dan perhatian terhadap kebutuhan kelompok marginal merupakan elemen kuat yang terdapat dalam semua proyek rekonstruksi.

Tiga proyek infrastruktur MDF telah memberikan hasil berkualitas yang efektif dan memenuhi tujuannya. Dengan adanya Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang, koridor pantai barat utama tetap dapat berfungsi dalam dua tahun pertama setelah tsunami. Proyek ini ditutup Desember 2007 setelah donor lain mengambil alih rekonstruksi jalan koridor pantai barat. Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP) telah selesai dan melindungi kawasan bisnis di ibu

Proyek Infrastruktur Besar dan Transportasi

| Proyek | Alokasi Dana (AS\$ juta) |
|---|--------------------------|
| Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh (BAFMP) | 6,50 |
| Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) | 42,00 |
| Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) | 136,70 |
| Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang | 1,46 |
| Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) | 25,03 |
| Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) | 3,78 |
| Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas di Nias (RACBP) | 11,80 |
| Total | 227,27 |



Untuk memastikan berfungsi sistem drainase di Banda Aceh, diperkenalkanlah “program pengelolaan sampah” di bawah proyek BAFMP. Program percontohan itu dengan cepat ditingkatkan oleh pemerintah kota karena keberhasilan awalnya. Komitmen kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan proyek yang telah selesai dilaksanakan dan ditutup pada akhir 2009.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

kota Aceh dari banjir. Sistem drainase di kawasan ini direhabilitasi melalui pembangunan tiga stasiun pompa, pemasangan katup banjir dan perbaikan saluran drainase. Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) membantu memulihkan jaringan transportasi penting setelah terjadinya tsunami dan gempa bumi dengan menyediakan desain fisik dan dukungan teknis untuk rekonstruksi pelabuhan utama dan satu pelabuhan sungai. Pembangunan kembali pelabuhan ini memastikan bahwa peralatan dan bahan bisa dikirim ke daerah terpencil untuk membangun kembali masyarakat dan mata pencaharian selama tahap awal rekonstruksi. Dampak proyek-proyek ini diperluas ke semua pihak yang terlibat dalam rekonstruksi dan rehabilitasi, termasuk Pemerintah Indonesia, LSM, organisasi masyarakat sipil, serta donor multilateral dan bilateral, dengan menyediakan akses ke daerah yang terkena imbas bencana.

Tiga proyek infrastruktur besar yang masih aktif (IREP, SDLP dan IRFF) berjalan lancar dan diharapkan dapat memenuhi target pada tanggal penutupannya. Melalui dua proyek rekonstruksi infrastruktur besar yaitu IREP (Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur) dan IRFF (Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur), sekitar 500 kilometer jalan nasional dan provinsi, 87 kilometer jalan kabupaten, lima pelabuhan dan sebelas sistem pasokan air telah selesai dibangun. Kedua proyek ini bekerja sama secara erat untuk mendukung desain, keuangan dan pelaksanaan lebih dari 52 subproyek infrastruktur terpisah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Lima puluh subproyek telah selesai. Proyek SDLP (Program Angkutan dan Logistik Laut) saat ini berfokus pada kesinambungan jangka panjang pelabuhan melalui pelatihan staf pelabuhan dari semua tingkatan di 18 pelabuhan di seluruh Aceh dan Nias sehingga fasilitas dan aset ini dapat beroperasi dengan efisien di masa yang akan datang.

Investasi strategis akhir dari MDF dalam infrastruktur berskala besar telah disetujui oleh Komite Pengarah. Pada bulan April 2010, telah disetujui dana tambahan sebesar AS\$37 juta untuk proyek IRFF yang membangun jalan nasional strategis sepanjang 50 kilometer dari Calang ke Meulaboh di pantai barat Aceh, termasuk jembatan Kuala Bubon. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat penghidupan dan akses terhadap layanan dasar bagi lebih dari 900.000 penduduk. Melalui dana tambahan ini, total dana MDF yang dialokasikan



Seorang siswa mengunjungi Museum Pusaka Nias di Gunung Sitoli, Nias dalam widyawisata yang didukung PNPM R2PN. Proyek ini mendorong pelestarian warisan budaya unik di Nias melalui pelatihan untuk guru dan siswa.

Foto: Koleksi PNPM R2PN

untuk IRFF saat ini telah mencapai AS\$137 juta, yang menjadikannya proyek tunggal terbesar dalam portofolio MDF. Bersama dengan pendanaan bersama Pemerintah Indonesia, total dana yang diinvestasikan dalam rekonstruksi infrastruktur besar melalui IRFF mencapai sekitar AS\$245 juta.

MDF memainkan peran utama dalam menciptakan jaringan infrastruktur di seluruh Aceh dan Nias. Pelabuhan ekspor telah dibangun di Lhokseumawe dan Kuala Langsa di Aceh, yang menjadi pintu gerbang ke pasar internasional. Di Gunung Sitoli, Nias, dan Sinabang, Simeulue, pelabuhan domestik telah direkonstruksi. Jalan-jalan besar nasional, provinsi dan kabupaten yang dibangun melalui IRFF, jalan proyek ILO di Aceh dan Nias (CBLR₃, RACBP) dan proyek pemulihan masyarakat MDF berkontribusi dalam jaringan transportasi yang membuka daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, penggunaan tenaga kerja setempat menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kapasitas pemerintah daerah telah ditingkatkan dalam operasi dan pengelolaan jaringan infrastruktur lokal.

Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas

Pembangunan lembaga pascabencana melalui tata kelola yang baik dan penguatan kapasitas merupakan salah satu pilar utama MDF sejak awal. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dibangun dalam hampir semua proyek MDF selama pelaksanaan proyek dan juga untuk memastikan kesinambungan investasi setelah rekonstruksi berakhir. Ini merupakan tujuan utama ketiga proyek dalam portofolio yang menargetkan masyarakat sipil, pemerintah kabupaten (Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus - P2DTK), serta Kementerian Pekerjaan

Umum dan kontraktor jalan lokal (CBLR₃). Tiga proyek lain (Program Transformasi Pemerintah Aceh - AGTP, Program Transisi Kepulauan Nias - NITP, dan Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas) memberikan kontribusi secara langsung bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pemulihan.

MDF memberikan dukungan seluas-luasnya atas upaya rekonstruksi untuk membangun jaringan masyarakat sipil di Aceh dan Nias melalui Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO) yang ditutup pada tanggal 30 Mei 2010. Dengan adanya lebih dari 100 fasilitator dari LSM setempat dan organisasi masyarakat sipil yang terdaftar dan dilatih melalui proyek, sekarang tersedia daftar untuk penyebaran tanggapan cepat. Proyek CSO menyediakan 142 hibah kecil bagi organisasi masyarakat kecil (CSO) dan organisasi berbasis masyarakat (CBO) di Aceh dan Nias untuk 75 proyek mata pencaharian, 34 prakarsa pemberdayaan perempuan, dan 33 proyek peningkatan layanan sosial dasar yang menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat, yang sekitar 44 persen di antaranya adalah perempuan.

Proyek CSO memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat (CBM) atas upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Pendekatan ini membangun kepercayaan bersama dan saling menghormati antara pemerintah daerah dan CSO/CBO, yang menghasilkan koordinasi dan kerja sama yang lebih baik dalam perencanaan masyarakat. Proyek ini memberikan perhatian khusus agar gender dimasukkan ke dalam kebijakan, proses dan praktik CSO. Secara keseluruhan, kegiatan yang terkait dengan kepentingan perempuan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat serta menyediakan modal finansial dan sosial yang diperlukan agar mereka dapat mengembangkan potensi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan mata pencaharian.

Proyek Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas

| Proyek | Alokasi Dana (AS\$ juta) |
|--|---------------------------------|
| Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan (CBLR3) | 11,80 |
| Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) | 25,60 |
| Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO) | 5,99 |
| Total | 43,39 |



Proyek Dukungan untuk Memperkuat CSO memberikan hibah kecil untuk membangun kapasitas organisasi berbasis masyarakat (CBO) sekaligus mendukung kegiatan mata pencaharian yang diprakarsai oleh masyarakat, seperti kelompok perempuan di Desa Gapong Pande, Banda Aceh ini.

Foto: Koleksi Muslim Aid untuk Proyek CSO

Proyek CBLR₃ (yang juga disebut proyek jalan lokal ILO) bekerja sama dengan Bappeda untuk membangun kapasitas di tingkat kabupaten dan masyarakat dalam menggunakan sumber daya lokal untuk pembangunan jalan daerah di Aceh dan Nias. Proyek ini telah menyelesaikan pembangunan 140 kilometer jalan dan melakukan pekerjaan pemeliharaan pada 230 kilometer jalan lokal (kabupaten dan kecamatan) dengan menggunakan pendekatan ini. Proyek ini dilaksanakan oleh ILO di bawah administrasi dan pengawasan UNDP secara keseluruhan. RACBP Nias membangun kapasitas untuk menerapkan pendekatan berbasis sumber daya lokal ini bagi pembangunan jalan di Nias. Proyek ini menggunakan desain dan keahlian teknis dari Nepal untuk jembatan gantung yang cocok untuk penyeberangan sungai di daerah perbukitan Nias.

CBLR₃ mencatat banyak keberhasilan dalam mengintegrasikan pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk rekonstruksi dan pemeliharaan jalan kabupaten. Proyek ini melatih kontraktor setempat serta staf dan penyelia dari Dinas Pekerjaan Umum dalam penerapan pendekatan berbasis sumber daya lokal untuk pembuatan jalan dan pekerjaan sipil. Ketika konstruksi hampir selesai, proyek ini mengalihkan fokusnya agar terbentuk lingkungan yang kondusif untuk mempertahankan pendekatan berbasis sumber daya bagi pembuatan jalan di Aceh, dengan perpanjangan sampai Juni 2011. Pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan melalui pelaksanaan CBLR₃ mendukung kelancaran dimulainya RACBP.

Proyek P₂DTK di Aceh dan Nias adalah bagian dari strategi nasional pemerintah untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten untuk memasukkan perencanaan dari bawah ke atas serta kebutuhan analisis ke dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten. Pendekatan P₂DTK memberikan kontribusi bagi upaya pemerintah untuk mengembangkan daerah pedesaan yang miskin dan tertinggal untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan peningkatan

layanan bagi warga negaranya. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya karena berbagai tantangan, proyek tersebut terus menunjukkan hasil yang signifikan dalam pembangunan kapasitas. Proyek ini melatih 75 pejabat peradilan dan 50 staf LSM dalam pemberian pelayanan dan pendidikan hukum. Lebih dari 800 pelatih, fasilitator dan kepala desa juga telah dilatih dalam hal resolusi konflik.

Hampir 12.000 guru telah menerima pelatihan melalui proyek. Program ini dimasukkan ke dalam program nasional PNPM Pedesaan, yang menunjukkan keselarasan MDF dengan strategi pembangunan nasional Pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, P₂DTK juga mendukung pembangunan atau rehabilitasi 196 kilometer jalan, enam kilometer jembatan, 18 kilometer saluran drainase atau irigasi, 373 saluran air, 50 sekolah desa dan 14 puskesmas.

MDF mendorong kesetaraan gender dalam semua proyeknya. Proyek CSO, P₂KP, PPK, RALAS, PNPM R₂PN, CBLR₃, dan P₂DTK telah memelopori pendekatan inklusif gender yang turut memberikan pembelajaran bagi program nasional PNPM serta bagi proyek dan konteks lain. Proyek MDF, sesuai kebutuhan, mengumpulkan data disagregat gender dalam pemantauan dan evaluasi pengaturan untuk melihat apakah pelaksanaan proyek peka terhadap aspek gender. NITP menyelenggarakan lokakarya tentang gender pada bulan Agustus 2010 sebagai upaya awal untuk memasukkan gender dalam proses pembangunan di Nias. Semua unit kerja pemerintah daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) menghadiri lokakarya, dan hampir separuh pesertanya adalah perempuan. Kelompok kerja gender dibentuk selama lokakarya dan akan bekerja dengan semua SKPD untuk memasukkan isu gender dalam proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan departemen pemerintah.

Peningkatan Proses Pemulihan

MDF memainkan peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemulihan dan rekonstruksi secara keseluruhan. MDF memberikan bantuan teknis dan dukungan operasional bagi BRR dalam perannya sebagai koordinator keseluruhan program rekonstruksi senilai hampir AS\$7 miliar agar dapat memenuhi mandatnya secara transparan dan tepat waktu. Hal ini mencakup dukungan untuk pengembangan kebijakan, kerangka hukum, proyek dan program, serta alat dan sistem pemantauan untuk proses rekonstruksi dan pemulihan mulai dari Juli 2005 sampai penutupan BRR pada tahun 2009.

Dukungan MDF untuk koordinasi rekonstruksi terus berlanjut setelah penutupan BRR. MDF dirancang sebagai instrumen untuk mengisi kesenjangan dalam penanganan prioritas nasional di bawah pimpinan pemerintah dan pelaksanaannya terutama dilakukan melalui lembaga dan sistem pemerintah. Tiga proyek yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekonstruksi dan pemulihan secara keseluruhan melalui dukungan bagi pemerintah tingkat nasional dan provinsi telah dilaksanakan secara penuh.

Proyek Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas terus mendukung koordinasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pemerintah setelah penutupan BRR. Bantuan teknis untuk BRR awalnya dirancang untuk memberikan dukungan bagi BRR dalam memenuhi kebutuhan teknis dan operasionalnya dari Juli 2005 hingga April 2009. Tahap ketiga dari proyek ini, yang fokusnya beralih ke aspek keberlanjutan dan penyelesaian agenda rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, telah disetujui oleh Komite Pengarah MDF pada bulan Februari 2010. Koordinasi kegiatan ini dipimpin Bappenas pada tingkat pusat dan Bappeda pada tingkat provinsi.

AGTP dan NITP memberikan dukungan pada tingkat provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan pemulihan yang efisien dan efektif di Aceh dan Nias. Bersama dengan proyek Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas, AGTP dan NITP bekerja sama dengan semua tingkat pemerintah dan kementerian untuk membuka jalan menuju penyelesaian pengalihan aset rehabilitasi dan rekonstruksi. AGTP dan NITP membangun kesadaran dan pengetahuan lebih lanjut tentang operasi perencanaan dan penganggaran serta dana pemeliharaan untuk rekonstruksi aset untuk menjamin manfaat jangka panjang dari investasi MDF.

MDF juga meningkatkan proses pemulihan melalui dukungan bagi pengurangan risiko bencana (PRB) dan kesiapan melalui proyek DRR-A. DRR-A adalah salah satu dari dua proyek MDF yang berfokus pada isu-isu PRB. NITP juga menggabungkan komponen PRB dalam penguatan kapasitas kerjanya di Nias. DRR-A dirancang untuk melembagakan PRB dalam proses pembangunan jangka panjang di tingkat daerah. Proyek ini memberi kontribusi yang unik dan penting terhadap kesiapan untuk kemungkinan bencana masa depan di Aceh dengan bekerja di semua tingkatan, mulai dari masyarakat sampai tingkat provinsi, dalam PRB. DRR-A mencurahkan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun kapasitas dan kesinambungan melalui dukungan terhadap lembaga lokal, Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas Syiah Kuala. Proyek ini juga berperan penting dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Proyek ini secara keseluruhan telah membentuk berbagai kemitraan dengan pemerintah, media, LSM, dan akademisi serta mendorong kepemilikan atas agenda PRB di semua SKPD.

Proyek Peningkatan Proses Pemulihan

| Proyek | Alokasi Dana (AS\$ juta) |
|---|---------------------------------|
| Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas | 24,48 |
| Pengurangan Risiko Bencana Aceh (DRR-A) | 9,87 |
| Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) | 13,98 |
| Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) | 3,89 |
| Total | 52,22 |



Warga bergerak cepat sepanjang jalur penyelamatan pada saat latihan simulasi tsunami di Desa Ulee Lheue, Kecamatan Meuraksa, Banda Aceh.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

Melestarikan Lingkungan

Sejak awal MDF berkomitmen untuk memastikan kelestarian lingkungan selama proses rekonstruksi berjalan. Kelestarian lingkungan adalah tema lintas sektor untuk proyek-proyek dalam portofolio MDF, dan merupakan fokus utama dari dua proyek tertentu. AFEP dibentuk secara khusus untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif rekonstruksi terhadap ekosistem hutan yang penting di Aceh. TRWMP pada awalnya dirancang untuk membantu pembersihan setelah terjadi tsunami dan memberi kontribusi penting terhadap kelestarian lingkungan jangka panjang untuk Aceh dan Nias melalui penciptaan sistem pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan.

TRWMP saat ini telah memasuki tahap ketiga dan berfokus pada kegiatan pembangunan kapasitas untuk memastikan adanya infrastruktur dan layanan pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan setelah proyek ditutup. Proyek ini mempersiapkan pembangunan satu tempat pembuangan akhir permanen regional dan delapan tempat pembuangan akhir kabupaten, termasuk satu di Nias. Selain infrastruktur fisik, proyek ini juga berfokus pada pembangunan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola sistem pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan, termasuk pengenalan layanan berbayar sehingga sistem ini dapat berlanjut setelah proyek berakhir. TRWMP terus mendukung kegiatan mata pencaharian terkait pengelolaan limbah, seperti daur ulang, pembersihan sedimen tsunami dari lahan pertanian untuk membantu petani melanjutkan mata pencaharian mereka sebelum terjadi tsunami. Kegiatan percontohan mendorong mata pencaharian yang berkesinambungan dan meningkatkan kesadaran di antara masyarakat tentang kebutuhan dan manfaat pengelolaan limbah padat, sekaligus mengalihkan plastik dan bahan daur ulang lain dari tempat pembuangan sampah kabupaten.

AFEP menggunakan pendekatan multiguna untuk membangun kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mengelola daya hutan Aceh secara berkelanjutan. Proyek ini telah banyak menunjukkan hasil yang positif di bidang pemantauan pembalakan liar dan dukungan penegakan hukum, pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar, pemetaan sumber daya hutan, pengembangan rencana pengelolaan hutan setempat, dan peningkatan kesadaran publik. Proyek ini mendukung agenda *Aceh Green* Pemerintah Aceh serta kerangka kerja tata kelola hutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan meningkatkan perlindungan hutan dengan penekanan pada pembangunan kapasitas bagi badan pengelola hutan dan taman pemerintah. Program jagawana masyarakat (*Community Rangers*) di ekosistem Ulu Masen telah berhasil merekrut mantan pembalak dan pemburu liar serta mantan kombatan dan menyediakan lapangan kerja alternatif untuk memantau hutan sebagai pengganti kegiatan ilegal. AFEP saat ini telah memasuki tahun terakhir pelaksanaannya dan berfokus pada penguatan kegiatan inti, misalnya pemantauan hutan, pengelolaan hutan, dan kegiatan kesadaran lingkungan untuk memastikan bahwa dampak akan terus dirasakan setelah proyek berakhir.



Abdullah, 50, bekerja di bengkel kayu dekat TPD di Banda Aceh. TRWMP merupakan tanggapan atas kekhawatiran mengenai kesehatan masyarakat dan dampak puing-puing akibat tsunami dan gempa bumi terhadap lingkungan, serta sampah kota.

Foto: Abbie Trayler-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

Proyek Pelestarian Lingkungan

| Proyek | Alokasi Dana (AS\$ juta) |
|--|--------------------------|
| Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP) | 17,53 |
| Program Pengelolaan Limbah Tsunami (TRWMP) | 39,40 |
| Total | 56,93 |



Anak-anak sekolah mengambil bagian dalam kegiatan pembangunan kesadaran lingkungan yang diselenggarakan oleh layanan jagawana di Ekosistem Ulu Masen. Pelajaran yang diselenggarakan oleh FFI di bawah program AFEP ini merupakan bagian program penjangkauan dan pembangunan kapasitas baru yang mendidik anak-anak mengenai manfaat yang dapat diberikan oleh hutan, serta menghindari munculnya pembalok liar baru.

Foto: Abbie Trayler-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian

MDF memasuki tahap akhir pemulihan pascatsunami dan gempa bumi melalui dukungan aktif bagi pembangunan ekonomi dan pemulihan mata pencaharian. Strategi pendekatan bertahap MDF mengikuti prioritas pemerintah dalam mengisi kesenjangan dalam pemulihan masyarakat dan infrastruktur terlebih dahulu, diikuti dengan kegiatan pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang dirancang untuk tahap berikutnya dalam proses rekonstruksi. Sekarang, setelah sebagian besar rekonstruksi fisik telah usai, pembangunan ekonomi dan mata pencaharian menjadi perhatian utama pemerintah Aceh dan Sumatera Utara. Dua proyek MDF yang kini berada dalam tahap pelaksanaan awal, EDFF dan LEDP, akan secara langsung mengatasi peningkatan dalam mata pencaharian dan pengembangan ekonomi.

Proyek EDFF untuk pertama kalinya menerapkan mekanisme yang unik untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah di Aceh. Model baru yang diciptakan dalam melaksanakan proyek ini melibatkan LSM internasional dan LSM setempat dalam kemitraan yang erat dengan pemerintah provinsi. Proyek senilai AS\$ 50 juta ini akan mendanai delapan subproyek yang dipilih melalui proses transparan untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor-sektor ekonomi utama Aceh, yaitu pertanian dan perikanan, termasuk tanaman ekspor penting seperti kopi dan kakao. Walaupun operasi pengaturan kelembagaan baru untuk proyek ini pada awalnya mengalami sedikit penundaan, namun saat ini seluruh subproyek sekarang telah berjalan. Subproyek tersebut sedang dilaksanakan di hampir semua kabupaten di Aceh, termasuk kegiatan yang meliputi, antara lain, penyediaan alat dan komponen pertanian, pengembangan koperasi, peningkatan kualitas, peningkatan akses ke pasar, akses ke keuangan, dan pemberdayaan perempuan.

LEDP Nias, yang juga berada dalam tahap pelaksanaan awal, bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian dan mendukung pembangunan ekonomi di Nias. Proyek ini akan menyediakan bantuan teknis dan masukan bagi kelompok perempuan maupun kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan mata pencaharian pedesaan yang berfokus pada padi dan komoditas lain yang memiliki nilai jual tinggi, yaitu kakao dan karet. LEDP akan bekerja sama dengan proyek lain di Nias, yaitu RACBP yang dilaksanakan oleh ILO dalam menyediakan peningkatan akses di daerah pedesaan. Kedua proyek ini akan bekerja di bidang ekonomi yang sama, mendukung peningkatan pertanian melalui peningkatan akses ke pasar dan layanan, sehingga mendorong adanya kesempatan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi yang lebih baik di Nias.

Sebenarnya sejak awal, MDF telah mendukung pemulihan mata pencaharian melalui proyek-proyek lain dibawah portofolionya. MDF menghasilkan lebih dari 17,6 juta hari kerja melalui proyek PPK, P2KP, Rekompak, PNPM R2PN, CBLR3, RACBP, dan TRWMP, yang memberikan bantuan dana yang diperlukan bagi keluarga yang terkena dampak selama pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, terdapat tiga proyek pembiayaan mikro bagi rumah tangga yang terkena dampak melalui proyek CSO, PPK dan P2KP, serta usaha kecil terkait dengan pengelolaan sampah dan daur ulang yang didukung oleh TRWMP. AFEP mendukung agrokehutanan dan sejumlah mata pencaharian alternatif tertentu bagi masyarakat yang tinggal di tepi hutan lindung. Program ini juga menciptakan lapangan kerja langsung bagi anggota masyarakat melalui program jagawana masyarakat. Lingkungan bisnis di Aceh telah ditingkatkan melalui komponen P2DTK yang memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dalam mengeluarkan izin usaha. EDFF dan LEDP Nias sekarang berfokus langsung pada pemulihan mata pencaharian dengan meletakkan landasan bagi

Proyek Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian

| Proyek | Alokasi Dana (AS\$ juta) |
|--|---------------------------------|
| Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) | 50,00 |
| Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) | 8,20 |
| Total | 58,20 |



Seorang petani memetik buah kakao yang sudah matang di kebunnya di Desa Tunong, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie Jaya. Proyek LEDP Nias dan EDFF Aceh berupaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produksi serta pemasaran kakao dan tanaman ekspor lain.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka panjang di sektor produktif utama di Aceh dan Nias.

Tantangan

MDF beroperasi dalam konteks kompleks yang membuat rekonstruksi sangat menantang. Aceh memberikan tantangan tersendiri dalam hal situasi pemulihan pascabencana di lingkungan pascakonflik sehingga memerlukan pendekatan rekonstruksi yang peka terhadap konteks ini. Selain itu, kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil masih rendah akibat dari konflik bertahun-tahun. Layanan transportasi, infrastruktur, ekonomi dan sosial juga sangat terpengaruh. Hal lain dalam konteks ini adalah korban jiwa, moral dan kapasitas secara ekstrem di banyak masyarakat yang hancur oleh gempa bumi dan tsunami.

Lingkungan yang sulit merupakan tantangan bagi pelaksanaan proyek di Nias. Keterpencilan yang ekstrim dan jaringan transportasi yang buruk, musim hujan yang panjang, kurangnya akses untuk mendapatkan bahan berkualitas, dan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan staf lapangan yang berkualitas turut membuat sebagian besar proyek di sana tertunda. Selain itu, terdapat berbagai tantangan tersendiri di Nias bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lanjutan serta keberlanjutan manfaat rekonstruksi. Kesulitan fisik ini bertambah dengan adanya pemekaran kepulauan Nias dari dua kabupaten menjadi empat kabupaten dan satu kota. Pemekaran ini memberikan tambahan beban bagi kapasitas pemerintah daerah yang tersedia untuk pelaksanaan proyek yang efektif dan semakin menekan anggaran yang sudah kecil. Definisi pihak yang berwenang dan yurisdiksi kian berkembang, sehingga mempersulit pengambilan keputusan selama masa transisi.

Transisi tanggung jawab rekonstruksi kepada lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten setelah penutupan BRR menimbulkan sejumlah tantangan baru. Penempatan pengaturan kelembagaan baru dan kembali menuju proses pemerintah reguler membuat beberapa proyek penting tak dapat segera dimulai dan pelaksanaannya sempat tertunda. Transisi menuju proses anggaran pemerintah reguler untuk pencairan dana merupakan tantangan tersendiri,



MDF melakukan upaya rekonstruksi di wilayah yang kompleks. Tantangan ini dijawab melalui pengembangan desain proyek yang terintegrasi dan mengutamakan keberlanjutan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan. Tampak pada gambar Jalan Raya Baru, Banda Aceh yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui proyek IRFF.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

karena penundaan dalam persetujuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengakibatkan tertundanya pelaksanaan sejumlah proyek MDF dan terus merupakan tantangan yang berlanjut.

Pembangunan kapasitas dan pengalihan aset rekonstruksi kepada pihak berwenang terkait merupakan tantangan yang paling kritis di masa depan. Pembangunan kapasitas menjadi komponen

utama dari semua proyek dibawah MDF. Kajian Tengah Waktu MDF bahkan telah mengidentifikasi pendekatan berbasis luas ini sebagai kontribusi terbesar MDF untuk rekonstruksi secara keseluruhan. Oleh sebab itu kebutuhan akan pembangunan kapasitas akan terus ada, dan bahkan akan melampaui mandat MDF. MDF mendukung pemerintah nasional dan provinsi dalam proses verifikasi dan pengalihan aset rekonstruksi ke pemerintah daerah melalui proyek AGTP, NITP dan Bantuan Teknis untuk BRR dan Bappenas, tetapi tugas ini banyak yang belum selesai. Kesenambungan aset rekonstruksi akan sangat tergantung pada transfer yang efektif, dan implikasi terhadap operasi dan pemeliharaan.

Rangkaian terakhir proyek dihadapkan dengan jadwal ketat untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek pada tanggal penutupannya di bulan Juni 2012. Termasuk di dalamnya adalah dua proyek pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang penting, yaitu EDFF Aceh dan LEDP Nias, serta dua proyek infrastruktur, RACBP Nias, dan pembiayaan tambahan untuk IRFF dalam menyelesaikan jalan nasional di pantai barat Aceh. Komite Pengarah MDF pada pertemuan September 2010 menekankan kepada semua pemangku kepentingan mengenai pentingnya bekerja sama dengan erat untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan proyek-proyek ini dapat dilaksanakan hingga akhir mandat MDF pada tahun 2012.

Proyek-proyek MDF telah menangani tantangan secara kreatif. Hal ini dilakukan melalui pengembangan desain proyek dan strategi pelaksanaan dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan. Beberapa proyek dalam portofolio MDF diperpanjang tanggal penutupannya sehingga terdapat cukup waktu untuk mencapai tujuan proyek. Dengan komitmen ini, MDF berada pada posisi yang tepat untuk terus bekerja dengan baik sampai penutupan semua proyek.



Kisah MDF 2

Jalan Akses Baru Banda Aceh: Katalis untuk Pertumbuhan

Jalan raya sepanjang dua kilometer di selatan Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh, masih belum dinamai sampai dengan tiga bulan setelah resmi dibuka pada bulan April 2009. Namun jalan raya bebas hambatan berjalur empat yang dikenal dengan nama proyek Jalan Akses Kota Baru Tahap 2 ini telah menarik banyak kegiatan ekonomi.

Di kedua sisi jalan, mulai dari persimpangan bernama Simpang Surabaya sampai ke Jalan Arteri Sukarno-Hatta, banyak bermunculan toko, rumah dan restoran baru. Terdapat juga beberapa bangunan besar seperti Kantor Kejaksaan Aceh, ruang pameran Toyota, dan pompa bensin Pertamina yang benar-benar baru. Sebuah terminal besar melayani bus antarprovinsi yang melintas menuju dan dari daerah seperti Medan, Sumatera Utara.

Jalan Akses Kota Baru Tahap 2 merupakan jalan utama yang benar-benar baru, berbeda dengan jalan pantai yang hancur karena tsunami 2004. Jalan itu merupakan bagian dari rencana induk Banda Aceh untuk memperluas batas kota dan membangun jaringan jalan untuk mendukungnya.



Foto: Abbie Traylor-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

"Konstruksinya dipercepat sehingga daerah itu dapat berkembang lebih cepat dan memulihkan perekonomian setempat," ujar Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal. Sebagai perpanjangan Jalan Akses Kota Baru Tahap 1, yang dibangun BRR, jalan yang baru ini diidentifikasi oleh pihak berwenang setempat sebagai proyek yang akan dikembangkan melalui Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) dengan dukungan dari Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF), dua proyek untuk Aceh dan Nias yang didukung oleh MDF dan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Bagi warga Desa Batoh yang terletak di dekat jalan raya baru itu, banyak perubahan telah terjadi, sebagian besar merupakan perubahan positif. Tarmiji, 52, pemilik Dhapu Kupa ("Dapur Kopi" dalam bahasa Aceh), merupakan salah satu contohnya. Tak lama setelah terjadinya tsunami, saat harga tanah merosot tajam, Tarmiji memanfaatkan kesempatan itu dengan membeli dua toko di sudut strategis tempat Jalan Akses Kota Baru bersimpangan dengan Jalan Arteri Simpang Surabaya-Lampeuneureut.

"Konstruksinya dipercepat sehingga daerah itu dapat berkembang lebih cepat dan memulihkan perekonomian setempat."

Sekitar setahun lalu, Tarmiji memutuskan untuk membuka warung kopi guna melayani penduduk di sekitarnya yang semakin bertambah. Banyak orang yang selamat dari bencana tsunami mengalami trauma sehingga enggan kembali tinggal di daerah pantai dan memilih untuk menetap di pedalaman, termasuk di daerah yang berbatasan dengan jalan baru tersebut. Karena masyarakat Aceh suka minum kopi, ini merupakan usaha yang tepat. Warung kopinya yang berlantai dua merupakan satu dari dua warung kopi terbesar di Banda Aceh. Tempat tersebut selalu dipadati pengunjung, khususnya pada saat ia menyajikan pertandingan sepak bola pada televisi layar datar berukuran 2 x 1,5 meter.

"Usaha saya akan berkembang pesat saat jalan baru benar-benar sibuk," ujar Tarmiji.

Di ujung jalan satunya, yang membentuk pertigaan dengan jalan lingkar Sukarno-Hatta, pensiunan guru, Juned Daud, pemilik toko yang menjual perlengkapan sekolah, merasa optimis. Sebagai keucik atau kepala Desa Lampeuneurut, ia menyaksikan harga tanah di sekitar jalan baru, yang sebelumnya merupakan rawa dan sawah, naik hampir sepuluh kali lipat. Ia takjub melihat banyaknya orang yang ingin membeli tanah di sana, walaupun harganya naik drastis.

Sebagai kepala desa, ia senang daerah tempat tinggalnya tidak lagi mengalami banjir di musim hujan. Hal ini berkat saluran air yang dibangun untuk menampung dan menyalurkan air yang berlebih ke lokasi lain. Daerah di belakang rumahnya, misalnya, biasanya banjir pada saat musim hujan, dan air banjir akan lama tergenang sehingga menimbulkan bahaya kesehatan. Namun saat ini, tidak ada lagi genangan air dan daerah tersebut dapat kering sepanjang tahun.

Selain menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, jalan baru ini juga memudahkan warga yang ingin pergi ke sekolah atau melakukan kegiatan sehari-hari. Rusnah, 35, seorang perempuan yang suaminya bekerja di lokasi konstruksi, menyatakan bahwa dengan adanya jalan baru, ketiga anaknya tidak perlu lagi menyeberangi rawa untuk pergi ke sekolah. Jalan ini juga mengurangi waktu tempuh perjalanannya ke kota untuk berdagang. "Saya tidak perlu lagi berjalan dua kilometer dari seberang rawa ke terminal bis, saya tinggal menunggu labi-labi (kendaraan transportasi umum kecil) di pinggir jalan baru," ujar Rusnah.



"MDF mengalokasikan dan berkomitmen untuk menyediakan AS\$646 juta bagi 23 proyek."

Kelompok produsen perempuan membuat bordiran di tempat usaha garmen yang berlokasi di Desa Lhee Blang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kelompok produsen seperti ini mendapatkan fasilitas kredit mikro dari PPK.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

Bab 3: Keuangan MDF

Komitmen

Sampai dengan 30 September 2010, Multi Donor Fund memiliki total AS\$678⁵ juta dalam bentuk komitmen dari 15 donor yang berbeda. Tidak semua komitmen diberikan dalam dolar Amerika Serikat dan sebagian belum diterima. Oleh karena itu jumlah komitmen berfluktuasi sesuai dengan nilai tukar dana yang tersedia untuk MDF serta tanggal pelaporan MDF.

Dana Tunai yang Tersedia

Sampai saat ini MDF telah menerima AS\$620 juta atau sekitar 91 persen dari total komitmen lembaga donor (Tabel 3-1). Proyeksi dana tunai dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa MDF memiliki cukup dana untuk melanjutkan kegiatan pembiayaan proyek selama MDF masih beroperasi.

Alokasi dan Komitmen Pendanaan

Sampai dengan 30 September 2010, MDF telah mengalokasikan dan memberikan komitmen sebesar AS\$646 juta untuk 23 proyek.⁶ Proyek-

Tabel 3-1: Komitmen dan Kontribusi MDF sampai dengan 30 September 2010*

| <i>Sumber</i> | <i>Jumlah komitmen dan Kesepakatan Kontribusi yang telah ditandatangani dalam AS\$ juta</i> | <i>Dana yang diterima dalam AS\$ juta</i> |
|----------------------------|---|---|
| Uni Eropa | 269,10 | 243,86 |
| Pemerintah Belanda | 171,60 | 139,20 |
| Pemerintah Inggris | 68,50 | 68,50 |
| Pemerintah Kanada | 20,22 | 20,22 |
| Bank Dunia | 25,00 | 25,00 |
| Pemerintah Swedia | 20,72 | 20,72 |
| Pemerintah Norwegia | 19,57 | 19,57 |
| Pemerintah Denmark | 18,03 | 18,03 |
| Pemerintah Jerman | 13,93 | 13,93 |
| Pemerintah Belgia | 11,05 | 11,05 |
| Pemerintah Finlandia | 10,13 | 10,13 |
| Bank Pembangunan Asia | 10,00 | 10,00 |
| Pemerintah Amerika Serikat | 10,00 | 10,00 |
| Pemerintah Selandia Baru | 8,80 | 8,80 |
| Pemerintah Irlandia | 1,20 | 1,20 |
| Kontribusi | 677,85 | 620,21 |

*Nilai tukar pada tanggal 30 September 2010; Sumber: Bank Dunia.

5 Belanda mengindikasikan akan mengurangi kontribusi sebesar AS\$25 juta sebagai akibat pengurangan bantuan pembangunan karena krisis keuangan global.

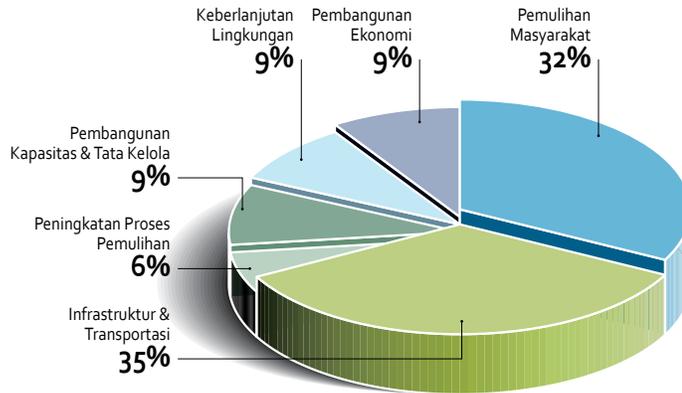
6 Alokasi untuk proyek-proyek tertentu ada di Bab 2.

proyek ini telah berjalan berdasarkan enam bidang hasil, yaitu: pemulihan masyarakat, rekonstruksi infrastruktur besar dan transportasi, pembangunan kapasitas dan tata kelola, dukungan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pemulihan secara keseluruhan, serta pembangunan ekonomi dan mata pencaharian. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi tambahan sebesar AS\$168 juta dalam pendanaan bersama untuk empat proyek dalam portofolio MDF.

MDF telah melakukan banyak investasi dalam enam bidang hasil yang ditargetkan, sesuai dengan prioritas Pemerintah Indonesia. Sekitar sepertiga portofolio dialokasikan untuk infrastruktur besar dan transportasi dan sepertiga lainnya untuk pemulihan masyarakat, termasuk perumahan dan infrastruktur tingkat masyarakat. Sisa alokasi diberikan untuk proyek di empat bidang hasil lainnya dengan pembagian kurang lebih sama untuk lingkungan, pembangunan ekonomi, dan pembangunan kapasitas/proyek tata kelola sehingga masing-masing mendapatkan sekitar 9 persen dari total portofolio, sedangkan sisanya dialokasikan untuk proyek-proyek yang berfokus pada peningkatan proses pemulihan secara keseluruhan (Diagram 3-1).

Pemerintah Indonesia mendorong upaya-upaya rekonstruksi, memimpin koordinasi dan melaksanakan sebagian besar proyek-proyek MDF. MDF memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam penggunaan sumber daya MDF untuk melaksanakan proyek melalui gabungan modalitas pelaksanaan - melalui departemen/kementerian pemerintah, LSM, UNDP, ILO dan WFP. Sekitar 73 persen dana MDF telah disalurkan melalui anggaran nasional pemerintah dan sekitar 23 persen dana dikelola melalui kemitraan dengan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, WFP dan ILO), dan 4 persen sisanya melalui LSM (Diagram 3-2). Koordinasi yang kuat dan kepemimpinan Pemerintah

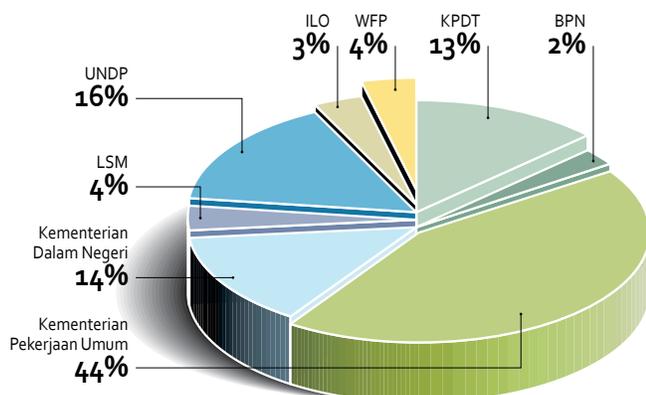
Diagram 3.1: Pendanaan MDF untuk Rekonstruksi Berdasarkan Bidang Hasil



Indonesia selama upaya rekonstruksi telah banyak menyumbangkan prestasi yang luar biasa. Bahkan rekonstruksi Aceh dan Nias telah menjadi model internasional untuk tanggapan pascabencana.

Pencairan Dana

Sampai dengan 30 September 2010, sejumlah AS\$500 juta telah disalurkan untuk proyek-proyek dalam portofolio MDF. Jumlah ini mencapai sekitar 77 persen dari total dana yang telah dialokasikan dan dikomitmenkan untuk proyek dan jumlah ini merupakan peningkatan sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Masih ada sekitar dua tahun yang tersisa untuk menyelesaikan pelaksanaan proyek, dan pencairan ini sejalan dengan kemajuan fisik dari tujuan dan sasaran proyek. Transisi dari BRR ke jajaran kementerian telah selesai dan mekanisme pemerintah untuk penyaluran danapun telah berdiri sehingga memungkinkan aliran dana ke proyek untuk berjalan. MDF, secara rata-rata, telah menyalurkan lebih dari AS\$100 juta per tahun ke proyek-proyeknya. Sekitar AS\$346 juta disalurkan ke proyek melalui anggaran nasional pemerintah,

Diagram 3.2: Badan Pelaksana Proyek MDF

sedangkan sisanya sebesar AS\$153 juta disalurkan untuk proyek di luar anggaran pemerintah.

Hingga bulan September 2010, AS\$436 juta atau 87 persen dari dana yang disalurkan telah terpakai. Dengan bercermin pada upaya rekonstruksi secara keseluruhan, yang mendekati penyelesaian, sebagian besar proyek MDF telah matang dan beberapa telah selesai. Delapan proyek telah ditutup, 12 proyek telah memasuki tahap pelaksanaan penuh dan tiga proyek berada dalam tahap awal pelaksanaan. Melihat tren secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dalam membuahkan hasil.

Prospek

Dana MDF dapat dianggap telah dikomitmenkan sepenuhnya untuk proyek. Sampai dengan tanggal 30 September 2010, dana yang belum dialokasikan dan belum dikomitmenkan tercatat sebesar AS\$26,5 juta, dengan memperhitungkan administrasi program dan biaya lainnya. Namun, dengan adanya penurunan kontribusi donor sebesar sekitar AS\$25 juta yang saat

ini sedang ditegaskan secara resmi, jumlah dana yang belum dialokasikan dan belum dikomitmenkan akan turun menjadi sekitar AS\$1,2 juta.

Pencairan dana untuk proyek mencerminkan status portofolio secara keseluruhan. Proyek dalam anggaran yang aktif akan mendorong pencairan dan belanja proyek sampai penutupan MDF pada tahun 2012. Sebagian besar pencairan dana yang tersisa diperkirakan akan dilakukan sepanjang tahun 2011.

Dalam sisa waktu MDF, penggunaan dana akan difokuskan terutama untuk memastikan kualitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan proyek. Diperkirakan akan terdapat sisa dana dari sebagian proyek yang akan tutup. Dana yang tersisa ini diperkirakan akan digunakan untuk pembiayaan tambahan bagi proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan, begitu dana tersebut tersedia. Penggunaan dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan kapasitas dan infrastruktur setempat, seperti yang telah disetujui pada pertemuan Komite Pengarah yang diselenggarakan pada bulan September 2010. Sisa dana yang tidak diterima pada waktunya sehingga penggunaannya tidak dapat diatur ulang secara efektif akan dikembalikan ke donor.

MDF bergantung pada koordinasi antarpemerintah yang efektif oleh Bappenas serta pengawasan dan pelaksanaan yang baik oleh semua badan mitra dan badan pelaksana. Pencairan dana ke proyek-proyek yang berada di bawah anggaran pemerintah memerlukan proses alokasi yang sesuai dengan proses anggaran nasional. Dengan adanya keterbatasan waktu yang tersisa, pengolahan anggaran yang tertunda akan memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, agar proyek dapat diselesaikan dengan baik, maka semua pihak perlu berfokus pada masalah teknis, kelembagaan dan keuangan selama proses berlangsung.

Kisah MDF 3

Aceh dan Nias yang Bersih dan Hijau

Program Pengelolaan Limbah Tsunami (TRWMP), yang didukung hibah dari MDF, menggunakan pendekatan multi aspek untuk pelestarian lingkungan yang difokuskan pada pengelolaan limbah padat. Proyek ini awalnya dirancang untuk membersihkan puing dan reruntuhan pascatsunami. Pada tahap berikutnya proyek berkembang dengan mendukung sistem pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan sebagai bagian dari komitmen untuk "membangun kembali dengan lebih baik." Proyek ini mencakup pembangunan tempat pembuangan akhir dan pengembangan percontohan sistem pengumpulan sampah berbayar. TRWMP juga membantu menyediakan peluang mata pencaharian dalam daur ulang dan kegiatan lain terkait dengan limbah, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai daur ulang dan praktik terbaik dalam pengelolaan limbah.

Daur Ulang Kehidupan di TPA

Setiap hari beberapa kelompok pemulung memilah limbah di Suak Buluh, satu-satunya tempat pembuangan akhir di Simeulue, yang tersembunyi di balik bukit hijau rimbun dekat ibu kota, Sinabang. Mereka mengumpulkan plastik, logam, kardus - apa saja yang dapat dijual – juga kayu bakar yang akan dibawa pulang dan digunakan untuk memasak.

Yusni merupakan salah satu dari 25 anggota kelompok pemulung, yang 23 orang di antaranya adalah perempuan. Yusni berbicara apa adanya mengenai kehidupannya di tempat pembuangan akhir. Ia datang hampir setiap hari ke Suak Buluh. Ibu dari tiga orang anak ini mencari dan memilah limbah yang dapat didaur ulang dan berharga, yang diambil dari 25 m³ limbah yang setiap hari diangkut dari seluruh pulau.

Yusni yang berumur 32 tahun ini menghabiskan separuh jam kerjanya di tempat pembuangan akhir Simeulue, separuhnya lagi di perkebunan kelapa sawit, tergantung pada kegiatannya sebagai pemulung. Ia sering mendapatkan sekitar Rp 100.000 per minggu dari bahan daur ulang yang ia kumpulkan. "Saya suka menjadi pemulung," ujar Yusni. "Di sini penghasilan saya lebih baik daripada di perkebunan."

Jam kerjanya pun lebih baik. Amidah, ketua kelompok pemulung juga lebih suka menjadi pemulung. "Saat kami bekerja di sini, kami hanya bekerja sampai tengah hari. Di perkebunan, mereka menjemput kami jam 7 pagi dengan truk dan kami baru selesai bekerja jam 4 sore," ujarnya.

TRWMP bekerja sama dengan penduduk di Aceh dan Nias yang mendapatkan penghasilan di tempat pembuangan akhir. Salah satu kegiatan utama TRWMP adalah Proyek Mata Pencaharian dari Pengolahan Limbah, yang berusaha mendukung dan meningkatkan pendapatan keluarga dan kesinambungan usaha kecil di seluruh Aceh dan Nias sekaligus mengalihkan sebanyak mungkin bahan yang dapat didaur ulang dari tempat pembuangan akhir.

Memulung merupakan salah satu kegiatan yang diidentifikasi memerlukan bantuan TRWMP. TRWMP sering kali mengadakan pelatihan dan memberi peralatan bagi banyak pemulung di Aceh dan Nias, yang merupakan salah satu kelompok paling rentan dan miskin di wilayah tersebut. Namun mereka telah menyadari gagasan bahwa barang yang dibuang sebagai sampah dapat menghasilkan rezeki.



Foto: Koleksi UNDP

Pemerintah daerah secara rutin mendukung pemulung. Dengan dukungan TRWMP pemerintah daerah juga secara rutin mengadakan penyuluhan mengenai kebersihan agar para pemulung menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pemulung perempuan menyatakan bahwa keluhan utama pemulung adalah masalah kulit, namun selebihnya kondisi kesehatan mereka cukup baik.

Yusni dan Amidah pulang setiap malam dan mandi menggunakan sabun beberapa kali. Mereka kemudian menyalakan api untuk memasak dengan menggunakan kayu yang dikumpulkan dan bersantap malam dengan keluarga mereka masing-masing, setelah bekerja keras di Suak Buluh untuk memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga mereka.

Membangun Kesadaran Anak Sekolah mengenai Kebersihan dan Pengelolaan Limbah

Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang didukung oleh TRWMP di Aceh dan Nias. Proyek ini mengajarkan anak sekolah mengenai prinsip dasar daur ulang dan praktik kebersihan, karena membangun kesadaran dan kebiasaan baik sejak dini bagi anak-anak akan menghasilkan masyarakat yang lebih berpengetahuan saat mereka menginjak dewasa.

Sesaat sebelum waktu istirahat di sebuah sekolah dasar kecil di Banda Aceh, sekitar 40 anak dengan sabar berdiri tegak di halaman sekolah. Suara seorang perempuan yang terdengar dari pengeras suara untuk menenangkan anak-anak berusia empat dan lima tahun yang ceria itu.



Foto: Koleksi UNDP

A. Elia Nova bekerja di Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DK3), dan ia mengajar anak-anak di TK Al-Azhar mengenai praktik kebersihan, pengelolaan limbah dan prinsip daur ulang.

"Kami ingin anak-anak lebih sadar lingkungan," ujar Elia, salah satu dari tiga fasilitator pelatihan dari D3K di sekolah itu. "Kami mengajarkan enam hal: pendidikan lingkungan, kebersihan, cuci tangan, penanaman pohon, pengetahuan dasar mengenai limbah dan sampah serta pembuatan kompos."

"Lebih mudah mengubah perilaku mereka dari awal daripada setelah mereka beranjak dewasa," kata Elia.

Ini merupakan satu dari sepuluh sesi sosialisasi pemerintah yang didukung TRWMP di sekolah-sekolah Banda Aceh sepanjang 2010. Tahun depan D3K akan menambah enam sekolah lagi dalam daftar pelatihannya. Di seluruh 13 kabupaten yang didukung TRWMP, pemerintah daerah telah melatih hampir 30.000 siswa dari 427 sekolah mengenai masalah kesadaran lingkungan.

Setelah permainan yang tampak melelahkan di halaman sekolah kecil di Banda Aceh itu, anak-anak beristirahat menikmati camilan di ruang kelas yang sejuk. Saat ditanya apakah mereka akan mengajari orang tua mereka mengenai semua hal yang mereka pelajari, anak-anak serentak berteriak, "YA!"



"Dampak yang berkelanjutan dan strategi penutupan merupakan fokus penting bagi MDF."

Yursi, 20, merawat benih kakao di pembibitan Forsaka di Desa Jalin, Jantho, Aceh. Pembibitan Forsaka merupakan prakarsa yang dibentuk oleh Fauna and Flora International (FFI) di bawah Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP). Pembibitan ini menyemaikan benih tanaman kakao, mahoni dan pohon lain untuk menyediakan benih gratis kepada petani setempat agar mereka dapat menanam berbagai tanaman. Daerah itu merupakan salah satu tempat yang paling banyak dirugikan oleh pembalakan liar.

Foto: Abbie Traylor-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

Bab 4: Menatap ke Depan

Enam tahun telah berlalu sejak terjadinya gempa bumi dan tsunami pada bulan Desember 2004 dan gempa bumi pada bulan Maret 2005, dan kini rekonstruksi Aceh dan Nias telah memasuki tahap akhir. Hasil yang luar biasa telah tercapai dalam pemulihan masyarakat, rekonstruksi infrastruktur, pemulihan pelayanan dan pembangunan kembali lembaga setempat. Penduduk Aceh dan Nias telah mulai memandang ke depan, bukan lagi ke belakang, sambil terus membangun kembali kehidupan dan masyarakatnya serta bekerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias berlanjut melalui proses reguler pemerintah. Bappenas akan terus mengkoordinasikan rekonstruksi melalui Rencana Aksi 2010-2012 yang mencakup periode waktu yang sama seperti Multi Donor Fund. Pemerintah provinsi juga memainkan peran yang semakin penting dalam semua aspek rekonstruksi, dan pelaksanaan Rencana Aksi bersama dengan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi Aceh dan Sumatera Utara telah mengeluarkan peraturan pemerintah provinsi mengenai Rencana Aksi 2010-2012. Setelah itu pembangunan Aceh akan dipandu oleh Rencana Akselerasi Pembangunan Berkelanjutan yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan dari pemerintah pusat.

MDF telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pemulihan secara keseluruhan dan tetap berkomitmen untuk melanjutkan dukungan terhadap rekonstruksi sampai akhir mandatnya. Dukungan

MDF terhadap rekonstruksi secara keseluruhan akan terus diberikan melalui bantuan teknis untuk BRR dan Bappenas serta dukungan kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten di Aceh dan Nias melalui berbagai proyek. Portofolio MDF saat ini telah matang, sesuai dengan strategi bertahap yang telah ditentukan sejak awal. Beberapa proyek telah ditutup, sebagian besar proyek tengah sepenuhnya dilaksanakan dan kesibukan mulai berkurang, sedangkan beberapa proyek terakhir sudah berada pada tahap awal pelaksanaan. Proyek mengalami kemajuan yang baik, hasil nyata yang jelas terlihat, dan manfaat proyek telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh Aceh dan Nias.

Diperlukan keberlanjutan koordinasi dan kerja sama yang kuat dari semua mitra untuk menjamin kelancaran pelaksanaan dan kualitas serangkaian proyek terakhir. Jadwal penyelesaian proyek ini sangat ketat. Mandat MDF akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan seluruh proyek harus ditutup pada bulan Juni 2012, tanpa ada kemungkinan perpanjangan. Tanggal penutupan untuk beberapa proyek telah diperpanjang sampai Juni 2012 untuk memastikan adanya cukup waktu untuk menyelesaikan tujuan mereka.

Seluruh dana MDF yang tersedia telah dialokasikan ke seluruh proyek-proyeknya.⁷ Komite Pengarah menyatakan bahwa Wali Amanat telah mengelola dana dengan baik. Proyek-proyek berjalan sesuai rencana, pencairan sisa dana juga akan dilakukan pada tahun 2011 dan harus digunakan oleh masing-masing proyek hingga masa penutupannya. Diperkirakan akan terdapat sejumlah sisa dana dari beberapa proyek. MDF dalam hal ini akan mengatur ulang penggunaan sisa dana tersebut sejauh memungkinkan dalam jangka waktu yang tersisa saat dana tersebut tersedia. Komite Pengarah telah menetapkan bahwa prioritas akan diberikan pada pembangunan kapasitas dan

⁷ Lihat Bab 3: Keuangan MDF, untuk mendapatkan perincian.

infrastruktur setempat dalam kerangka proyek yang ada. Bisa atau tidaknya dana tersebut diatur ulang dan dipakai oleh proyek yang ada akan tergantung pada kapan dana tersebut tersedia, sehingga dapat secara efektif dimanfaatkan hingga tanggal penutupan proyek.

Portofolio MDF secara keseluruhan memberikan hasil dan kualitas yang baik, dan dampak mulai terlihat saat proyek mendekati penyelesaian. Ribuan proyek infrastruktur besar dan kecil telah selesai dan memberi kontribusi terhadap revitalisasi ekonomi. Rumah dan sekolah telah ditempati, organisasi masyarakat menjadi lebih aktif dan saling berhubungan, lembaga daerah menjadi lebih kuat dan tangguh, pemerintah daerah lebih siap dalam mengelola upaya rekonstruksi yang masih ada dan pembangunan di masa mendatang. Masyarakat dan individu, terutama perempuan, lebih diberdayakan untuk berperan dalam perencanaan bagi pembangunan masa depan di tengah masyarakat. Peluang mata pencaharian telah ditingkatkan bagi masyarakat melalui kegiatan proyek dan pekerjaan pembangunan ekonomi dengan target yang lebih spesifik baru saja berlangsung.

Kesinambungan dampak dan strategi penutupan merupakan fokus penting bagi MDF secara keseluruhan. Menjadi kewajiban seluruh proyek di bawah MDF untuk memastikan agar kedua hal tersebut tercapai. Pengalihan aset rekonstruksi kepada pihak berwenang yang relevan serta memastikan adanya sumber daya dan sistem untuk melanjutkan operasi dan pemeliharaan merupakan tantangan terbesar terhadap kesinambungan investasi yang dilakukan melalui rekonstruksi secara keseluruhan. Proyek-proyek MDF mendukung pemerintah dalam hal pengalihan aset dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi tantangan ini.

Pengurangan risiko bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan merupakan prinsip penting lainnya yang dipersiapkan MDF untuk

dimasukkan dalam agenda pembangunan Aceh dan Nias. Proyek-proyek khusus seperti DRR-A, TRWMP dan AFEP, misalnya, menangani masalah ini secara langsung. Proyek-proyek lain dalam portofolio, seperti proyek perumahan di Aceh dan Nias, proyek infrastruktur besar yang dilaksanakan di bawah IREP dan IRFF, NITP, SDLP dan lain-lain, juga telah memasukkan kelestarian lingkungan dan/atau pengurangan risiko bencana dalam kegiatan mereka.

Proyek-proyek MDF menggunakan pendekatan yang berkesinambungan sehingga dapat memastikan adanya manfaat jangka panjang. Proyek seperti AFEP, TRWMP, SDLP, dan DRR-A menetapkan tata kelola, sistem penyampaian layanan dan pengelolaan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang dirancang untuk terus berfungsi setelah dukungan proyek berakhir. Investasi MDF dalam infrastruktur fisik dan modal sumber daya manusia memberi kontribusi bagi ketahanan Aceh dan Nias terhadap bencana di masa depan.

MDF memanfaatkan kekuatan kelembagaan dari berbagai mitra dan hubungannya dengan program pemerintah dalam rangka mencapai hasil dan meningkatkan kesinambungan program. Proyek UNDP seperti NITP dan AGTP berusaha untuk memuluskan proses transisi dari rekonstruksi ke pembangunan yang berkelanjutan dengan menggunakan strategi UNDP tingkat nasional yang mendukung agenda desentralisasi pemerintah. Proyek-proyek MDF yang berada di bawah Bank Dunia dan menggunakan pendekatan CDD juga berjalan selaras dengan strategi nasional pemerintah untuk pengurangan kemiskinan. Proyek-proyek CDD (PPK, P2KP, Rekompak, PNPM R2PN) dan P2DTK telah dimasukkan ke dalam program nasional di bawah program PNPM yang berada di bawah naungan pemerintah. Pendekatan yang diadopsi oleh proyek-proyek MDF memberikan kontribusi pada hasil yang berkesinambungan dan manfaat pembangunan yang terus berlanjut setelah proyek berakhir dengan menghubungkannya dengan program nasional.

Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat untuk rekonstruksi perumahan yang dikembangkan melalui proyek Rekompak di Aceh telah direplikasi dan diadopsi oleh pemerintah pusat untuk rekonstruksi perumahan pascabencana.

Proses rekonstruksi pascabencana diakui berkontribusi pada situasi Aceh yang aman dan damai. Oleh sebab itu penting untuk terus dilanjutkan agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. MDF beroperasi dalam konteks pemulihan pascabencana yang unik karena juga berada ditengah-tengah kondisi pascakonflik. Pemerintah kedua provinsi dan Bappenas terus memberikan perhatian dalam menjembatani upaya rekonstruksi dan prakarsa perdamaian melalui pemasyarakatan pembangunan ekonomi yang juga peka terhadap kondisi pascakonflik. MDF mendukung agenda pemerintah sejauh hal tersebut dimungkinkan dalam mandatnya dengan memasukkan unsur kepekaan terhadap konflik sebagai fitur penting dalam rancangan proyek. Program Konsolidasi Pembangunan yang Damai di Aceh (CPDA), prakarsa baru yang didukung oleh Belanda dan AusAID dalam kemitraan dengan Bank Dunia dan pemerintah, bertujuan untuk mendorong pengarusutamaan pengurangan konflik ke dalam agenda pembangunan Aceh.

Mandat MDF adalah untuk berkontribusi pada upaya rekonstruksi pascabencana dan tidak dirancang untuk menangani seluruh masalah pembangunan di Aceh dan Nias. Meskipun demikian, MDF bekerja untuk mendukung Pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi untuk “membangun kembali dengan lebih baik,” sehingga membantu meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masa depan. Dua proyek pembangunan ekonomi dan mata pencaharian utama MDF baru saja dimulai dan dirancang untuk menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor produksi utama, yang berfokus pada pertanian di seluruh Aceh dan Nias. Proyek-proyek ini terbatas dalam ruang lingkup dan

waktu, tetapi akan membantu meletakkan landasan bagi pembangunan ekonomi masa depan yang sejalan dengan rencana utama rekonstruksi dan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah provinsi. Aspek penting lainnya adalah proyek-proyek ini menyediakan model, percontohan, dan sistem yang dapat dibangun setelah MDF berakhir.

MDF akan menilai hasil dan dampak upayanya dengan berfokus pada pembelajaran yang diperoleh. MDF memiliki pembelajaran yang berharga baik dari sisi pelaksanaan proyek maupun harmonisasi donor yang efektif. Keberhasilan MDF dan keseluruhan upaya rekonstruksi Aceh dan Nias sudah diakui oleh masyarakat dunia. Upaya pemulihan dan rekonstruksi yang luar biasa ini perlu dijadikan pembelajaran bagi upaya rekonstruksi pascabencana di tempat-tempat lain di masa yang akan datang.

Model yang dikembangkan di Aceh seperti perumahan berbasis masyarakat dan proyek infrastruktur telah direplikasi di tempat lain di Indonesia untuk proses pemulihan pascabencana termasuk bencana letusan Gunung Merapi yang baru-baru ini terjadi. Pendekatan ini juga sedang dipelajari untuk digunakan di Haiti dan dalam konteks internasional lainnya. Dengan memanfaatkan pengalamannya dengan MDF, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Fasilitas Multi Donor Fund Indonesia untuk Pemulihan Pascabencana (IMDFF-DR) yang merupakan dana siaga bagi tanggapan dan pencegahan bencana. Namun, pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan program rekonstruksi dan pemulihan MDF tidak terbatas pada sistem dan pengaturan pascabencana, namun juga mengenai tata kelola, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan lembaga yang kuat untuk meningkatkan pembangunan masa depan Aceh dan Nias.

Kisah MDF 4

Mendukung Pemulihan Pascabencana Melalui Organisasi Berbasis Masyarakat di Nias

Untuk pertama kalinya, Desa Lewuoguru di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, memiliki fasilitas pendidikan. Tempat di mana anak-anak dapat belajar dan bermain telah didirikan dan sekarang dapat digunakan di desa itu dengan menggunakan kurikulum nasional untuk pendidikan anak usia dini. Anak-anak menghabiskan waktu dua jam di sekolah setiap hari, untuk bermain bersama dengan berbagai mainan, bernyanyi serta belajar membaca dan menulis.

Fasilitas yang didirikan berdasarkan prakarsa Ingin Maju - organisasi berbasis masyarakat (CBO) perempuan di desa itu merupakan jawaban sempurna terhadap kekhawatiran perempuan setempat mengenai kurangnya peluang pendidikan bagi anak-anak usia dini. Dengan dukungan dari Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO) UNDP dan pendanaan dari Multi Donor Fund senilai Rp 108 juta (AS\$ 11.980), fasilitas ini telah dibuka pada bulan Oktober 2008. Walaupun banyak pihak yang berusaha menekan agar organisasi ini menggunakan hibah kecil yang diperolehnya untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, kelompok perempuan itu tetap teguh pada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak desa setempat. Austcare, sebuah LSM Australia, adalah mitra UNDP dalam melaksanakan proyek CSO tersebut di Nias.

Yusminar Harefa, 29, tinggal di dusun III, Desa Lewuoguru. Ia bekerja sebagai asisten guru di sekolah dasar setempat yang juga bertugas sebagai sekretaris Ingin Maju. "Keberadaan Pusat Pendidikan Usia Dini Ingin Maju merupakan hal yang luar biasa bagi kami di desa ini. Kami telah menghadapi banyak kesulitan dan hambatan dalam melaksanakan program ini. Ada kalanya kami merasa tidak dapat melanjutkan program ini karena tantangannya begitu banyak."

"Kami berharap di masa depan kami dapat memiliki sekolah dasar, sehingga anak-anak kami tidak perlu menempuh perjalanan sepanjang lima sampai enam kilometer ke desa tetangga untuk bersekolah."

Suami Yusminar pada awalnya enggan memberikan bantuan dalam menjalankan CBO karena yakin bahwa peran Yusminar di Ingin Maju akan mengganggu pekerjaannya sebagai asisten guru di sekolah. Fasilitator Austcare melakukan pertemuan dengan tim manajemen CBO di rumahnya, menunjukkan kepada Yusminar tentang bagaimana membuat pembukuan yang benar sekaligus cara membagi waktu untuk keluarga dan CBO. Suaminya kemudian mulai menyadari dan memahami pekerjaan Yusminar dan CBO termasuk aspek yang memperhatikan kesetaraan gender. Pada akhirnya, dukungan dari suaminya yang mendorong Yusminar untuk tetap terlibat dengan kegiatan CBO.

Sekolah ini pada awalnya memiliki 50 murid, tapi pada akhir 2008, jumlah tersebut meningkat menjadi 60, termasuk anak-anak dari desa tetangga. Ada 27 siswa dan 33 siswi dengan enam guru bersertifikasi (semuanya perempuan) yang bekerja di tempat tersebut. Komite sekolah setempat dibentuk untuk mendukung sekolah dan bertindak sebagai dewan sekolah untuk memberikan pengawasan atas proses pembelajaran di sekolah. Mereka juga bekerja sama dengan pihak di luar desa, termasuk pemerintah daerah dan pihak di luar pemerintah, untuk mendapatkan dukungan terhadap sekolah. Dinas Kesehatan juga memperluas layanannya dengan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah.

Kelompok perempuan ini juga telah diperkuat melalui pelatihan dan bimbingan yang disediakan oleh Austcare - termasuk perencanaan program, pembukuan, dan pengelolaan waktu. Pelatihan lebih lanjut disediakan oleh Pusat Sumber Daya Masyarakat Sipil Nias mengenai pengelolaan organisasi, kepemimpinan, perencanaan strategis dan pengarusutamaan gender. Para perempuan di desa sangat senang

karena, melalui kerja keras mereka, saat ini mereka tak hanya memiliki sekolah untuk anak-anak mereka, tapi juga mendapatkan pengakuan dari desa dan keluarga mereka.

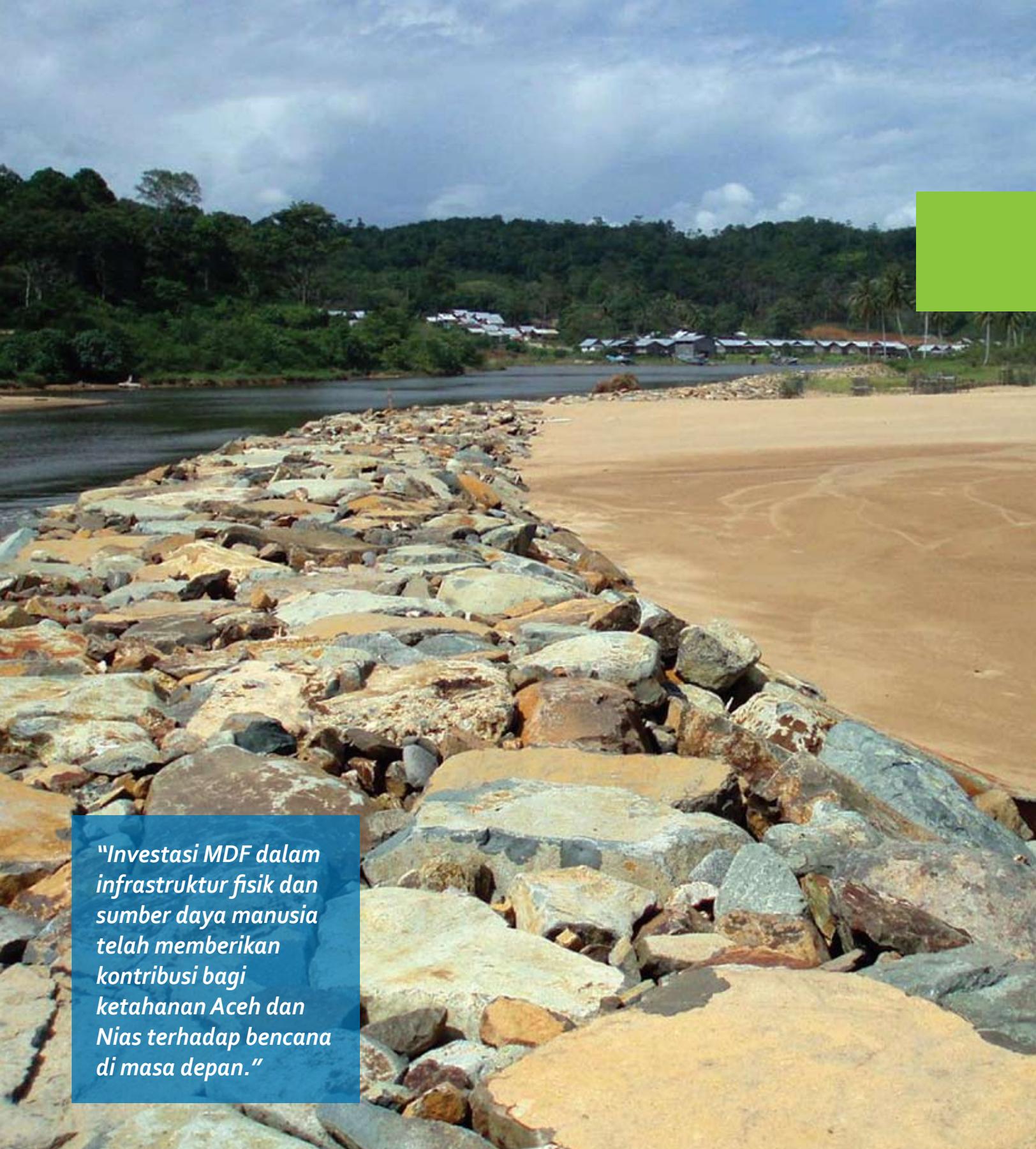
Ingin Maju bertujuan untuk mengembangkan lebih lanjut fasilitas pendidikan ini di masa depan dengan memanfaatkan berbagai pelatihan yang mereka dapatkan. Pelatihan itu sangat berguna bagi pengelolaan dana operasi yang berasal dari iuran dan juga dari donor independen.

Proyek CSO MDF telah menyelesaikan kegiatannya tapi dampaknya akan terus terasa di Lewuoguru. Menurut Yusminar, "Kami berharap di masa depan kami akan memiliki sekolah dasar, sehingga anak-anak kami tidak perlu menempuh perjalanan sepanjang lima sampai enam kilometer ke desa tetangga untuk bersekolah. Namun demikian, sekarang saya dapat tersenyum dan juga tertawa saat melihat hasil perjuangan kami, kelompok perempuan di desa kami. Terima kasih Austcare, UNDP dan juga donor MDF yang telah memberikan bantuan kepada desa kami."



CBO perempuan, Ingin Maju di Lewuoguru, Nias, menggunakan hibah kecil dari proyek CSO yang didukung MDF dan dilaksanakan oleh UNDP untuk menciptakan program pendidikan anak usia dini bagi anak-anak desa. Proyek ini memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas bagi CSO dan CBO tertentu di seluruh Aceh dan Nias, termasuk kelompok perempuan Ingin Maju. Hari itu merupakan hari yang menyenangkan bagi semua anggota saat pusat pendidikan prasekolah dibuka secara resmi dan dikunjungi banyak tamu.

Foto: Koleksi AUSTCARE untuk Proyek CSO



"Investasi MDF dalam infrastruktur fisik dan sumber daya manusia telah memberikan kontribusi bagi ketahanan Aceh dan Nias terhadap bencana di masa depan."

Proyek IRFF dan IREP, yang didanai bersama-sama oleh Pemerintah Indonesia dan MDF, merancang dan membangun lebih dari 50 subproyek infrastruktur besar di seluruh Aceh dan Nias. Penahan ombak yang dibangun di Aceh Jaya ini menstabilkan muara setelah terjadi tsunami sehingga masyarakat nelayan yang tinggal di sekitarnya dapat pergi ke laut dengan aman.

Foto: Koleksi IRFF

Lampiran | Portofolio Proyek

| No. Proyek | | Alokasi Dana Juta AS\$ |
|---|---|-----------------------------------|
| Pemulihan Masyarakat | | |
| 1 | Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak) | 85,00 |
| 2 | Program Pengembangan Kecamatan (PPK) | 64,70 |
| 3 | Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) | 17,96 |
| 4 | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM R2PN) | 25,75 |
| 5 | Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS) | 14,83 |
| Pemulihan Transportasi dan Infrastruktur Skala Besar | | |
| 6 | Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP) | 6,50 |
| 7 | Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) | 42,00 |
| 8 | Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) | 136,70 |
| 9 | Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang | 1,46 |
| 10 | Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) | 25,03 |
| 11 | Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) | 3,78 |
| 12 | Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) | 11,80 |
| Penguatan Tata Kelola dan Pembangunan Kapasitas | | |
| 13 | Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan (CBLR3) | 11,80 |
| 14 | Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) | 25,60 |
| 15 | Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO) | 6,00 |
| Pelestarian Lingkungan | | |
| 16 | Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP) | 17,53 |
| 17 | Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) | 39,40 |
| Peningkatan Proses Pemulihan | | |
| 18 | Program Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas | 24,48 |
| 19 | Proyek Pengurangan Risiko Bencana - Aceh (DRR-A) | 9,87 |
| 20 | Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) | 13,98 |
| 21 | Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) | 3,89 |
| Pembangunan Ekonomi dan Mata Pencaharian | | |
| 22 | Fasilitas Pendanaan Pembangunan Ekonomi (EDFF) | 50,00 |
| 23 | Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) | 8,20 |
| TOTAL ALOKASI UNTUK PROYEK | | 646,26 |

1. Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat (Rekompak)

Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak) memberikan hibah kepada masyarakat di 130 desa untuk membangun kembali dan memperbaiki rumah serta merehabilitasi infrastruktur pemukiman mereka melalui pendekatan berbasis masyarakat. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dan ditutup pada tanggal 30 April 2010.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$85,00 juta |
| Masa Pelaksanaan | November 2005–April 2010 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pekerjaan Umum |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$84,97 juta ⁸ |

Proyek yang menyediakan perumahan bagi masyarakat di 130 desa ini merupakan satu dari beberapa proyek yang juga memberikan bantuan untuk merehabilitasi rumah yang rusak. Proyek ini juga mengembangkan mekanisme unik yang mencakup bantuan kepada penyewa rumah. Proyek ini mendukung masyarakat desa di Aceh untuk bersama-sama memetakan dan menilai kerusakan yang terjadi di desa mereka dan menetapkan kebutuhan konstruksi mereka sendiri.

Program Kompak menetapkan standar yang tinggi untuk rekonstruksi perumahan dan infrastruktur desa dalam situasi pascabencana. Program ini memberikan landasan bagi mitra internasional untuk mendukung agenda pemerintah dalam membangun kembali masyarakat yang dipimpin oleh masyarakat sendiri.

Capaian Utama

Pendekatan berbasis masyarakat yang digunakan dalam proyek ini terbukti efektif dalam membangun kembali rumah dalam jangka waktu terbatas dan menciptakan rasa kepemilikan yang



Murid-murid sekolah berjalan kaki melewati perumahan yang dibangun melalui proyek CSRRP/Rekompak di Desa Air Pinang, Kabupaten Simeuleu Timur, Aceh.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

kuat pada penerima manfaat. Hibah yang diberikan kepada masyarakat memungkinkan mereka untuk membangun kembali hampir 8.000 rumah dan memperbaiki hampir 7.000 rumah yang rusak di 130 desa yang menerima bantuan. Rata-rata, lebih dari 97 persen rumah yang dibangun kembali dan diperbaiki telah dihuni. Rencana Pembangunan Permukiman (RPP) telah diselesaikan di 126 desa. Proyek ini juga memberikan hibah untuk membangun kembali infrastruktur masyarakat di 180 desa, yang secara langsung memberikan manfaat untuk lebih dari 79.000 orang. Proyek ini meliputi jalan desa, sistem drainase, jembatan, serta fasilitas air dan sanitasi umum. Proyek ini juga memperkuat kapasitas masyarakat dan ekonomi setempat melalui pelatihan manajemen bisnis dan teknis. Selain itu, proyek ini merangsang ekonomi setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan mendorong dukungan usaha setempat.

Berdasarkan keberhasilan pelaksanaan Kompak di Aceh, model berbasis masyarakat untuk rekonstruksi perumahan ini telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam situasi pascabencana setelah terjadinya gempa bumi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2006 dan di Sumatera Barat pada tahun 2009. Studi Bappenas pada tahun 2005 dan survei mengenai kepuasan penerima manfaat yang dilakukan oleh proyek pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Kompak menyediakan perumahan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah (sampai 40 persen lebih rendah) daripada proyek lain yang tidak menggunakan pendekatan berbasis masyarakat.

| <i>Hasil hingga saat penutupan proyek 30 April 2010</i> | <i>Target</i> | <i>Capaian</i> |
|---|---------------|----------------|
| Rumah hancur yang direkonstruksi | 8.004 | 7.964* |
| Rumah rusak yang direhabilitasi | 6.999 | 6.999 |
| Rencana Pembangunan Permukiman | 126 | 126 |
| Jalan desa yang diperbaiki/dibangun (km)** | - | 133 |
| Irigasi dan drainase yang diperbaiki/dibangun (km)** | - | 142 |
| Air bersih, tempat penyimpanan air dan sumur (unit)** | - | 173 |
| Penciptaan lapangan kerja jangka pendek (hari kerja) | - | 7.800.535 |

* Empat puluh rumah yang tersisa dibatalkan karena berbagai alasan termasuk masalah tanah dan perubahan desain.

** Target ditetapkan di tingkat masyarakat pada saat pelaksanaan.

8 Apabila terdapat sisa dana, maka akan dikembalikan ke MDF pada saat penutupan proyek.

9 Studi tersebut berjudul *Findings of Post Construction Economic Impact Analysis Study for CDD Programs*.

2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) memberikan hibah langsung ke desa-desa untuk melakukan rekonstruksi berbasis masyarakat. Melalui proses ini, PPK mendukung pemulihan infrastruktur masyarakat di lebih dari 3.000 desa di seluruh Aceh dan Nias. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$64,70 juta |
| Masa Pelaksanaan | November 2005–Desember 2009 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Dalam Negeri |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$64,70 juta |

Pemerintah Indonesia mengakui keunggulan program pemulihan berbasis masyarakat sebagai mekanisme yang cepat dan fleksibel untuk memberikan hasil yang mengarah ke solusi yang berkelanjutan. MDF memanfaatkan keberhasilan model pembangunan berbasis masyarakat ini melalui program PPK tingkat nasional yang sudah ada untuk menyalurkan dana serta rekonstruksi dan rehabilitasi yang dipimpin masyarakat di Aceh dan Nias setelah terjadi gempa bumi dan tsunami.

Capaian Utama

Melalui PPK, masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pemulihan mereka sendiri sehingga timbul rasa kepemilikan yang kuat pada penerima manfaat. PPK memiliki mekanisme kontrol berlapis-lapis yang solid untuk mencegah korupsi selama tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek desa.

Sebagian besar dana PPK disalurkan melalui hibah ke kecamatan di daerah yang terkena tsunami. Desa yang akan menerima dana dan jumlah yang akan disalurkan untuk masing-masing subproyek ditentukan melalui proses demokratis. Secara keseluruhan, proyek menyediakan perencanaan, pelatihan dan dukungan pembangunan kapasitas lebih dari 6.000 warga di Aceh dan Nias. Sekitar 3.000 ke desa menerima hibah yang dibiayai MDF.

Sebagian besar pendanaan MDF yang disalurkan melalui hibah PPK (lebih dari 90 persen) digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur di tingkat lokal, termasuk jalan desa, jembatan, sekolah, pasar, puskesmas, fasilitas irigasi dan drainase, serta penyediaan air bersih. Dana MDF tersebut juga digunakan untuk mendukung kebutuhan sosial seperti kredit mikro, beasiswa, dan dana darurat bantuan untuk keluarga. Pembangunan kapasitas di tingkat masyarakat untuk perencanaan tingkat setempat serta pengelolaan rekonstruksi

dan kegiatan pembangunan di masa depan adalah salah satu hasil proyek yang paling penting.

Lebih dari 29.000 orang terlibat dalam proses perencanaan masyarakat dan menerima pelatihan. Proyek ini sangat sukses dalam memberdayakan perempuan agar mereka memiliki suara dalam perencanaan masyarakat karena jumlah perempuan mencapai sekitar 45 persen dari seluruh peserta dalam kegiatan perencanaan masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat PPK juga memberikan kontribusi tidak langsung atas pemulihan masyarakat dengan merangsang ekonomi setempat. Dana proyek tetap berada di masyarakat sedangkan bahan baku dibeli dari pemasok setempat dan anggota masyarakat dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.

PPK terbukti sebagai mekanisme pemulihan masyarakat berskala besar yang hemat biaya dalam pascabencana dan pascakonflik Aceh dan Nias sehingga masyarakat memiliki suara dalam menentukan dan merencanakan sendiri pemulihan mereka. Hal ini juga menciptakan sinergi dengan proyek lain melalui fungsinya sebagai media bagi lembaga pembangunan lain dan lembaga pemerintah dalam menyampaikan program melalui cakupan dan jaringan yang luas. Proyek ini telah dialihkan ke program PNPM Mandiri yang dibiayai secara nasional, dan mencakup seluruh desa di Aceh.

| Hasil hingga saat penutupan proyek 31 Desember 2009 | Target | Capaian |
|--|-----------|-----------|
| Jalan yang diperbaiki/dibangun (km) | 2.412 | 2.399 |
| Jembatan yang diperbaiki/dibangun (unit) | 1.007 | 932 |
| Irigasi dan drainase (km) | 931 | 1.238 |
| Proyek air bersih (unit) | 598 | 844 |
| Waduk penyimpanan air (unit) | 118 | 180 |
| Unit sanitasi (MCK)* | 939 | 778 |
| Pasar tingkat desa | 21 | 26 |
| Gedung sekolah | 289 | 292 |
| Pos/klinik kesehatan | 33 | 11 |
| Nilai beasiswa (US\$) | 380.604 | 326.270 |
| Jumlah penerima | 6.052 | 6.074 |
| Jumlah pinjaman (US\$) | 379.000 | 1.415.460 |
| Jumlah penerima | 4.045 | 7.001 |
| Jumlah usaha/kelompok | 350 | 554 |
| Orang yang dipekerjakan melalui subproyek | - | 265.000 |
| Hari kerja yang dihasilkan | - | 3.500.000 |
| Dana bantuan darurat (US\$) | 4.528.898 | 4.369.310 |

* MCK: Mandi, cuci, kakus.

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) memberikan hibah langsung bagi 273 kelurahan untuk merehabilitasi dan mengembangkan infrastruktur masyarakat di kota-kota di Aceh. Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2009.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$17,96 juta |
| Masa Pelaksanaan | November 2005–Desember 2009 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pekerjaan Umum |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$17,45 juta ¹⁰ |

Partisipasi masyarakat merupakan inti kegiatan P2KP. Proyek ini mendorong pendekatan perencanaan partisipatif dari bawah ke atas (*bottom-up*) sehingga masyarakat sendiri yang menentukan inti kebutuhan untuk rekonstruksi dan kebangkitan kegiatan ekonomi. Komite lingkungan dan relawan yang dipilih secara demokratis melakukan penilaian kerusakan, menyusun rencana pengembangan masyarakat, dan memprioritaskan kegiatan yang akan didanai melalui proyek tersebut. Pemberdayaan yang dialami masyarakat dalam proses itu sangat penting bagi keberhasilan proyek.

Capaian Utama

Penerima manfaat utama proyek ini terdiri dari sekitar 697.600 orang yang tinggal di 402 kelurahan (lingkungan perkotaan) di Aceh yang dianggap paling parah terkena dampak tsunami dan gempa bumi. Penduduk di kelurahan ini mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hibah bantuan pelayanan sosial serta peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat, yang direncanakan dan dilaksanakan melalui proses pembangunan berbasis masyarakat (CDD). Berdasarkan kebutuhan, dipilihlah 273 dari 402 kelurahan yang ditargetkan untuk menerima hibah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur masyarakat.

Prestasi dalam rekonstruksi infrastruktur fisik di berbagai bidang melebihi target awal yang direncanakan. Bagian terbesar dari hibah untuk infrastruktur masyarakat yang didanai proyek dialokasikan untuk jalan dan jembatan, drainase, dan air. Sekitar 39.000 rumah tangga (sekitar 48 persen dari penduduk di 273 kelurahan yang dipilih untuk menerima hibah) menerima hibah bantuan sosial.

Proyek ini meliputi komponen khusus pemberdayaan perempuan, untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan terwakili dalam perencanaan masyarakat dan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi yang didanai hibah. Perempuan yang berpartisipasi

dalam program ini telah menunjukkan peningkatan kapasitas secara signifikan terhadap aktivitas langsung, pengelolaan proposal, penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya.

Proyek P2KP adalah salah satu dari beberapa proyek CDD dukungan MDF yang terintegrasi dan dirancang dari awal untuk bertransisi ke program nasional PNPM Mandiri Pemerintah Indonesia. Proyek ini sangat sukses dalam membantu masyarakat menyiapkan rencana tata ruang masyarakat yang diperlukan untuk memobilisasi dana tambahan dari proyek-proyek perumahan pascatsunami jenis CDD lain.

Seluruh aset rekonstruksi fisik seperti jalan, jembatan, sekolah dan fasilitas kesehatan telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Proyek ini telah merumuskan modul pelatihan dan prosedur operasi standar untuk operasi dan pemeliharaan (O&M) pascaprojek, namun memastikan adanya komitmen yang berkelanjutan terhadap O&M setelah penutupan proyek merupakan tantangan bersama dalam upaya rekonstruksi Aceh.

| <i>Hasil hingga saat penutupan proyek tanggal 31 Desember 2009</i> | <i>Target****</i> | <i>Capaian</i> |
|--|-------------------|----------------|
| Jalan yang diperbaiki/direkonstruksi (km) | 61 | 231 |
| Rekonstruksi jembatan (dalam meter)* | 6.150 | 1.382 |
| Drainase (dalam km) | 37 | 176 |
| Proyek air bersih (unit) | 79 | 4.915 |
| Fasilitas pembuangan sampah | 284 | 806 |
| Unit sanitasi | 22 | 405 |
| Gedung sekolah | 100 | 159*** |
| Bangunan balai kota/desa | 44 | 120 |
| Pos/klinik kesehatan** | 28 | 29 |
| Siswa yang menerima beasiswa | - | 3.430 |
| Nilai beasiswa (AS\$) | - | 74.043 |
| Hari kerja yang dihasilkan | - | 1.124.126 |
| Dana bantuan sosial (AS\$) | - | 1.218.374 |

* Proyek-proyek jembatan berada di bawah target karena panjang dan desain jembatan melebihi alokasi anggaran untuk masyarakat.

** Jumlah klinik kesehatan berada di bawah target karena beberapa klinik dibangun/direhabilitasi oleh lembaga lain. Anggaran yang tidak digunakan dari proyek jembatan dan klinik digunakan untuk membangun jalan yang lebih panjang dan/atau drainase.

*** Dalam beberapa kasus hanya peralatan sekolah yang diberikan, bukan pembangunan fisik.

**** Target ditetapkan di tingkat masyarakat pada saat pelaksanaan.

10 Apabila terdapat sisa dana, maka akan dikembalikan ke MDF pada saat penutupan proyek.

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN)

Proyek Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias (KRRP) memberikan hibah untuk rekonstruksi rumah, sekolah, kantor pemerintah daerah dan infrastruktur publik lainnya di Nias.

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$25,75 juta |
| Masa Pelaksanaan | Februari 2007–Juni 2011 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Dalam Negeri |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$25,75 juta |

KRRP memberikan kontribusi terhadap pemulihan daerah bencana di 126 desa di Nias dengan mendukung perencanaan dan pengelolaan rekonstruksi masyarakat di tingkat daerah, termasuk pembangunan kembali infrastruktur produktif dan pelayanan sosial. Proyek ini mengembangkan proses perencanaan partisipatif program pemulihan masyarakat dukungan MDF lain seperti PPK yang sekarang telah ditutup dan dialihkan ke program nasional PNPM Pedesaan. Proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan sektoral pemerintah kabupaten. Komponen rekonstruksi dan rehabilitasi sekolah proyek ini meliputi kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan budaya Nias yang unik.

Capaian Utama

Terdapat kemajuan yang signifikan dalam konstruksi perumahan dengan dibangunnya hampir 4.500 rumah. Pekerjaan pembangunan gedung sekolah dan kantor desa masih berlangsung. Juga terdapat banyak kemajuan dalam infrastruktur dasar masyarakat, termasuk jalan akses, jembatan, dan sistem drainase melalui pembangunan semua subproyek yang telah selesai atau sedang berjalan. Secara keseluruhan, kualitas konstruksinya baik dengan mengambil langkah yang tepat untuk memenuhi standar konstruksi yang telah diakui untuk lingkungan rawan gempa. Dalam rangka mendukung pelestarian warisan budaya, proyek ini turut membantu pengembangan bahan kurikulum setempat serta melakukan pelatihan guru dan siswa bekerjasama dengan Museum Nias serta melakukan kunjungan ke desa-desa tradisional.

Rekonstruksi di Nias sangat berat terutama karena lokasinya yang terpencil dan sulitnya akses ke banyak daerah, iklim yang basah, tanah longsor yang sering terjadi, kurangnya sumber kayu legal, buruknya kualitas infrastruktur umum pulau itu, dan kemiskinan yang meluas. KRRP telah mengatasi kesenjangan dalam kebutuhan rekonstruksi yang diidentifikasi oleh pemerintah dengan mengerjakan proyek di beberapa

bagian pulau yang paling terpencil dan sulit dicapai. Hal ini telah meningkatkan tantangan dan juga biaya proyek mengingat tingginya biaya transportasi untuk bahan bangunan ke daerah-daerah terpencil ini. Kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan fasilitator lapangan yang berkualitas, yang merupakan komponen penting bagi keberhasilan semua proyek pembangunan berbasis masyarakat, menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan proyek.

| Kemajuan hingga 30 September 2010 | Target | Capaian |
|-----------------------------------|--------|---|
| Rumah | 5.000 | 4.300 selesai 209 dalam pembangunan (491 belum dimulai) |
| Sekolah | 100 | 32 selesai 68 dalam pembangunan |
| Bangunan kantor desa | 100* | 28 selesai 82 dalam pembangunan |
| Infrastruktur dasar desa (proyek) | 147** | 96 selesai 51 dalam pembangunan |

* Target awal 100 dinaikkan menjadi 110 unit.

** Target awal 100 direvisi menjadi 147, dengan alokasi anggaran yang sama, sesuai dengan keputusan masyarakat.



Perempuan turut bekerja dalam proyek konstruksi jalan desa di Nias. Lebih dari 21.000 perempuan berpartisipasi dalam proyek PNPM R2PN yang mencakup jembatan, drainase, sistem irigasi, jalan desa dan jalan setapak

Foto: Koleksi PNPM R2PN

5. Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS)

Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh (RALAS) membantu pemerintah dalam rekonstruksi hak milik tanah, pengembangan komputerisasi sistem pengelolaan catatan tanah, dan reproduksi peta catatan tanah di Aceh pascatsunami. Proyek ini ditutup pada tanggal 30 Juni 2009.

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$28,50 juta |
| Masa Pelaksanaan | Agustus 2005–Juni 2009 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Badan Pertanahan Nasional (BPN) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$14,83 juta |

Tujuan RALAS adalah untuk mendukung rekonstruksi hak milik dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, mendukung rekonstruksi dan pembangunan lembaga pertanahan di Aceh, melalui dukungan untuk membangun kembali sistem administrasi pertanahan di provinsi ini. RALAS mengatasi kekhawatiran mengenai perlindungan hak milik dan memberikan pelatihan kepada fasilitator lokal (termasuk wakil-wakil masyarakat sipil) mengenai adjudikasi berbasis masyarakat (*Community-driven Adjudication* - CDA). Untuk mendukung pekerjaan rekonstruksi, RALAS membantu BPN dalam adjudikasi dan distribusi sertifikat hak atas tanah kepada pemilik tanah yang terkena bencana. Selain itu, proyek ini membiayai pengembangan kelembagaan melalui rekonstruksi kantor BPN dan bekerja untuk memperkuat kapasitas kantor BPN melalui otomatisasi dan komputerisasi catatan.

Capaian Utama

Banyak hasil penting dicapai oleh proyek walaupun tidak semua target terpenuhi. Proyek ini memberikan banyak manfaat nonmaterial selain kontribusinya untuk memulihkan hak atas tanah dan membangun kembali sistem administrasi tanah di provinsi ini. Pelatihan dan pembangunan kapasitas dalam CDA akan terus memberikan dampak terkait dengan penyampaian layanan sertifikat tanah dari pemerintah. Mungkin hal yang paling penting adalah peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang prosedur kepemilikan tanah yang akan berdampak pada permintaan atas layanan ini di masa depan, serta transparansi penyampaian layanan tersebut. RALAS memberi banyak kontribusi terhadap pencegahan spekulasi lahan berskala besar dan pendekatan CDA memudahkan resolusi sengketa tanah di tingkat desa. Proyek ini juga memberikan penekanan penting pada perlindungan hak milik perempuan melalui pendaftaran tanah secara bersama.

Masalah pelaksanaan proyek merupakan tantangan sepanjang berjalannya proyek. Pengelolaan yang lemah, terutama di bidang pengawasan dan penetapan arah proyek, pengadaan, perencanaan program, serta monitoring dan evaluasi menyebabkan banyak keterlambatan dan mempengaruhi kemajuan pelaksanaan secara keseluruhan. Namun, pada saat penutupan proyek, sejumlah 222.628 sertifikat tanah telah dibagikan kepada pemegang hak atas tanah. Dari jumlah tersebut 63.181 diterbitkan atas nama perempuan atau bersama-sama atas nama perempuan. Secara kumulatif, BPN telah melakukan survei atas 275.945 bidang tanah dan mengumumkan 272.912 bidang tanah. Melalui penilaian atas proyek ini diketahui bahwa penerima manfaat yang memperoleh sertifikat tanah merasa sangat puas.

| <i>Hasil hingga saat penutupan proyek 30 Juni 2009</i> | <i>Target</i> | <i>Capaian</i> |
|---|---------------|----------------|
| Jumlah sertifikat tanah yang didistribusikan (hingga Desember 2008) | 600.000 | 222.628 |
| Jumlah sertifikat tanah yang terdaftar di buku tanah | 600.000 | 238.758 |
| Jumlah bidang tanah yang diumumkan | 600.000 | 272.912 |
| Jumlah bidang tanah yang disurvei secara resmi | 600.000 | 275.945 |
| Jumlah peta tanah masyarakat yang selesai* | 600.000 | 317.170 |

** Data ini merupakan perkiraan. Meskipun data mengenai bidang tanah yang diajudikasi sama dengan data peta tanah masyarakat yang dihasilkan, hal ini tidak berarti bahwa semua bidang tanah yang menghasilkan peta tanah masyarakat akan disertifikasi.*



Penerima manfaat proyek sertifikasi tanah MDF, RALAS, membawa tiang survei untuk menandai tanahnya. Lebih dari 63.000 sertifikat tanah yang dibagikan melalui proyek ini diterbitkan atas nama perempuan atau bersama-sama.

Foto: Akil Abduljalil/Sekretariat MDF

6. Proyek Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP)

Program Pencegahan Banjir Banda Aceh (BAFMP) menegakkan kembali fungsi sistem perlindungan banjir yang rusak akibat tsunami di Banda Aceh. Proyek ini membantu melindungi daerah pusat bisnis di Banda Aceh terhadap banjir akibat air pasang dan hujan lebat. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2009.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$6,50 juta |
| Masa Pelaksanaan | Mei 2006–Desember 2009 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Muslim Aid |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$6,27 juta |

Banjir akibat air pasang dan badai hujan yang hebat merupakan tantangan konstan bagi Banda Aceh karena lokasinya di dataran banjir pantai. Selama tsunami, pintu air dan stasiun pompa yang mengurangi dampak banjir hancur, mengakibatkan banjir laut pasang di dataran rendah kota, dan menimbulkan risiko terhadap kerusakan baru pada aset-aset publik dan swasta yang baru direkonstruksi. Proyek ini dikoordinasikan dengan keseluruhan drainase dan rencana rekonstruksi penanggulangan banjir kotamadya. Katup karet banjir telah terpasang dan sistem pompa dan drainase di Zona Drainase Dua telah pulih kembali.

Capaian Utama

Sesuai dengan rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk drainase Banda Aceh, BAFMP telah membantu melindungi daerah pusat bisnis terhadap banjir. Berkat perlindungan banjir yang ditawarkan proyek ini, penduduk yang sebelumnya tinggal di daerah rawan banjir di bagian utara Banda Aceh dapat membangun kembali rumah mereka dengan cepat dan efisien.

Menjelang penutupannya, tujuan proyek telah tercapai berdasarkan alokasi anggaran. Konstruksi tiga stasiun pompa, pemasangan katup banjir, serta rekonstruksi drainase dan pekerjaan rehabilitasi telah selesai. Proyek ini mengikuti pendekatan pelaksanaan bertahap sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat dari dampak parsial saat pelaksanaan sedang berlangsung. Pada awal 2006, proyek memasang 11 katup banjir untuk mencegah banjir laut pasang dan untuk mengeringkan salah satu daerah yang paling rawan banjir di Banda Aceh. Program katup percontohan ini berhasil menghentikan air pasang dalam waktu enam bulan setelah dipasang. Perlindungan parsial terhadap banjir badai tercapai setelah 15 bulan melalui pembersihan dan perbaikan sistem yang ada, serta perlindungan penuh terhadap arus badai yang menurut rancangan lima tahun diperkirakan tercapai pada tahun 2009 setelah tiga stasiun pompa baru dibangun dan beroperasi.

Agar berfungsi dengan baik, sistem mitigasi banjir harus dijaga supaya saluran drainase dan katup tidak terganggu oleh sampah yang menumpuk. Kegiatan percontohan pengelolaan limbah yang juga merupakan bagian dari kegiatan proyek telah dimulai di beberapa desa dengan mengumpulkan dan mengangkut sampah rumah tangga ke tempat pengambilan limbah di kota. Kendaraan bermotor roda tiga digunakan dalam proses pengumpulan limbah ini. Untuk membangun kesadaran dan kapasitas daerah, masyarakat yang berpartisipasi melakukan karya wisata tentang pengelolaan limbah masyarakat, pembuatan kompos dan proyek daur ulang. Kegiatan pengelolaan sampah dalam proyek ini terkait dengan sistem pengelolaan limbah padat kota yang dimulai di bawah Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) MDF. Proyek ini juga bekerja sama dengan BAFMP untuk meminimalkan duplikasi kegiatan dan lebih meningkatkan dampak. Program pelatihan yang ditujukan untuk kesinambungan proyek, dan yang meliputi pemeliharaan dan operasi sistem, diadakan untuk operator peralatan.

| Hasil hingga saat penutupan proyek 31 Desember 2009 | Target | Capaian |
|---|------------------|---------|
| Pengurangan banjir segera melalui katup banjir | 11 | 11 |
| Sistem drainase yang direkonstruksi | | |
| • Stasiun pompa | 3 stasiun | Selesai |
| • Drainase (direkonstruksi/ direhabilitasi) | 4,4km/ 12,3km | Selesai |
| Kendaraan yang diserahkan kepada Badan Kesehatan daerah | 28 | 28 |



Stasiun pompa di Lampaseh ini adalah satu dari tiga stasiun pompa yang dibangun melalui proyek BAFMP. Fasilitas ini dirancang sesuai dengan rencana jangka panjang sistem drainase Banda Aceh. Stasiun pompa ini selesai dibangun tahun 2009.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

7. Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP)

Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IREP) memberikan perencanaan strategis, merancang infrastruktur fisik dan mendukung pelaksanaan infrastruktur untuk memberdayakan koordinasi rekonstruksi infrastruktur di Aceh dan Nias.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$42,00 juta |
| Masa Pelaksanaan | September 2006–Desember 2011 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pekerjaan Umum |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$28,55 juta |

IREP bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah untuk rekonstruksi dan kelanjutan pembangunan melalui dukungan teknis untuk perencanaan strategis, desain proyek, pelaksanaan dan pengawasan serta operasi dan pemeliharaan. Tim teknis merancang dan meninjau infrastruktur di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, serta memberikan dukungan pelaksanaan. Proyek Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) dan sumber lain membiayai pelaksanaan desain.

Capaian Utama

IREP memberikan dukungan untuk proyek-proyek IRFF dan pemerintah dalam persiapan infrastruktur yang dibiayai pemerintah. IREP mempersiapkan seluruh proyek IRFF yang berjumlah 52 dan juga memberikan masukan teknis kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengenai desain dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang akan didanai melalui sumber lain. Tanggung jawab utama IREP yang lain adalah memastikan bahwa tindakan pengamanan yang tepat

diintegrasikan ke dalam persiapan proyek dan bahwa kualitas pekerjaan infrastruktur memenuhi spesifikasi desain teknis yang disiapkan.

Setelah penutupan BRR, Tim Likuidasi dan Unit Pengelolaan Proyek Pengawasan dibentuk untuk membantu koordinasi kegiatan infrastruktur berkesinambungan untuk Aceh dan Nias. IREP juga berkontribusi terhadap kesinambungan investasi melalui dukungan pembangunan kapasitas dan teknis secara terus-menerus kepada pemerintah di berbagai tingkatan. IREP telah diperpanjang untuk memberikan dukungan berkesinambungan bagi IRFF sampai penutupannya di bulan Desember 2011.

| Hasil hingga 30 September 2010 | Capaian |
|--|---|
| Kerangka kerja pengawasan pembangunan dan rekonstruksi pascatsunami untuk Aceh dan Nias | Kerangka kerja telah selesai dan sedang diterapkan (akan ditinjau pada akhir proyek) |
| Pengembangan rencana rekonstruksi infrastruktur jangka panjang yang berkesinambungan dan strategis untuk Aceh dan Nias | Selesai dalam hubungannya dengan BRR, pemerintah daerah, dan IREP, dan digunakan dalam proyek |
| Tindakan pengamanan yang tepat diintegrasikan ke dalam persiapan proyek | Semua proyek yang dipersiapkan oleh Bank Dunia sebagai lembaga mitra termasuk kerangka kerja pengamanan dan semua proyek yang dilaksanakan di bawah IRFF mematuhi kerangka perlindungan |



Tim teknis IREP merancang dan meninjau infrastruktur pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pelabuhan Malahayati di Kabupaten Aceh Besar pada gambar di atas adalah salah satu dari lima pelabuhan yang dirancang melalui proyek ini.

Foto: Tarnizy Harva untuk MDF

8. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF)

Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur (IRFF) menyediakan dana untuk proyek-proyek rekonstruksi infrastruktur utama di Aceh dan Nias yang diidentifikasi melalui IREP. Proyek ini memberikan kontribusi bagi jaringan transportasi strategis di Aceh dan Nias sesuai dengan prioritas pemerintah.

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$136,70 juta |
| Masa Pelaksanaan | Maret 2007–Juni 2012 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pekerjaan Umum |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$72,86 juta |

IRFF menyediakan dana yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Hal ini berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan akan akses yang strategis. Kebutuhan infrastruktur di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten diidentifikasi melalui kerangka kerja IREP dan dibiayai oleh IRFF. Baik IRFF maupun IREP sangat menekankan pada pembangunan kapasitas bagi pemerintah daerah dan provinsi. Kedua proyek tersebut mendukung strategi transisi BRR. Setelah penutupan BRR, pelaksanaan proyek ini dipindahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pemerintah Indonesia menyediakan pendanaan bersama sebesar AS\$107,3 juta untuk IRFF melalui BRR.

Capaian Utama

Proyek IRFF membiayai serangkaian pekerjaan rekonstruksi infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, pelabuhan dan sistem air berkualitas tinggi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Melalui pekerjaan ini, IRFF memberikan kontribusi pada jaringan transportasi strategis di Aceh dan Nias, meskipun terdapat banyak kendala lingkungan, seperti sulitnya kondisi di daerah pegunungan, tingginya curah hujan dan banjir, serta tanahlongsor. IRFF menggunakan rencana investasi infrastruktur daerah dan strategi IREP untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaksanaan proyek. Penilaian dampak lingkungan dan rencana pengelolaan terkait menjamin adanya tindakan pengamanan lingkungan.

Subproyek di bawah IRFF pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sepanjang tahun lalu. Sebanyak 95 persen dari subproyek dalam tahap pertama IRFF sekarang telah selesai. Lima persen proyek yang tersisa sedang dalam pembangunan. Lima puluh proyek telah diselesaikan, dan dua proyek berada pada berbagai tahapan pelaksanaan. Pembiayaan tambahan sebesar AS\$37 juta disetujui tahun 2010 untuk pembuatan jalan (termasuk satu jembatan) di sepanjang pantai barat Aceh. Dokumen penawaran dipersiapkan untuk

enam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan bagian strategis jalan ini, yang akan menghubungkan Banda Aceh dan perbatasan Sumatera Utara.

| Hasil hingga 30 September 2010 | Jumlah Kontrak/ Proyek | Nilai Proyek (Juta AS\$) |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Selesai: | 50 | 173,89 |
| • Jalan nasional | 6 (185 km) | 24,03 |
| • Jalan provinsi | 9 (316,6 km) | 65,19 |
| • Jalan kabupaten | 20 (136,6 km) | 21,97 |
| • Sistem air | 11 | 30,80 |
| • Pelabuhan | 4 | 31,90 |
| Dalam penyelesaian: | 2 | 22,87 |
| • Jalan nasional | 1 (70,4 km) | 16,43 |
| • Jalan kabupaten | 1 (15,3 km) | 6,44 |
| Dalam persiapan: | 6 | 36,70 |
| • Jalan nasional | 3 (49 km) | 29,03 |
| • Jembatan (Jembatan Kuala Bubon) | 1 | 4,77 |
| • Paket konsultan | 2 | 2,90 |



Karyawan PDAM melakukan pemeriksaan untuk pemeliharaan fasilitas pemasok air bersih di Sabang, yang dibangun melalui proyek IRFF.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

9. Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang

Melalui Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang telah diperbaiki ruas jalan sepanjang 103 kilometer dari Lamno ke Calang dari bulan November 2006 sampai Desember 2007. Tujuan proyek ini adalah untuk menjamin kelancaran akses darat bagi masyarakat yang terkena dampak tsunami di pantai barat Aceh, sehingga membantu proses rekonstruksi dan pemulihan, sekaligus meningkatkan pemulihan sosial dan ekonomi. Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Desember 2007.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$1,46 juta |
| Masa Pelaksanaan | Desember 2006–Desember 2007 |
| Badan Mitra | UNDP |
| Badan Pelaksana | UNDP |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$1,46 juta |

Sebagian besar sistem jalan, terutama di pantai barat Aceh, rusak atau hancur karena tsunami 2004. Rute utama adalah jalan dari Banda Aceh ke Meulaboh. Pada tahun 2006, ruas jalan antara Lamno dan Calang berada dalam kondisi kritis karena truk dengan beban berlebih dan kurangnya pemeliharaan sering membuat jalan tidak dapat dilalui lalu lintas, terutama pada musim hujan. Proyek ini menyediakan jasa pemeliharaan berkesinambungan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi koridor pantai barat utama ini dapat beroperasi untuk jangka waktu 14 bulan.

Capaian Utama

Jalan Lamno-Calang adalah rute transportasi utama untuk materi ke pantai barat. Laporan penyelesaian proyek yang diserahkan pada tahun 2008 menyoroti pentingnya proyek pada tahap awal upaya rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Upaya pemeliharaan yang dilakukan mengurangi sampai separuh waktu tempuh perjalanan antara Lamno dan Calang, dari antara enam sampai delapan jam menjadi tiga sampai empat jam. Akibatnya, lalu lintas diperkirakan meningkat sekitar 50 persen dengan tambahan kendaraan yang beralih dari jalan lain yang berada dalam kondisi buruk.

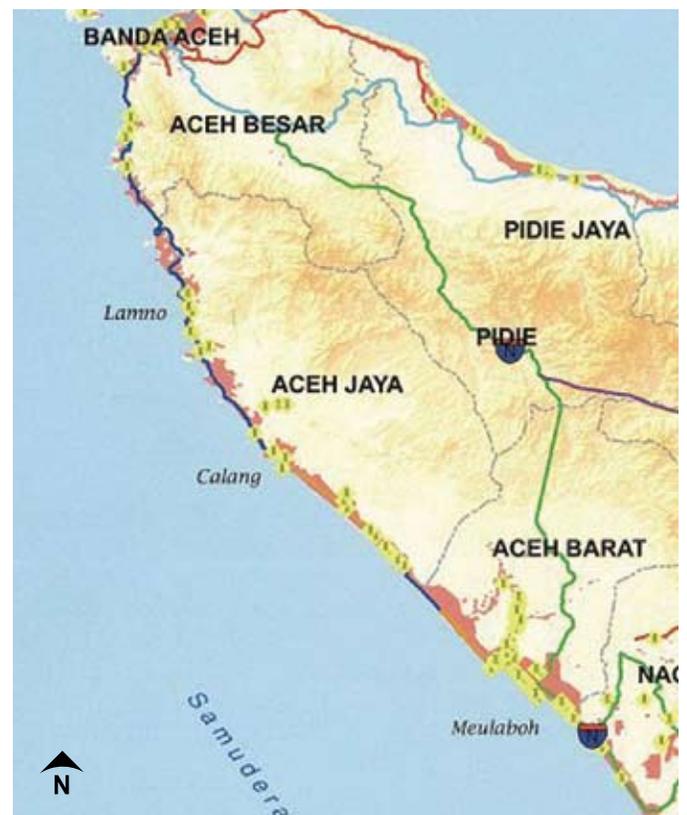
Manfaat tak terduga dari proyek tersebut adalah kedua cabang utama menyediakan akses yang jauh lebih baik ke jalan pantai bagi desa-desa yang terletak jauh dari jalan pantai, serta menyediakan alternatif, rute lebih pendek untuk mencapai Calang.

Penggunaan peralatan sewaan dan buruh harian merupakan hal yang tepat dan kemungkinan lebih disukai daripada menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor karena kerangka waktu yang pendek dan ketidakpastian pekerjaan yang diperlukan. Penggunaan tenaga kerja warga desa untuk

pekerjaan manual terbukti merupakan pendekatan hemat biaya dan meningkatkan rasa kepemilikan penduduk setempat terhadap kegiatan pemeliharaan jalan.

Kurangnya pendanaan pemerintah, keahlian dan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pemeliharaan darurat yang sangat dibutuhkan dalam jangka waktu yang terbatas menggarisbawahi pentingnya proyek ini. Proyek ini dianggap sangat berhasil dan, meskipun relatif kecil, merupakan investasi yang penting dalam mengisi kesenjangan pada proses rekonstruksi dan pemulihan.

| Hasil hingga saat penutupan proyek 31 Desember 2007 | Capaian |
|---|---------|
| Jalan batu (km) | 52 |
| Penggalan parit dan pelapisan (km) | 132 |
| Perbaikan dek jembatan (unit) | 21 |
| Pemasangan jembatan Bailey (unit) | 4 |
| Penciptaan lapangan kerja setempat jangka pendek (hari kerja) | 3.000 |



Peta ini menunjukkan ruas jalan yang dipelihara melalui Proyek Pemeliharaan Jalan Lamno-Calang.

Sumber: Seri Buku BRR, 2009

10. Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP)

Program Angkutan dan Logistik Laut (SDLP) memenuhi kebutuhan penting selama rekonstruksi dengan mendukung pengangkutan bahan rekonstruksi dan muatan lainnya ke daerah bencana, termasuk daerah terpencil di Nias dan Simeulue. Sejak tahun 2007, proyek ini telah mengalihkan fokusnya ke peningkatan kesinambungan investasi melalui program pelatihan yang komprehensif dan dukungan logistik.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$25,03 juta |
| Masa Pelaksanaan | Februari 2006–September 2011 |
| Badan Mitra | Program Pangan Dunia (WFP) |
| Badan Pelaksana | Program Pangan Dunia (WFP) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$25,03 juta |

Sejak 2005 sampai kuartal pertama 2007, SDLP menyediakan layanan pengiriman lengkap dengan tujuan utama mengoordinasikan transportasi dan pengiriman bahan rekonstruksi. Setelah pengiriman barang dialihkan ke sektor komersial, proyek berfokus pada penyediaan dukungan logistik dan pelatihan pengelolaan pelabuhan kepada staf inti di 18 pelabuhan utama Aceh.

Proyek ini menawarkan jasa dukungan dan konsultasi logistik kepada sektor swasta, badan pemerintah dan organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Aceh dan Nias, dan menjamin



Tujuan SDLP adalah memenuhi kebutuhan transportasi untuk pemulihan yang mendesak dan mendukung pemulihan sistem transportasi di Aceh dan Nias. Hal ini tercapai antara lain melalui transportasi yang efisien dan aman bagi pengiriman bahan-bahan rekonstruksi berdasarkan permintaan berbagai pemangku kepentingan.

Foto: Koleksi SDLP

operasi lanjutan yang efektif dari investasi tersebut. SDLP saat ini memulai fase baru yang berfokus pada pembangunan kapasitas melalui pelatihan, bantuan teknis dan penilaian kapasitas yang mendalam, dan terus melakukan investasi dalam transisi Aceh menuju pembangunan berkelanjutan.

Capaian Utama

Transportasi barang ke daerah terpencil di seluruh daerah yang terkena dampak, termasuk pantai di Nias dan Simeulue, merupakan manfaat utama proyek ini. Proyek ini telah mengangkut total 98.185 metrik ton/256.006 m³ muatan bantuan dan bahan rekonstruksi sejak berdiri pada tahun 2006 sampai Maret 2007.

Setelah berhasil melakukan pengiriman bahan-bahan rekonstruksi yang diperlukan ke tempat yang dimaksud, proyek ini mengalihkan fokus ke program pelatihan untuk membangun keterampilan yang diperlukan agar penerima manfaat dapat terus bekerja sampai saat ini. Modul pelatihan dalam fungsi administrasi dan dukungan untuk pelabuhan dibuat berdasarkan kurikulum internasional dan sesi pelatihan dimulai pada tanggal 16 Desember 2008. Komponen program ini melengkapi rekonstruksi pelabuhan di Aceh dan Nias melalui proyek MDF lain.

Pelatihan ini memiliki kerjasama dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) pada tingkat provinsi dan Universitas Syiah Kuala. Modul pelatihan tertentu akan dimasukkan ke dalam program bisnis pascasarjananya. Hubungan dengan universitas dan Kementerian Perhubungan dipertahankan untuk meningkatkan kesinambungan prakarsa proyek.

| <i>Kemajuan hingga 30 September 2010</i> | <i>Capaian</i> |
|---|---|
| Pengguna jasa pengiriman dan logistik sejak awal proyek: | 930 catatan dukungan logistik yang diberikan: |
| • Pemerintah Indonesia | 456 |
| • Badan PBB | 174 |
| • Sektor komersial | 168 |
| • LSM | 132 |
| Bahan rekonstruksi yang dikirimkan (sampai Desember 2006, dalam metrik ton) | 98.185 |
| Pergerakan muatan komersial yang dimonitor (sejak Oktober 2006, dalam metrik ton) | 1.200.925 |
| Sesi pelatihan pengelolaan pelabuhan yang diselenggarakan | 138 (2.063 peserta) |

11. Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP)

Program Rekonstruksi Pelabuhan (TRPRP) membantu memulihkan jaringan transportasi penting setelah terjadi tsunami dan gempa bumi dengan menyediakan desain fisik dan dukungan teknis untuk rekonstruksi pelabuhan-pelabuhan utama dan satu pelabuhan sungai. Pembangunan kembali pelabuhan-pelabuhan yang penting ini memastikan bahwa peralatan dan bahan bisa dikirim ke daerah terpencil untuk membangun kembali masyarakat dan mata pencaharian selama tahap awal rekonstruksi. Proyek ini selesai dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2007.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$3,78 juta |
| Masa Pelaksanaan | Maret 2006-Desember 2007 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$3,78 juta |

TRPRP dirancang sesuai dengan strategi pembangunan kembali pelabuhan secara keseluruhan yang telah ditetapkan oleh BRR. Selama tahap awal upaya rekonstruksi, proyek ini berfokus pada penyusunan desain terperinci, penilaian dampak lingkungan dan studi kelayakan ekonomi untuk rekonstruksi pelabuhan di pantai timur dan barat Aceh. Proyek ini juga meningkatkan fungsi dari beberapa pelabuhan melalui rehabilitasi ringan di Sabang dan pembangunan dermaga sementara di Calang dan Sinabang. Semua kegiatan dikoordinasikan dengan BRR, badan perhubungan provinsi dan kabupaten, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta melengkapi upaya yang dilakukan di pelabuhan Aceh lainnya. Kegiatan juga didasarkan pada konsultasi dengan masyarakat dan perwakilan nelayan setempat, serta pemangku kepentingan lain yang berhubungan dengan laut.

Capaian Utama

Tujuan Proyek TRPRP telah tercapai pada saat penutupan proyek sesuai dengan alokasi anggaran. Proyek ini melakukan penilaian dan kajian terhadap pelabuhan laut yang rusak atau hancur akibat tsunami di Calang, Meulaboh, dan Sinabang, dan pelabuhan sungai di Lamno, serta membuat rencana untuk mendesain ulang pelabuhan-pelabuhan ini. Di Gunung Sitoli, proyek ini meninjau desain sebelumnya sehingga pekerjaan dapat ditenderkan.

Penilaian dampak lingkungan telah usai dilakukan untuk wilayah Calang, Sinabang, Gunung Sitoli, Meulaboh dan pelabuhan Singkil. Studi kelayakan ekonomi juga telah diselesaikan untuk pelabuhan-pelabuhan ini, dan juga untuk pelabuhan Kuala Langsa. Dermaga sementara di Calang dan Sinabang telah selesai dan diserahkan kepada BRR. Pekerjaan ini menghasilkan

kondisi dermaga dan penyimpanan muatan yang lebih baik, serta banyak digunakan oleh Program Pangan Dunia (WFP) dan LSM yang beroperasi di wilayah sekitarnya.

Pembangunan kembali pelabuhan yang rusak sangatlah penting untuk membuka rute akses segera setelah terjadinya tsunami. Hal ini memungkinkan pengiriman bahan rekonstruksi dan pasokan darurat ke tempat-tempat terpencil dan menekankan pentingnya jaringan infrastruktur dasar, walaupun bersifat sementara. Hal ini terbukti memudahkan upaya tanggap darurat dan kegiatan rekonstruksi awal ke tempat-tempat yang terkena dampak.

Bagi yang terkena dampak, upaya tanggap darurat dini ini juga merupakan perwujudan komitmen pemerintah dan donor untuk mendukung upaya rekonstruksi, yang membawa harapan akan terjadinya kemajuan, pembangunan dan penciptaan lapangan kerja segera setelah terjadinya bencana.

| Hasil hingga saat penutupan proyek 31 Desember 2007 | Target | Capaian |
|--|-------------|--|
| Desain dan penilaian atas pelabuhan yang telah selesai | 4 pelabuhan | 4 desain pelabuhan, 5 Amdal, 6 penilaian ekonomi |
| Jalan batu (km) | 5 | 5 |
| Peningkatan fungsi pelabuhan | | |
| • Lokasi landasan | 2 | 1* |
| • Dermaga sementara | 2 | 2 |

* Lingkupnya dikurangi (tidak ada pekerjaan di Balohan) karena pemerintah daerah telah mengambil alih pekerjaan.



Proyek TRPRP telah berhasil membangun dermaga sementara di Calang dan Sinabang. Dermaga itu paling banyak digunakan untuk proyek SDLP dan LSM yang beroperasi di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan adanya fasilitas kargo dan akses menuju daerah yang sulit dijangkau.

Foto: Koleksi SDLP

12. Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP)

Proyek Akses Pedesaan dan Pembangunan Kapasitas Nias (RACBP) berfokus pada peningkatan jaringan transportasi pedesaan yang hemat biaya dan tahan lama di daerah gugus ekonomi tertentu di Nias melalui rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan ruas jalan inti.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$10,00 juta |
| Masa Pelaksanaan | Oktober 2009–Juni 2012 |
| Badan Mitra | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
| Badan Pelaksana | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$5,00 juta |

Proyek Nias-RACBP bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung jalan pedesaan yang strategis dalam rangka meningkatkan akses terhadap pelayanan dan fasilitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat di daerah gugus ekonomi yang ditargetkan. Proyek yang disetujui oleh Komite Pengarah MDF pada bulan September 2009 ini merupakan bagian dari kelompok terakhir proyek yang bertujuan memulihkan mata pencaharian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Nias-RACBP, bersama dengan Nias-LEDP, membangun sinergi untuk pembangunan Nias melalui penargetan strategis masyarakat di tiga gugus pertanian/ekonomi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari investasi dalam promosi produktivitas pertanian dan perbaikan akses pedesaan yang diterapkan melalui pendekatan berbasis sumber daya lokal. Kedua proyek ini akan menargetkan 21 kecamatan yang sama. Pendekatan pembangunan ramah lingkungan, seperti teknik emulsi dingin untuk pekerjaan jalan, akan digunakan.

Subkomponen warisan budaya proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan masyarakat, memudahkan penggunaan dan pelestarian aset warisan budaya unik Nias, serta melestarikan teknik konstruksi tradisional. Peningkatan kesadaran pelestarian warisan budaya, pembangunan kapasitas dan pelatihan kerja merupakan elemen kunci RACBP.

Capaian Utama

Kegiatan awal proyek telah selesai dan pelaksanaan proyek sedang berlangsung. Pelatihan, perencanaan, dan pembangunan kapasitas, di samping kegiatan-kegiatan percontohan tertentu, masih berlangsung. Lokakarya pelatihan telah dilaksanakan dan penilaian kapasitas telah selesai dilakukan. Seleksi dan pelatihan kerja bagi penyelia lokasi dalam pembangunan jalan berbasis sumber daya lokal telah dimulai. Melalui koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah, rencana infrastruktur transportasi

pedesaan strategis telah diselesaikan dalam satu gugus dan rencana untuk dua gugus lain sedang dipersiapkan. Persiapan kerja untuk ruas sepanjang 2,3 kilometer dari jalur sepeda motor diselesaikan oleh dua tim konstruksi masyarakat sebagai kegiatan percontohan, dan proses tender untuk ruas tambahan sepanjang 33 kilometer sedang berlangsung. Lokasi untuk jalur, jalan dan penyeberangan sungai telah ditetapkan, serta rumah-rumah tradisional dan struktur Megalit telah dinilai untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan pelestarian warisan budaya.

Kapasitas pemerintah daerah di Nias untuk menjaga aset-aset infrastruktur yang dibangun oleh proyek secara berkelanjutan merupakan tantangan, baik dari segi kemampuan teknis maupun sumber pendanaan. Tantangan kapasitas ini semakin besar sebagai akibat dari pemekaran Nias baru-baru ini dari dua kabupaten menjadi lima kabupaten. Karena itulah, proyek ini menekankan pada pengembangan aset yang tahan lama, berkualitas tinggi dan hanya membutuhkan perawatan yang minimal. Penilaian kebutuhan pelatihan telah dilakukan untuk memastikan bahwa strategi pelatihan yang sesuai telah dirancang dan diterapkan. Kondisi geografis dan iklim Kepulauan Nias juga memberikan hambatan terhadap pekerjaan jalan dan hal ini telah dipertimbangkan dalam rencana kerja yang disusun oleh proyek ini.

| Kemajuan hingga 30 September 2010 | Target | Capaian |
|---|--------|--|
| Pekerjaan konstruksi: | | |
| • Jalan kabupaten dan jalur sepeda motor (km) | 100 | Jalur sepeda motor (30,75 km) dan jalan (3,17 km) telah diidentifikasi |
| • Jembatan kecil dan penyeberangan sungai (meter) | 1.100 | 13 lokasi penyeberangan sungai telah dipilih untuk survei teknis |
| • Pemeliharaan rutin jalan kabupaten (km) | 80 | Pekerjaan pemeliharaan yang belum dimulai |
| Pelatihan dan Pembangunan Kapasitas: | | |
| • Pelatihan kerja (hari) | 20.600 | 912 |
| • Kelas pelatihan (hari) | 2.200 | 510 |

13. Proyek Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal Pedesaan (CBLR3)

Proyek Pembangunan Kapasitas untuk Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal (CBLR3) telah mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kontraktor dalam membangun dan memelihara jalan dengan menggunakan metode berteknologi rendah. Proyek ini merehabilitasi jalan kabupaten di lima kabupaten di Aceh dan Nias, dengan memanfaatkan sumber daya lokal serta menciptakan peluang kerja jangka pendek dan panjang.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$11,80 juta |
| Masa Pelaksanaan | Maret 2006–Juni 2011 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Organisasi Buruh Internasional (ILO) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$11,80 juta |

Proyek CBLR3 (atau Jalan ILO) melatih pemerintah daerah untuk mengelola rekonstruksi dan pemeliharaan jalan tingkat kabupaten secara efektif, dan melatih kontraktor kecil dalam membangun jalan dengan menggunakan metode berbasis sumber daya lokal yang hemat biaya. Penggunaan tenaga kerja lokal dan pemakaian teknologi konstruksi jalan serta metode kerja yang tepat memungkinkan kontraktor untuk bersaing dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan selama proses pemulihan dan seterusnya. CBLR3 diperpanjang sampai Juni 2011 untuk mempersiapkan strategi penutupan yang berkesinambungan dalam memperkuat lingkungan yang kondusif di Aceh untuk melembagakan pendekatan berbasis sumber daya lokal (LRB). Di Nias, pendekatan serupa akan dilanjutkan melalui Proyek Pembangunan Kapasitas dan Akses Pedesaan Nias (RACBP) dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang pelaksanaannya dimulai pada akhir tahun 2009.

Capaian Utama

Proyek CBLR3 bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan kontraktor lokal skala kecil untuk melakukan pekerjaan jalan. Sejauh ini upaya tersebut menunjukkan hasil yang baik. Staf dari Dinas Pekerjaan Umum di beberapa kabupaten seperti di Pidie dan Bireuen sudah mulai menggunakan lembar kerja dan mekanisme LRB dalam survei jalan untuk pekerjaan yang didanai oleh pemerintah. Program pelatihan ini menekankan sistem pemberian kontrak yang objektif dan jaminan kualitas yang menghasilkan proses tender yang transparan dan peningkatan kualitas pengawasan jalan.

Proyek ini juga memperkenalkan teknik, standar, sistem dan strategi untuk pekerjaan jalan LRB yang disesuaikan dengan kondisi di Aceh dan Nias. Peningkatan kemampuan kontraktor lokal serta staf dan penyelia dari Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan pendekatan LRB untuk pekerjaan jalan berbasis emulsi dan pengawasan lokasi telah menghasilkan output kualitas yang lebih baik. Staf dari Dinas Pekerjaan Umum di

tingkat kabupaten telah mengadopsi manual LRB, menerapkan metode LRB di jalan khusus yang tidak didanai oleh proyek, dan menggunakan metode pengujian kualitas jalan.

CBLR3 menggunakan pendekatan inklusif gender untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan pedesaan. Delapan belas kelompok perempuan dibentuk untuk melakukan kegiatan pembersihan dan penyebaran rehabilitasi jalan di empat kabupaten. Selain itu, 25 perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh 12 kelompok pemeliharaan masyarakat dari Pidie dan Bireuen. Kapasitas Tim Pelaksanaan Proyek Masyarakat di Aceh dan Nias telah meningkat dan mereka mampu melaksanakan pekerjaan sesuai keperluan.

Perpanjangan sembilan bulan tambahan menyediakan waktu untuk lebih melembagakan pendekatan LRB di berbagai badan pemerintah kabupaten untuk mempertahankan manfaat melebihi umur proyek. Penyerahan fisik jalan yang dibangun diperkirakan akan segera berlangsung.

| Hasil hingga 30 September 2010* | Target | Capaian** |
|--|---------------|------------|
| Jumlah jalan yang direhabilitasi (km) | 155,7 | 154,6 |
| Jumlah jalan yang dipelihara (km) | 177,3 | 229,5 |
| Jumlah kontraktor setempat yang dilatih (% perempuan) | 250 (30%) | 341 (1,2%) |
| Jumlah staf pemerintah daerah yang dilatih (% perempuan) | 100 (30%) | 178 (7,3%) |
| Hari kerja yang dihasilkan (% perempuan) | 430,000 (30%) | 410,345 |

* Target kurang banyak dilaporkan tahun lalu.

** Target sebanyak 30 persen peserta pelatihan perempuan terbukti tidak realistis karena industri kontraktor jalan adalah bisnis yang didominasi laki-laki. Melalui kegiatan yang ditargetkan dengan baik, proyek ini berhasil memaksimalkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pelatihan.



Warga setempat menikmati peningkatan akses menuju berbagai tempat melalui jalan di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie Jaya yang dibangun melalui proyek CBLR3 di bawah UNDP dan dilaksanakan oleh ILO.

Foto: Tarmizy Harva untuk MDF

14. Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)

Proyek Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menggunakan perencanaan dari bawah ke atas (desa, kecamatan dan antarkecamatan) serta kebutuhan analisis ke dalam perencanaan dan penganggaran kabupaten. P2DTK menghubungkan proses perencanaan partisipatif kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan pengambilan keputusan pemerintah kabupaten, serta memberikan hibah untuk memperbaiki layanan masyarakat dan pemulihan infrastruktur dasar.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$25,60 juta |
| Masa Pelaksanaan | Februari 2007–Desember 2011 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$17,93 juta |

Proyek ini menyediakan hibah bagi kabupaten di Aceh dan Nias yang dapat digunakan untuk proyek-proyek di tingkat kecamatan yang diidentifikasi melalui mekanisme perencanaan PPK/PNPM. P2DTK bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dan mendorong pengembangan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur.

Capaian Utama

P2DTK menyediakan hibah bagi kabupaten senilai hingga AS\$50,000 untuk mendukung proyek yang berasal dari proses perencanaan kecamatan yang memberi kontribusi pada rekonstruksi, rekonsiliasi, dan pembangunan. Tiga puluh persen dari hibah ini dicadangkan untuk mendukung peningkatan kualitas dalam kesehatan dan pendidikan. Hingga tanggal 30 September 2010, sejumlah 883 subproyek di Aceh dan Nias telah selesai dilaksanakan. Jumlah ini mencakup 375 subproyek untuk infrastruktur (42 persen), 266 untuk pendidikan (30 persen), dan 242 untuk kesehatan (28 persen). Keterlibatan kelompok rentan, terutama perempuan, dalam proses perencanaan masyarakat dan kegiatan pelatihan telah mencapai 30 persen, dan sampai 50 persen di beberapa lokasi.

Melalui gabungan pelatihan, latihan praktis, dukungan teknis profesional, dan pembentukan jaringan pembelajaran, P2DTK membangun kapasitas di tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk memanfaatkan mekanisme yang ada dan mendorong pendekatan yang harmonis dan pragmatis, P2DTK menyediakan pembiayaan untuk memperluas Proyek Dukungan untuk Pemerintah Daerah yang didanai USAID (LGSP) untuk membangun kapasitas di sepuluh kabupaten Aceh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pelaksanaan proyek Tata Kelola Ekonomi P2DTK di

Aceh (P2DTK-EGA), yang didanai bersama oleh MDF dan DFID, telah meningkatkan iklim usaha setempat di kabupaten sasaran. P2DTK-EGA juga telah memberikan inspirasi pada pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik—partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan—pada aspek lain pelayanan masyarakat.

| Hasil hingga 30 September 2010 | Target | Capaian |
|---|---|---|
| Kabupaten yang menggunakan proses perencanaan partisipatif untuk penganggaran dan pembiayaan kegiatan pembangunan | Lebih dari 80% | 100% kabupaten sekarang berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Mmusrenbang) dan P2DTK memberi masukan bagi proses ini dan membantu membangun kapasitas. |
| Subproyek yang diusulkan dan didanai di semua kabupaten yang berjumlah 19 | Berdasarkan penilaian kebutuhan oleh masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Jalan (777 unit/195,6 km) Jembatan (132 unit/5,6 km) Drainase (206 unit/11,5 km) Irigasi (70 unit/6,5 km) Air bersih (373 unit) Rehabilitasi sekolah (50 unit) Klinik kesehatan desa (54) |
| Pelaksanaan pendidikan/kegiatan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan | Berdasarkan penilaian kebutuhan oleh masyarakat | <p>Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan (295) Rehabilitasi klinik kesehatan (55) <p>Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pengelolaan berbasis sekolah (49) |



P2DTK mendukung rehabilitasi sekolah dan memberikan pelatihan manajemen berbasis sekolah bagi para guru di desa-desa.

Foto: Akil Abduljalil/Sekretariat MDF

15. Program Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil di Aceh dan Nias (CSO)

Proyek Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) membangun kapasitas teknis dan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) di Aceh dan Nias. Hibah kecil memungkinkan LSM dan CBO terlibat dalam kegiatan rekonstruksi yang berorientasi pada kebutuhan. Proyek ini ditutup pada tanggal 31 Mei 2010.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$6,00 juta |
| Masa Pelaksanaan | Februari 2007–Mei 2010 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$6,00 juta |

Proyek CSO memperkuat kapasitas CSO dan CBO di Aceh dan Nias. Pusat Pembelajaran Masyarakat Sipil (CSRC) yang didirikan di Aceh dan Nias memberikan landasan bagi pemerintah daerah dan CSO untuk berinteraksi. CSO/CBO didorong untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan bersaing untuk mendapatkan hibah kecil dalam mendukung prakarsa seperti pembangunan kembali pelayanan sosial dasar, pemberdayaan perempuan dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Capaian Utama

Proyek CSO membentuk kelembagaan yang efektif untuk memudahkan konsultasi dan kerja sama di antara para pemangku kepentingan dan pendukung peningkatan peran CSO dalam pembangunan kembali Aceh dan Nias pascabencana. Satu Tim Koordinasi Provinsi dan 13 Kelompok Kerja Teknis dibentuk di Aceh, sementara dua Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk di Nias. Badan-badan ini terlibat dalam pemilihan proposal, pemantauan pelaksanaan proyek, dan pemberian fasilitas pemantauan berbasis masyarakat atas kegiatan rekonstruksi.

Proyek CSO berperan penting dalam membentuk dua CSRC, yaitu IMPACT di Aceh dan FORNIHA di Nias. Kedua CSRC ini memungkinkan masyarakat dan organisasi sipil untuk menyampaikan kebutuhan kelembagaan dan individual mereka secara lebih efektif. Masyarakat sekarang juga memiliki landasan untuk melobi pemerintah mengenai prioritas dan kebutuhan pembangunan. Melalui pelatihan dan pembinaan, CSRC menciptakan jaringan CSO yang luas di Aceh dan Nias, dengan daftar yang memuat lebih dari 100 fasilitator terlatih yang siap untuk penyebaran cepat.

Proyek ini melatih lebih dari 200 CSO/CBO di Aceh dan Nias dalam serangkaian “kompetensi” pengembangan masyarakat yang mencakup pemantauan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengelolaan proyek, perencanaan strategis, kepemimpinan,

dan isu-isu yang berkaitan dengan gender. Proyek CSO memperkenalkan pemantauan berbasis masyarakat yang memudahkan pemantauan proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh masyarakat, serta menciptakan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berinteraksi tentang isu-isu dan masalah yang dihadapi selama rekonstruksi.

Hibah kecil untuk CSO telah meningkatkan pelayanan sosial dasar, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan perempuan. Dalam beberapa kasus, hibah kecil digunakan untuk fasilitas sosial masyarakat, termasuk fasilitas anak usia dini di Nias dan Aceh serta penyediaan air bersih di Nias. Hibah kecil lainnya mendukung peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti peternakan kambing, produksi kerajinan tangan limbah kayu setempat dan pertanian cabai di Aceh, serta pertanian kakao dan peternakan babi di Nias. Secara keseluruhan, kegiatan perempuan yang didukung proyek CSO telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat serta menyediakan modal finansial dan sosial yang diperlukan untuk memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pendapatan.

| Hasil hingga saat penutupan proyek 31 Mei 2010 | Target | Capaian |
|--|--------|---------------------------|
| Hibah kecil yang diberikan/nilai hibah | 141 | 142/ AS\$2.380.477,34* |
| Penerima manfaat hibah mata pencaharian | – | 33.398 (14.764 perempuan) |
| Staf CSRC yang dilatih (pelatihan pelatih) | – | 83 (25 perempuan) |
| Staf CSO yang dilatih | – | 1.100 (324 perempuan) |

* Berdasarkan nilai akhir dari 142 prakarsa hibah kecil pada akhir proyek.



Proyek CSO menyediakan hibah kecil untuk membangun kapasitas CBO. Salah satu hibah ini adalah untuk meningkatkan produksi ternak seperti imunisasi kambing di Singkil.

Foto: Koleksi Muslim Aid untuk Proyek CSO

16. Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP)

Proyek Hutan dan Lingkungan Aceh (AFEP) membantu melindungi ekosistem hutan Leuser dan Ulu Masen Aceh dari pembalakan liar. Perlindungan area seluas 3,3 juta hektar ini akan menjaga pasokan air untuk 60 persen penduduk Aceh, dan sumber keanekaragaman hayati terkaya di Asia Tenggara yang masih tersisa. Tanggal penutupan proyek ini telah diperpanjang sampai 30 Juni 2011.

| | |
|------------------------------------|---|
| Jumlah Hibah | AS\$17,53 juta |
| Masa Pelaksanaan | Februari 2006–Juni 2011 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Yayasan Leuser Internasional (LIF) dan Fauna and Flora International (FFI) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$16,93 juta |

AFEP bekerja di ekosistem Ulu Masen dan Leuser Aceh untuk mengurangi dampak negatif rekonstruksi terhadap hutan Aceh dengan memasukkan masalah lingkungan ke dalam proses perencanaan Aceh, dan membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat untuk melindungi sumber daya hutan. Proyek ini juga bekerja untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat di daerah hutan melalui pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar.

Capaian Utama

Proyek ini terus berfokus pada pemantauan dan pelaporan kegiatan hutan ilegal, pelatihan dan pelengkapan polisi kehutanan dan masyarakat penjaga hutan, pengurangan konflik antara manusia dan satwa liar, serta penguatan kapasitas pengelolaan hutan. Termasuk di dalamnya adalah perluasan program masyarakat penjaga hutan yang memberikan pekerjaan alternatif ramah lingkungan bagi mantan kombatan, penebang dan pemburu liar di Ulu Masen. Program ini juga mencakup kelanjutan kegiatan Tim Pemantau Desa di ekosistem Leuser. Proyek ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap proses perencanaan tata ruang Aceh yang memasukkan pertimbangan lingkungan.

Proyek ini mempromosikan perlindungan yang efektif dan pengelolaan hutan Leuser dan Ulu Masen yang berkesinambungan. Koordinasi dan dukungan bagi forum berbagai pemangku kepentingan untuk pengelolaan hutan, serta pemantauan berbagai pemangku kepentingan dan jaringan penegakan hukum yang dibuat dalam proyek ini dilanjutkan dengan persiapan penyerahan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Sampai saat ini, lebih dari 329 laporan kasus pembalakan liar telah ditindaklanjuti oleh polisi.

Proyek ini juga memasukkan masalah-masalah lingkungan ke dalam proses rekonstruksi dan pembangunan di Aceh. AFEP mendukung prakarsa Aceh Hijau dari pemerintah provinsi dan melanjutkan pelatihan mitra setempat untuk mengembangkan dan menerapkan metode berteknologi rendah secara mandiri untuk melindungi tanah pertanian dan panen dari gajah dan satwa liar lainnya.

Sekarang dalam tahun terakhir pelaksanaannya, AFEP memprioritaskan dukungan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kesinambungan dampak pascaprojek untuk secara bertahap mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pemerintah Aceh.

AFEP telah mengembangkan kurikulum dan bahan mengenai kesadaran lingkungan untuk sekolah, melatih guru, dan mendirikan klub lingkungan untuk siswa dengan lebih dari 6.100 anggota di seluruh Aceh. Proyek ini telah mendukung proses perencanaan tata ruang tingkat desa dan mukim dan memulai pembibitan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan mata pencaharian berbasis tanaman keras. Proyek ini sekarang berfokus pada pengalihan kegiatan ini ke mitra setempat untuk memastikan kesinambungannya.

| Kemajuan hingga 30 September 2010 | Target | Capaian |
|--|---|--|
| Rancangan rencana tata ruang yang mencerminkan input lingkungan dan konservasi | 1 Provinsi 7 Kabupaten | 2 Provinsi 10 Kabupaten |
| Kesepakatan tingkat daerah serta undang-undang mengenai pengelolaan hutan dan konservasi yang dikembangkan | Ulu Masen: 10 Mukim Leuser: 30 Gampong* | Ulu Masen: 11 Mukim Leuser: 27 Gampong |
| Guru sekolah dilatih dan dibekali bahan-bahan kurikulum lingkungan dan konservasi | 500 | 1.007 (65% perempuan) |
| Pembibitan yang didirikan dan operasional | 50 | 55 |
| Area hutan yang direboisasi/dipulihkan (dalam hektar) | 5.000 | 5.238 |

* Gampong: kata yang digunakan di Aceh untuk desa.

17. Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP)

Program Pengolahan Limbah Tsunami (TRWMP) membangun kapasitas pemerintah daerah untuk membersihkan, mendaur ulang dan membuang sampah tsunami; menerapkan sistem pengelolaan limbah berkesinambungan yang menguntungkan lingkungan melalui pengumpulan, pemulihan, daur ulang dan pembuangan limbah yang aman, serta mempromosikan mata pencaharian yang berhubungan dengan pengelolaan limbah. Tanggal penutupan proyek telah diperpanjang sampai 30 Juni 2012.

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Jumlah Hibah | AS\$39,40 juta |
| Masa Pelaksanaan | Desember 2005–Juni 2012 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$31,41 juta |

TRWMP dirancang untuk memberikan tanggapan terkoordinasi terhadap masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan terkait dengan puing-puing tsunami/gempa dan pengelolaan limbah kota selama rehabilitasi dan pemulihan Aceh dan Nias. Program ini berfokus pada pengumpulan sampah tsunami dan pembersihan lahan, pembangunan kapasitas unit yang menangani pembersihan limbah padat kabupaten/kota dan penciptaan kesempatan mata pencaharian berdasarkan pengelolaan sampah yang berkesinambungan. Program ini didanai dan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap Ketiga sekarang memperluas kegiatan pembangunan kapasitas untuk memastikan adanya infrastruktur dan layanan pengelolaan limbah padat yang berkesinambungan setelah proyek ditutup. Prakarsa rintisan ini menyoroti sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian di Indonesia.

Capaian Utama

Tahap Pertama proyek berfokus pada kegiatan pemulihan pascabencana, termasuk menciptakan lapangan kerja sesegera mungkin, memulai kembali layanan penting, membersihkan puing-puing dan memulihkan bahan yang dapat didaur ulang untuk digunakan selama proses rehabilitasi dan pemulihan, serta melanjutkan pengumpulan sampah di delapan kabupaten/kota di Aceh dan Nias untuk mengurangi potensi risiko lingkungan dan kesehatan. Selama Tahap Kedua, program bertujuan untuk menjaga investasi dengan membangun secara berkesinambungan dalam intervensi program dan memperluas cakupan ke 13 kabupaten. Tahap Ketiga akan mencakup pembangunan dua tempat pembuangan sampah permanen yang diprioritaskan, pembangunan empat fasilitas lain dalam kemitraan dengan departemen/ dinas pekerjaan umum tingkat nasional dan provinsi, serta kemungkinan pembangunan empat tempat pembuangan sampah lain dan pekerjaan rehabilitasi penting lainnya secara terbatas. TRWMP terus mendukung kegiatan mata pencaharian terkait pengelolaan limbah dan

pembangunan kapasitas dalam pengelolaan limbah padat bagi pemerintah daerah.

Proyek ini bermitra dengan UN-HABITAT untuk memberikan paket pelatihan pembangunan kapasitas selama 18 bulan bagi pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah padat. Pembangunan satu tempat pembuangan akhir regional permanen untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, satu tempat pembuangan akhir kabupaten di Nias dan perancangan delapan tempat pembuangan akhir kabupaten lain sedang dalam proses pengadaan. Proyek ini memulai skema layanan berbayar percontohan untuk pengumpulan sampah, dengan total 22.947 rumah tangga yang berpartisipasi. Pemerintah daerah telah memperluas proyek percontohan TRWMP dengan menambah 16.123 rumah tangga dan 510 lembaga masyarakat untuk diikutsertakan ke dalam skema pemulihan berbayar yang dijalankan kabupaten.

TRWMP juga bermitra dengan Terre des Hommes-Italia (TDH-I) untuk mendukung mata pencaharian dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah. Dalam kemitraan dengan TDH-I, TRWMP memperkuat pengelolaan sampah dan kegiatan daur ulang usaha kecil dan menengah terpilih atau organisasi berbasis masyarakat.

| Hasil hingga 30 September 2010 | Target | Capaian |
|--|--------|---------|
| Jumlah tempat pembuangan sampah yang ditutup atau ditingkatkan menjadi tempat pembuangan akhir saniter. | 10 | 10 |
| Rumah tangga yang membayar untuk pengumpulan sampah rumah tangga atau masyarakat (persen per kabupaten) | 30 | 16 |
| Jumlah usaha kecil & menengah (UKM) dengan mata pencaharian berkesinambungan yang terbentuk di sektor pengelolaan limbah | 140 | 161 |



Eka, 28, memulung plastik untuk didaur ulang. TRWMP memberikan tanggapan terkoordinasi terhadap masalah kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari puing-puing tsunami dan gempa bumi, serta limbah kota.

Foto: Abbie Traylor-Smith/Panos Pictures/Department for International Development (Inggris)

18. Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas

Proyek Bantuan Teknis (TA) mendukung BRR dan Bappenas untuk melaksanakan mandatnya dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengoordinasikan proses pemulihan secara efisien dengan memberikan dukungan teknis dan layanan utama sampai penutupan BRR pada bulan April 2009. Proyek ini diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2012 untuk memberikan dukungan bagi Bappenas dalam peran koordinasinya serta untuk membantu Bappeda tingkat provinsi di Aceh dan Sumatera Utara untuk mengoordinasikan dan menyelesaikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersisa di Aceh dan Nias.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$24,48 juta |
| Masa Pelaksanaan | Juli 2005–Juni 2012 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | BRR (sampai April 2009), Bappenas (sejak April 2009) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$24,48 juta |

Proyek bantuan teknis untuk BRR ini dirancang agar dapat menanggapi dengan cepat kebutuhan teknis dan operasional BRR dari Juli 2005 sampai April 2009. Proyek ini telah dilaksanakan dalam tiga tahap, dan diganti namanya pada Mei 2009 seiring dengan penyerahan fungsi koordinasi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca BRR di Aceh dan Nias kepada Bappenas. Pada bulan Februari 2010, Komite Pengarah menyetujui Tahap Ketiga, khususnya untuk mendukung Bappenas dan Bappeda Aceh dan Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Kelanjutan Rekonstruksi Aceh-Nias 2010-2012 ("Rencana Aksi 2010-2012"). Bappenas secara internal menyebut Tahap Ketiga sebagai Proyek Bantuan Teknis untuk Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Koordinasi Lanjutan (TS to R2C3).

Capaian Utama

Tahap Pertama dan Kedua memberikan bantuan teknis dan dukungan operasional bagi BRR untuk mencapai mandatnya secara transparan dan tepat waktu. Hal ini mencakup perkembangan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, kerangka hukum, dan proyek/program, penilaian proposal yang diajukan oleh organisasi lain, dan pengembangan alat dan kapasitas untuk memantau pelaksanaan program rekonstruksi secara keseluruhan. Proyek ini juga telah mendukung pengembangan 217 strategi/kebijakan/panduan, meninjau 192 proposal, dan memantau 284 proyek.

Sebagian besar kegiatan yang direncanakan untuk mendukung BRR telah diselesaikan pada saat proyek ditutup pada bulan April 2009, tapi dukungan dilanjutkan untuk penyelesaian dan pengoperasian tiga sistem informasi manajemen (MIS)

utama untuk program pemulihan Aceh-Nias. RAND (Basis Data Pemulihan Aceh-Nias) menyediakan kumpulan data untuk memantau dan mengoordinasikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh organisasi eksternal. Pusat KNOW menyimpan informasi tentang upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias yang dilakukan oleh pemerintah, donor, dan pemangku kepentingan lainnya, dan memetik pelajaran dari kegiatan itu. SIMBADA adalah sistem informasi manajemen aset untuk melacak aset yang diciptakan selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. Bappenas menjaga sistem ini untuk memastikan bahwa setiap sistem dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan bagi kesinambungan operasi dan pemeliharaan untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan dan data yang dihasilkan selama upaya pemulihan di Aceh dan Nias.

Selain mendukung kebijakan dan pengembangan prosedur terkait bencana, dukungan teknis untuk BRR dan Bappenas juga memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan dan merintis perampingan proses analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang dilakukan pada Tahap Kedua. Analisis terhadap gugus yang terkait dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sangat relevan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta menetapkan standar nasional masa depan untuk perencanaan lingkungan dan proses pembangunan.

Selama masa transisi dari BRR kepada Bappenas, proyek ini mendukung finalisasi dokumen hukum Rencana Aksi 2010-2012 yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Tahap Ketiga memberikan dukungan kepada Bappenas dan Bappeda Aceh dan Sumatera Utara untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan Rencana Aksi.



Bappenas memainkan peran koordinasi untuk menagajak pemangku kepentingan duduk bersama agar dapat menyelesaikan agenda rekonstruksi Aceh-Nias dan Rencana Aksi Kelanjutan Rekonstruksi dan Rehabilitasi 2010–2012.

Foto: Koleksi Proyek TA untuk BRR dan Bappenas

19. Membuat Aceh Lebih Aman Melalui Pengurangan Risiko Bencana dalam Pembangunan (DRR-A)

DRR-A dirancang untuk menetapkan pengurangan risiko bencana (PRB) yang merupakan bagian normal dari proses pembangunan dalam fungsi inti pemerintah daerah Aceh serta mitra publik dan swasta, khususnya masyarakat setempat Aceh. Melalui proyek ini tindakan yang paling efektif dan langsung dapat diambil untuk mengurangi kerentanan fisik, ekonomi dan sosial terhadap bencana.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$9,87 juta |
| Masa Pelaksanaan | November 2008–Desember 2011 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$5 juta |

Proyek DRR-A berupaya memasukkan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam fungsi utama badan pemerintah daerah Aceh, mitra publik dan swasta, masyarakat dan keluarga setempat, sambil memperhitungkan berbagai kapasitas, kebutuhan, dan kerentanan penduduk. DRR-A akan menetapkan pengaturan kelembagaan, dan lingkungan yang memungkinkan untuk memudahkan pelaksanaan partisipatif pengurangan risiko bencana (PRB), yang melibatkan pembentukan lembaga daerah serta penggunaan program kesadaran masyarakat dan proyek yang peka terhadap gender.

Capaian Utama

Dalam rangka menyediakan lingkungan yang mendukung pelembagaan tindakan PRB, proyek DRR-A mencurahkan sebagian besar upayanya untuk menyusun dan memudahkan tinjauan resmi dan persetujuan atas berbagai instrumen hukum dan peraturan. Proyek DRR-A mendukung pembuatan Rencana Aksi Daerah PRB, Komite Koordinasi Kesadaran Publik (PACC), dan pembuatan peraturan (Pergub No. 102/2009) yang menetapkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Proyek ini juga berhasil memasukkan PRB ke dalam rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang Aceh.

Proyek ini peka terhadap gender dalam konteks PRB. Sepuluh kabupaten yang paling rawan bencana dipilih sebagai lokasi percontohan untuk melaksanakan PRB berbasis masyarakat dan peka terhadap gender. DRR-A juga menyediakan keahlian teknis dalam pembuatan prosedur operasi standar untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) di Aceh dalam rancangan Peraturan Gubernur (Pergub).

Proyek DRR-A membuat banyak kemajuan dalam satu tahun terakhir melalui penandatanganan perjanjian dengan berbagai badan pemerintah provinsi. Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi

Bencana (TDMRC) didirikan di Universitas Syiah Kuala yang berfungsi sebagai “wadah pemikir” PRB untuk Pemerintah Aceh. Proyek ini membentuk berbagai kemitraan dengan pemerintah, media, LSM, dan akademisi serta mendorong kepemilikan atas agenda PRB di semua badan provinsi.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PRB, proyek ini berperan penting dalam membentuk PACC yang telah menarik partisipasi dari sekitar 20 organisasi/badan, termasuk sektor media dan agama. Survei mengenai kesadaran publik atas PRB telah direncanakan untuk mengukur kebutuhan dan kapasitas PACC secara lebih baik.



Anak-anak mengikuti lomba menggambar yang diselenggarakan oleh DRR-A dalam rangka peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana di Banda Aceh, Oktober 2010.

Foto: Fakhrurrazi/UNDP

20. Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP)

Program Transformasi Pemerintah Aceh (AGTP) memberikan dukungan strategis dan penting selama masa transisi dengan memastikan bahwa pemerintah provinsi memiliki kapasitas dan kekuatan kelembagaan yang diperlukan untuk mengambil alih proyek, aset, fungsi, kapasitas dan sumber daya BRR pada akhir mandatnya.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$13,98 juta |
| Masa Pelaksanaan | Juli 2008–Desember 2011 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$13,98 juta |

AGTP memberikan dukungan kepada pemerintah provinsi saat mereka mengambil alih tanggung jawab untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah penutupan BRR. AGTP berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah provinsi melalui dukungan pembuatan kebijakan, proses anggaran pemerintah daerah, pengalihan aset kepada lembaga setempat dan prakarsa antikorupsi.

Capaian Utama

AGTP memberikan dukungan bagi peningkatan kapasitas lembaga eksekutif provinsi untuk menciptakan kerangka kelembagaan dan kebijakan demi keberhasilan transisi dan



Staf Bappeda memproses data RAND di kantor mereka di Banda Aceh.

Foto: Irwansyah Putra untuk MDF

pemulihan melalui penyediaan penasihat teknis (Tim Asistensi). Pendekatan ini menghasilkan 13 dari 16 proses yang ditargetkan/kebijakan yang disetujui oleh lembaga eksekutif provinsi dan enam dari enam proses/prosedur koordinasi yang diberlakukan di jajaran kementerian yang ditargetkan di tingkat provinsi. Satu tahun setelah para penasihat menyelesaikan tugas mereka, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Provinsi, misalnya, telah memperoleh pendanaan untuk pembentukan dan operasi Pusat Pengelolaan Informasi yang baru untuk mempromosikan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-governance*) dengan menyatukan sistem informasi yang dikembangkan oleh BRR untuk memudahkan akses publik terhadap informasi, sejalan dengan UU No. 14/2008.

AGTP memberikan dukungan pembangunan kapasitas operasional untuk badan pemerintah provinsi utama agar dapat memenuhi tanggung jawab transisi dan pemulihan mereka secara efektif. Proyek ini membantu pelaksanaan Penilaian Kebutuhan Pembangunan Kapasitas UNDP dan Rencana Pembangunan Kapasitas (CDP) di badan yang dipilih. Badan-badan ini telah memulai proses pengembangan CDP jangka pendek dan jangka panjang mereka untuk dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran dan perencanaan provinsi. Dengan dukungan proyek, badan sasaran telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan "Rencana Aksi Percepatan Pembangunan" sesuai dengan Keputusan Presiden No. 47/2008.

Untuk menjamin kesinambungan proyek dan untuk membangun kapasitas dalam jangka panjang, AGTP mendukung Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tingkat provinsi untuk mempertahankan, mengelola dan mentransfer pengetahuan dan keterampilan bagi badan tingkat provinsi dan kabupaten demi keberhasilan transisi yang berkesinambungan. Proyek ini membantu penyusunan program pengembangan fakultas BKPP dan pengembangan anggaran yang berfokus pada empat bidang yang diidentifikasi dalam rencana strategi BKPP—pengelolaan aset, gender, resolusi konflik serta perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, AGTP memudahkan akreditasi staf BKPP oleh Lembaga Administrasi Nasional (LAN) melalui kelas pelatihan intensif 100 jam.

AGTP memberikan dukungan teknis bagi Pemerintah Aceh untuk melakukan verifikasi atas seluruh aset yang diterima dari BRR. Kegiatan verifikasi di tingkat kabupaten masih harus diselesaikan. Tanpa penerimaan formal atas aset dari pemerintah pusat, operasi dan anggaran pemeliharaan tidak akan dapat dilakukan, sehingga mengakibatkan kemungkinan memburuknya kondisi investasi atau aset yang telah dibangun atau diberikan setelah terjadinya bencana tsunami.

21. Program Transisi Kepulauan Nias (NITP)

Program Transisi Kepulauan Nias (NITP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kabupaten untuk menyelesaikan proses pemulihan dan mengelola tanggung jawab pemerintah daerah yang sedang berlangsung, menerapkan praktik terbaik yang meningkatkan tata kelola dan mengurangi risiko dari bencana alam di masa depan.

| | |
|------------------------------------|---|
| Jumlah Hibah | AS\$3,89 juta |
| Masa Pelaksanaan | April 2009–Desember 2011 |
| Badan Mitra | Program Pembangunan PBB (UNDP) |
| Badan Pelaksana | Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di Nias |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$2,5 juta |

NITP memanfaatkan karya BRR serta proyek dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi lain untuk memudahkan transisi dari pelaksanaan BRR ke pemulihan yang sedang berlangsung di Kepulauan Nias. NITP mendukung pelaksanaan kegiatan yang didanai Pemerintah Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten serta pengembangan dan pelaksanaan DRR secara proaktif dalam struktur Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dan LSM pendukung. Sebagian besar pekerjaan proyek ini didedikasikan untuk membangun kapasitas, terutama yang berkaitan dengan pengalihan aset kepada pihak berwenang terkait. NITP bekerja sama erat dengan dua proyek lain yang didanai MDF, yaitu AGTP dan Proyek Bantuan Teknis (TA) untuk BRR dan Bappenas dalam mendukung dan memudahkan verifikasi aset dan proses transfer.

Capaian Utama

NITP memberikan dukungan untuk menyelesaikan transisi dari pelaksanaan BRR kepada pengelolaan pemerintah daerah. Diberikan perhatian besar untuk mendukung BKR¹¹ dalam mempersiapkan Rencana Aksi 2010–2012 sebagai dasar pembuatan program transisi. Sistem yang utama telah diadopsi oleh badan terkait, dan pelatihan mengenai perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi proyek transisi sedang berlangsung.

Untuk mempercepat penyelesaian prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah transisi, NITP bekerja erat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memprioritaskan pengelolaan yang efektif atas aset rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk penganggaran untuk kesinambungan operasi dan

pemeliharaan. NITP memberikan bantuan dalam penyusunan instrumen hukum (Perda) atas sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan aset serta memudahkan pelaksanaan sistem manajemen keuangan daerah baru (SIPKD-Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sesuai dengan Edaran Kementerian Dalam Negeri No. SE.900/294/BAAKD.

NITP membantu Bupati Nias mendirikan Kelompok Kerja Khusus Pengelolaan Bencana untuk memperdalam pelembagaan PRB dalam proses pemerintah daerah di masa depan. Kelompok Kerja berada di bawah pengawasan Bappeda Nias dan telah menyelesaikan rancangan peraturan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Nias. Semua kabupaten di Nias telah sepakat untuk memasukkan PRB dan peta bahaya dalam rencana tata ruang masing-masing.

Penyelesaian pengalihan aset rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tantangan besar yang memerlukan koordinasi yang intensif dan tepat waktu dari berbagai tingkat pemerintahan serta berbagai kementerian dan departemen. Hal ini semakin diperumit dengan pembentukan tiga kabupaten baru di Nias pada Januari 2010. Transfer aset tertunda karena pemekaran tersebut.



Pelatihan di tempat kerja diberikan untuk mengajarkan penggunaan pangkalan data manajemen SIMBADA.

Foto: Koleksi UNDP

11 BKR: Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias adalah badan koordinasi tingkat provinsi untuk rekonstruksi di Nias. Mitranya di Aceh adalah BKRA (Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh) dan di tingkat pusat BKRN (Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh dan Nias).

22. Fasilitas Pendanaan Pengembangan Ekonomi (EDFF)

Fasilitas Pendanaan Pengembangan Ekonomi (EDFF) mendukung prakarsa subproyek untuk pembangunan ekonomi Aceh dan memberikan bantuan untuk Pemerintah Aceh dalam pengelolaan proyek dan pembangunan kapasitas.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$50,00 juta |
| Masa Pelaksanaan | Maret 2009–Juni 2012 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) dan Pemerintah Aceh |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$18,98 juta |

EDFF mempromosikan pemulihan ekonomi pascatsunami dan mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang berkesinambungan yang adil di Aceh sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi Pemerintah Aceh. Proyek ini bertujuan untuk membangun lingkungan usaha yang lebih bersaing dan suportif yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan dan peluang kerja sektor swasta yang luas, yang menargetkan kelompok miskin dan rentan lainnya. Proyek ini menyediakan hibah untuk menciptakan peluang pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan di sektor swasta.

Capaian Utama

EDFF memberikan hibah subproyek (AS\$44,5 juta dari total anggaran) kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terpilih untuk melaksanakan kegiatan penanganan isu-isu penting yang memengaruhi pembangunan ekonomi di Aceh. Permintaan



Koperasi perempuan di Desa Daya Beure'eh, Kabupaten Pidie mendapat bantuan dari LSM lokal, yaitu CCA dan PASKA, melalui hibah dari EDFF. Perempuan ini sedang membuat emping secara tradisional. Proyek ini akan memperkuat koperasi dan menyediakan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan produksi.

Foto: Vicki Peterson/Tim Proyek EDFF

proposal dikeluarkan dan delapan subproyek dipilih dari 121 proposal yang diajukan oleh komite pemilih, dengan masukan dari pemerintah daerah, sesuai dengan kriteria pemilihan transparan yang disepakati. Pada tanggal 30 September 2010, Perjanjian Hibah Subproyek di bawah EDFF telah ditandatangani oleh lima LSM: *Canadian Cooperative Association (CCA)*; *Action Aid Australia (AAA)*, *Swisscontact*, *Muslim Aid*, dan *Islamic Relief*. Tiga perjanjian hibah subproyek tambahan ditandatangani setelah 30 September dengan *Aceh Development Fund (ADF)*, *International Organization for Migration (IOM)*, dan *Caritas Czech Republic*. Masing-masing organisasi akan melaksanakan kegiatan bersama dengan LSM setempat dan/atau mitra sektor swasta.

Kegiatan pendukung subproyek dalam sektor-sektor ekonomi utama termasuk kakao, kopi, minyak nilam, hasil pertanian (beras, kacang tanah, kedelai), perikanan dan pengolahan ikan, serta peternakan. Kegiatan ini meliputi: (i) penyediaan input, perkakas dan peralatan, (ii) peningkatan kualitas, (iii) perbaikan pengolahan; (iv) pengemasan; (v) dukungan untuk akses pasar domestik dan internasional; (vi) akses terhadap keuangan; (vii) pengembangan koperasi; (viii) peningkatan lingkungan usaha, (ix) pembangunan kapasitas pemerintah daerah; (x) pemberdayaan perempuan; (xi) penguatan pusat penelitian dan pelatihan, (xii) peternakan dan penggemukan, dan (xiii) infrastruktur publik.

Proyek ini telah mengembangkan model pelaksanaan yang unik, dengan melibatkan Pemerintah Aceh sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan proyek. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) merupakan badan pelaksana utama di tingkat pusat. Penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan proyek, termasuk peningkatan pengadaan dan kapasitas pengelolaan keuangan, merupakan tujuan penting proyek tersebut. Pembangunan kapasitas kerja diberikan kepada staf pemerintah, dan Pemerintah Aceh terus mendukung proyek melalui pendanaan bersama dan kerja sama badan teknis pemerintah terkait. Komponen pembangunan kapasitas proyek ini telah menunjukkan prestasi yang signifikan. Partisipasi pemerintah dalam proses pengadaan, serta peninjauan, pemilihan dan pengawasan subproyek membantu mengembangkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola proyek-proyek serupa di masa mendatang.

Penundaan pada awal proyek yang terjadi karena perlunya menetapkan pengaturan pelaksanaan baru berdasarkan pendekatan inovatif dari proyek ini, kini telah diatasi. Proposal subproyek dan perjanjian hibah telah selesai, serta kegiatan-kegiatan proyek sekarang telah bergerak atau dimulai di 17 kabupaten di seluruh Aceh.

23. Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP)

Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian Nias (LEDP) mempermudah pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan pascabencana dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk bekerja dengan rumah tangga pedesaan yang miskin di Nias dalam mengidentifikasi, mengembangkan dan mempertahankan peluang mata pencaharian.

| | |
|------------------------------------|--|
| Jumlah Hibah | AS\$8,2 juta |
| Masa Pelaksanaan | Oktober 2010– Juni 2012 |
| Badan Mitra | Bank Dunia |
| Badan Pelaksana | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) |
| Pencairan hingga 30 September 2010 | AS\$0 |

LEDP Nias dirancang untuk mempermudah pemulihan ekonomi pascabencana dan pengentasan kemiskinan masyarakat yang terkena dampak tsunami dan gempa bumi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan taraf hidup dan pengembangan masyarakat di Kepulauan Nias. Proyek ini bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat dalam meningkatkan keterampilan teknis, keuangan, pengelolaan dan pemasaran untuk kegiatan mata pencaharian dan pembangunan ekonomi. Proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas teknis dan pengelolaan dalam pemerintah daerah untuk pelaksanaan program-program mata pencaharian di Nias. Proyek ini merupakan salah satu dari empat proyek MDF yang khusus berfokus pada pemulihan Nias, dan dikembangkan bersama dengan proyek MDF lain, RACBP Nias yang dilaksanakan oleh ILO.

Capaian Utama

Perjanjian Hibah untuk proyek ini ditandatangani pada bulan Juli 2010 dan sekarang berada dalam tahap awal pelaksanaan. Proyek ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Proyek RACBP dan LEDP Nias bekerja di kecamatan yang sama di Nias sehingga masyarakat pedesaan mendapatkan manfaat dari sinergi antara peningkatan peluang mata pencaharian pedesaan dan peningkatan akses. Dengan demikian maka dapat ditingkatkan akses terhadap pasar serta layanan lainnya dan manfaat yang berkontribusi terhadap pembangunan manusia dan ekonomi. Kedua proyek memiliki komite pengarah tingkat nasional yang sama (yang terdiri dari Bappenas dan KPDT) untuk meningkatkan koordinasi tingkat yang lebih tinggi. Di tingkat lokal, kedua proyek ini berkoordinasi melalui komite pengarah daerah bersama, yang dipimpin oleh Pemerintah Sumatera Utara dengan perwakilan pemerintah kabupaten melalui Bappeda. Koordinasi yang erat melalui

komite pengarah nasional dan daerah ini akan membantu memaksimalkan sinergi dan dampak dari kedua program.

Kegiatan proyek akan mendukung pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui pelatihan dan bantuan teknis. Sebagian besar kegiatan melibatkan pelatihan dan dukungan kelompok untuk kelompok perempuan dan mata pencaharian pertanian serta pengembangan kapasitas bagi badan pemerintah daerah di bawah Kementerian Pertanian, dengan fokus utama pada komoditas pertanian utama—beras, karet, dan kakao. Perbaikan mata pencaharian akan didukung melalui hibah dukungan masyarakat kecil dan layanan dukungan teknis untuk kelompok-kelompok ini.

Ini adalah proyek terakhir yang disetujui dalam portofolio MDF, sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan proyek dibatasi oleh tanggal penutupan MDF pada bulan Desember 2012. Kondisi di Nias, termasuk keterpencilan dan sulitnya akses menuju area proyek, ditambah dengan musim hujan yang panjang, merupakan tantangan lebih lanjut. Meskipun terdapat kendala ini, pemerintah nasional dan daerah serta pemangku kepentingan MDF lainnya telah menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama agar pelaksanaan proyek yang penting ini berjalan lancar hingga tanggal penutupannya pada bulan Juni 2012.



Proyek LEDP Nias dan RACBP akan bergerak di daerah yang sama untuk meningkatkan peluang ekonomi di daerah pedesaan Nias. RACBP akan membangun jalan untuk meningkatkan akses petani menuju pasar sedangkan LEDP akan memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan produksi.

Foto: Shaun Parker/Sekretariat MDF

Daftar Akronim dan Singkatan

| | | | |
|----------|--|----------|---|
| AAA | <i>Action Aid Australia</i> (Aksi Bantuan Australia) | KPDT | Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal |
| ACAP | <i>Anti-Corruption Action Plan</i> (Rencana Aksi Anti Korupsi) | KRRP | <i>Nias Kecamatan-based Reconstruction and Recovery Planning Project</i> (Proyek Perencanaan Pemulihan dan Rekonstruksi Berbasis Kecamatan di Nias) |
| ADF | <i>Aceh Development Fund</i> (Dana Bantuan Aceh) | LAN | Lembaga Administrasi Negara |
| AFEP | <i>Aceh Forest and Environment Project</i> (Proyek Hutan dan Lingkungan di Aceh) | LEDP | <i>Livelihoods and Economic Development Project</i> (Proyek Pengembangan Ekonomi dan Mata Pencaharian) |
| AGTP | <i>Aceh Government Transformation Programme</i> (Program Transformasi Pemerintah Aceh) | LIF | <i>Leuser International Foundation</i> (Yayasan Internasional untuk Leuser) |
| AMDAL | Analisa Mengenai Dampak Lingkungan | M&E | <i>Monitoring and Evaluation</i> (Pemantauan dan Evaluasi) |
| BAMFP | <i>Banda Aceh Flood Mitigation Project</i> (Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh) | MCK | Mandi, Cuci, Kakus |
| Bappeda | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | MDF | <i>Multi Donor Fund</i> (Dana Multi Donor) |
| Bappenas | Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional | MIS | <i>Management Information System</i> (Sistem Informasi Manajemen) |
| BKPP | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | MSW | <i>Municipal Solid Waste</i> (Pengelolaan Limbah Padat di Kabupaten) |
| BKRA | Badan Koordinasi Rekonstruksi Aceh | MTR | <i>Mid-Term Review</i> (Kajian Tengah Waktu) |
| BKRAN | Badan Koordinasi Rekonstruksi Aceh dan Nias | NGO | <i>Non-Governmental Organization</i> (Organisasi Non Pemerintah) |
| BKRN | Badan Koordinasi Rekonstruksi Nias | NITP | <i>Nias Islands Transition Project</i> (Program Transisi Pemerintah di Kepulauan Nias) |
| BNPB | Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional | O&M | <i>Operations and Maintenance</i> (Operasi dan Perawatan) |
| BPBA | Badan Penanggulangan Bencana Aceh | PACC | <i>Public Awareness Coordinating Committee</i> (Komite Koordinasi Kepedulian Masyarakat) |
| BPBD | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Pergub | Peraturan Gubernur |
| BPN | Badan Pertanahan Nasional | PNPM | Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat |
| BRR | Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias | PDAM | Perusahaan Daerah Air Minum |
| CBLR3 | <i>Capacity Building for Local Resource-based Rural Roads</i> (Perbaikan Jalan dengan Sumber Daya Lokal) | R2C3 | <i>Rehabilitation and Reconstruction Completion and Continued Coordination</i> (Program Koordinasi Penyelesaian dan Kelanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) |
| CBO | <i>Community-Based Organization</i> (Organisasi Berbasis Masyarakat) | RACBP | <i>Nias Islands Rural Access Capacity Building Project</i> (Proyek Akses Pedesaan dan Pengembangan Kapasitas Nias) |
| CCA | <i>Canadian Co-operative Association</i> (Asosiasi Koperasi Kanada) | RALAS | <i>Reconstruction of the Aceh Land Administration System Project</i> (Proyek Rekonstruksi Sistem Administrasi Pertanahan Aceh) |
| CDA | <i>Community-Driven Adjudication</i> (Pengadilan Berbasis Masyarakat) | RAND | <i>Recovery of Aceh-Nias Database</i> (Pemulihan Basis Data Aceh-Nias) |
| CDD | <i>Community-Driven Development</i> (Pembangunan Berbasis Masyarakat) | Rekompak | <i>Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Program</i> (Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Masyarakat) |
| CPDA | <i>Consolidating Peaceful Development in Aceh</i> (Program Konsolidasi Pembangunan yang Damai di Aceh) | SDLP | <i>Sea Delivery and Logistics Programme</i> (Program Angkutan Laut dan Logistik) |
| CSO | <i>Civil Society Organization</i> (Organisasi Sipil Masyarakat) | Simbada | Sistem Informasi Barang dan Aset Daerah |
| CSP | <i>Community Settlement Plan</i> (Rencana Perumahan Masyarakat) | SIPKD | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah |
| CSRC | <i>Civil Society Resource Center</i> (Pusat Sumber Daya Masyarakat Sipil) | SKPD | Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| CSRRP | <i>Community-based Settlement Rehabilitation and Reconstruction Program</i> (Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Perumahan Berbasis Masyarakat) | SME | <i>Small and Medium Enterprise</i> (Usaha Kecil dan Menengah) |
| DFID | <i>Department for International Development of the United Kingdom</i> (Departemen untuk Pembangunan Internasional) | SPADA | <i>Support for Poor and Disadvantaged Areas Project</i> (Dukungan bagi Daerah Miskin dan Tertinggal) |
| DIPA | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | TA | <i>Technical Assistance</i> (Bantuan Teknis) |
| DRR | <i>Disaster Risk Reduction</i> (Pengurangan Risiko Bencana) | TBSU | <i>Trail Bridge Support Unit</i> (Unit Pendukung Jalur Jembatan di Nepal) |
| DRR-A | <i>Disaster Risk Reduction - Aceh Project</i> (Proyek Pengurangan Risiko Bencana di Aceh) | TDMRC | <i>Tsunami Disaster and Mitigation Research Center</i> (Pusat Penelitian Bencana dan Penanggulangan Tsunami) |
| EDFF | <i>Economic Development Financing Facility</i> (Fasilitas Pendanaan Pengembangan Ekonomi) | TEWS | <i>Tsunami Early Warning System</i> (Sistem Peringatan Dini Tsunami) |
| EGA | <i>Economic Governance in Aceh</i> (Tata Kelola Ekonomi di Aceh) | TRPRP | <i>Tsunami Recovery Port Redevelopment Programme</i> (Program Rekonstruksi Pelabuhan) |
| EIA | <i>Environmental Impact Assessment</i> (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) | TRWMP | <i>Tsunami Recovery Waste Management Programme</i> (Program Pengelolaan Limbah Tsunami) |
| FFI | <i>Fauna and Flora International</i> (Fauna and Flora Internasional) | UNDP | <i>United Nations Development Programme</i> (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) |
| Gol | <i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia) | UPP | <i>Urban Poverty Project</i> (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) |
| ILO | <i>International Labour Organisation</i> (Organisasi Buruh Internasional) | WFP | <i>World Food Programme</i> (Program Bantuan Pangan Dunia) |
| IOM | <i>International Organization for Migration</i> (Organisasi Internasional untuk Migrasi) | | |
| IREP | <i>Infrastructure Reconstruction Enabling Program</i> (Program Pemberdayaan Rekonstruksi Infrastruktur) | | |
| IRFF | <i>Infrastructure Reconstruction Financing Facility</i> (Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur) | | |
| KDP | <i>Kecamatan Development Project</i> (Program Pengembangan Kecamatan) | | |
| KNOW | <i>Knowledge Management Center</i> (Pusat Manajemen Pengetahuan) | | |

Peta Aceh dan Nias





Republik Indonesia



BRR



Uni Eropa



Belanda



Inggris



Kanada



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Bank Dunia



Swedia



Norwegia



Denmark



Jerman



Belgia



Finlandia



ADB



Amerika Serikat



Selandia Baru



Irlandia

